

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENDETEKSI
KECENDERUNGAN KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**



Diajukan oleh
Rizqy Arasiani Annisa
22919025

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENDETEKSI
KECENDERUNGAN KECURANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Tesis S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Rizqy Arasiani Annisa

22919025

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

RIZQY ARASIANI ANNISA

No. Mhs. : 22919025

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENDETEKSI KECENDERUNGAN
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji II

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahmadi, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Penulis,



(Rizqy Arasiani Annisa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar magister akuntansi di Universitas Islam Indonesia. Dengan hati yang tulus, tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Asmudi dan Ibu Suwati) tersayang yang dengan tulus membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan memberikan motivasi serta selalu mendoakan sehingga saya mencapai kesuksesan ini.
2. Suami tercinta saya (Moh. Yos Budi Utomo) yang selalu mendoakan, mendukung, membimbing, dan memberikan motivasi serta arahan.
3. Kakak-Adik saya (Muhammad Latif Chasani, Zahra Baity, Sandy Muttaqien, Wahyu Kurniasari, Moh. Fithrah Mulya Ramadhan) yang selalu mendukung, membimbing dan memberikan motivasi serta arahan.
4. Keluarga besar Pardjio dan H. Masykuri yang selalu memberikan dukungan, motivasi, arahan serta doa.
5. Teman-teman seperjuangan magister akuntansi angkatan 25. Terima kasih atas ilmu dan kebersamaannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini memuat tentang pembahasan yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Mendeteksi Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, dan kepercayaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Juni 2024

Penulis,

(Rizqy Arasiani Annisa)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Agensi.....	13

2.1.2 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	15
2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.1.4 Laporan Hasil Pemeriksaan.....	20
2.1.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Hipotesis Penelitian.....	29
2.3.1 Pengaruh <i>Quick Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan.....	29
2.3.2 Pengaruh <i>Current Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	30
2.3.3 Pengaruh <i>Working Capital to Total Assets Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan.....	32
2.3.4 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	34
2.3.5 Pengaruh <i>Debt to Capital Assets Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan.....	36
2.4 Kerangka Konseptual	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data	39
3.1.1 Sumber Data.....	39
3.1.2 Teknik Pengambilan Data	39
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.2.1 Populasi	41

3.2.2 Sampel	41
3.3 Variabel Penelitian	42
3.3.1 Variabel Dependen	42
3.3.2 Variabel Independen	43
3.4 Teknik Analisis Data	45
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	45
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	45
3.4.2.1 Uji Normalitas	45
3.4.2.2 Uji Multikolinearitas	46
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	46
3.4.3 Analisis Statistik Regresi Linear Berganda	46
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48
3.4.5 Uji F	48
3.4.6 Uji T	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	51
4.3 Uji Asumsi Klasik	54
4.3.1 Uji Normalitas	54
4.3.2 Uji Multikolinearitas	56
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	58
4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.5 Uji F	60

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda.....	61
4.7 Pembahasan	63
4.7.1 Pengaruh <i>Quick Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan.....	63
4.7.2 Pengaruh <i>Current Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	65
4.7.3 Pengaruh <i>Working Capital to Total Assets Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	67
4.7.4 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	69
4.7.5 Pengaruh <i>Debt to Capital Assets Ratio</i> Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan	71
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Keterbatasan Penelitian	75
5.3 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian	51
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3 Uji Normalitas Sebelum Eliminasi <i>Outlier</i>	54
Tabel 4.4 Uji Normalitas Setelah Eliminasi <i>Outlier</i>	56
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser	58
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi	59
Tabel 4.8 Uji F	61
Tabel 4.9 Analisis Regresi Linier Berganda	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Kabupaten dan Kota	84
Lampiran 2 Rekapitulasi Data LKPD Kabupaten/Kota	86
Lampiran 3 Uji Data Sebelum Eliminasi <i>Outlier</i>	106
Lampiran 4 Uji Setelah Eliminasi <i>Outlier</i> dan Transformasi	126
Lampiran 5 Statistik Deskriptif.....	142
Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik	143
Lampiran 7 Analisis Regresi.....	146
Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian	148

ABSTRAK

Kecurangan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kecurangan yang memiliki dampak kerugian cukup besar. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kecurangan pada laporan keuangan adalah dengan melalui metode analisis rasio keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio* berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 395 LKPD. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Statistik versi 25. Berdasarkan kerangka konseptual yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa *quick ratio* dan *working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan LKPD. *Current ratio* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan LKPD. Sedangkan, *debt to equity ratio* dan *debt to capital assets ratio* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan LKPD.

Kata Kunci : Kecenderungan Kecurangan LKPD, Rasio Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Fraudulent financial statements is a form of fraud that has quite a large loss impact. One approach that can be used to detect potential fraudulent financial statements is financial ratio analysis method. This research aims to analyze the influence of quick ratio, current ratio, working capital to total assets ratio, debt to equity ratio, and debt to capital asset ratio have the potential to detect tendencies towards fraudulent local government financial statements.

This research is quantitative method using purposive sampling techniques. The sample used 395 local government financial statements. Data analysis in this study used SPSS Statistics version 25. Based on the resulting conceptual framework, it can be concluded that quick ratio and working capital to total assets ratio have a negative effect on fraudulent local government financial statements. Current ratio has a positive effect on fraudulent local government financial statements. Meanwhile, debt to equity ratio and debt to capital assets ratio have no effect on fraudulent local government financial statements.

Keywords : Fraud, Financial Ratio, Local Government Financial Statements

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan aspek penting yang harus dijalankan oleh organisasi sektor pemerintah. Akuntabilitas menjadi wadah dalam pengungkapan informasi (*disclosure*) kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah. Di Indonesia, akuntabilitas keuangan merupakan wujud dari bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Perwujudan akuntabilitas keuangan di pemerintah pusat maupun daerah ini dapat dilihat dari tata cara setiap instansi pusat maupun daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan dijadikan sebagai sarana untuk mengetahui nilai dari sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, mengetahui posisi keuangan instansi pemerintah, serta untuk menentukan taat dan patuhnya instansi pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus terbebas dari kecurangan atau yang dikenal dengan istilah *fraud*. *Fraud* atau yang dikenal dengan istilah kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau melanggar hukum serta merugikan dan merusak reputasi perusahaan (Sari et al., 2022). Menurut ACFE

(2022), dalam *Occupational Fraud 2022: a Report to the Nations* menyatakan bahwa kasus kecurangan laporan keuangan menyebabkan kerugian sebanyak \$593.000 dengan persentase kasus 9%. Kasus kecurangan terhadap laporan keuangan ini merupakan jenis kecurangan (*fraud*) yang memiliki dampak kecurangan paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (Yesiariani & Rahayu, 2017).

Di Indonesia, pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah untuk mendanai berbagai program dan kegiatan publik. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih terdapat unsur kecurangan yang mencakup tindakan manipulasi terhadap data keuangan sehingga data keuangan yang dilaporkan menjadi tidak transparan. Kecurangan (*fraud*) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk penipuan yang dilakukan secara sengaja dan dapat menimbulkan adanya kerugian.

Fenomena kecurangan dapat dilihat dari pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dimana entitas tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya jumlah temuan audit yang mengindikasikan kerugian negara dari Laporan Hasil Pemeriksaan (Rahmatika, 2020). Sedangkan kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan adanya kecurangan (Akmal et al., 2023). Kecenderungan

kecurangan yang lazim terjadi di tingkat pemerintah berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan etika. Perilaku tidak etis dan curang dapat menyebabkan adanya tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penting bagi instansi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tidak adanya unsur salah saji material dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya dijelaskan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 menunjukkan pemeriksaan BPK atas 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun Anggaran 2022. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tersebut BPK mengungkapkan adanya 7.661 temuan audit yang memuat 12.855 permasalahan yang terdiri atas 5.628 permasalahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 7.227 permasalahan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,07 triliun (BPK, 2022). Temuan audit atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengindikasikan bahwa adanya kelemahan, penyimpangan, dan ketidakwajaran dalam pelaporan akuntansi pemerintah daerah (Atmaja & Probohudono, 2015).

Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Hal ini diharapkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan. Namun, tanpa mengurangi akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 masih menemukan banyak temuan audit yang mencakup permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Meskipun temuan audit yang mencakup permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, akan tetapi temuan audit tersebut dapat mengurangi keandalan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah. Kegagalan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menimbulkan adanya tindakan manipulasi data keuangan. Tindakan manipulasi data dapat mengindikasikan adanya kecurangan terhadap laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa temuan audit pada laporan keuangan pemerintah daerah dapat menunjukkan adanya kecenderungan kecurangan yang terjadi.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, BPK menemukan temuan audit atas permasalahan SPI dan ketidakpatuhan yang memuat kurangnya penetapan atas lima jenis pajak minimal sebesar Rp416.064.746,95. Terdapat 427 objek pajak yang belum terdata sehingga daerah belum menerima pendapatan minimal sebesar Rp122.164.458,00. Pengelolaan pendapatan hasil kerja sama pemanfaatan aset rusunawa oleh Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas P2CKTR) dan Pemerintah Desa Tambaksawah tidak memadai sehingga daerah belum menerima bagi hasil. Hasil kerja sama pengelolaan parkir tidak menguntungkan daerah sehingga pendapatan atas kerja sama tersebut tidak disetor ke kas daerah. Kelebihan bayar pada tiga OPD akibat kekurangan volume pekerjaan atas enam paket pekerjaan sebesar Rp585.321.877,30 dan harga satuan penawaran timpang atas dua paket pekerjaan sebesar Rp306.440.306,53, serta denda keterlambatan pada satu OPD belum dikenakan atas dua paket pekerjaan sebesar Rp320.908.255,40. Pengelolaan Piutang PBB P2 tidak tertib sehingga database wajib pajak dan objek pajak tidak mutakhir dan tidak valid.

Menindaklanjuti hasil temuan audit atas permasalahan SPI dan ketidakpatuhan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 bahwa kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu merekomendasikan perbaikan untuk langkah selanjutnya. Adanya kelemahan dan ketidakpatuhan dalam pelaporan akuntansi pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan yang telah disusun tidak sesuai dengan SAP. Ketidakpatuhan terhadap SAP ini mengakibatkan adanya manipulasi data yang dapat mengindikasikan praktik kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk meminimalisir adanya indikasi kecurangan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui tindakan pendeteksian potensi kecenderungan kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kecurangan pada laporan keuangan adalah dengan melalui metode atau teknik analisis rasio keuangan (Arifin & Prasetyo, 2018). Rasio keuangan merupakan alat analisis yang umum digunakan dalam mengukur kinerja keuangan suatu entitas. Rasio keuangan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan serta operasional suatu entitas. Rasio keuangan memiliki potensi besar sebagai alat yang efektif untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan atau tidak wajar dalam laporan keuangan. Penelitian sebelumnya telah menganalisis rasio-rasio keuangan yang memiliki potensi dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis rasio likuiditas dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang menunjukkan *quick ratio*, *current ratio*, dan *working capital to total assets ratio* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Wijaya et al., 2021; Christian & Eddy, 2020; Ardiansyah et al., 2019; Milasari & Ratmono, 2019; Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018). Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kecurangan akan terjadi ketika kondisi likuiditas perusahaan sedang tidak baik. Untuk menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan sehat, maka manajer akan melakukan hal apapun termasuk tindakan untuk memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, masalah likuiditas perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap kecurangan dalam pelaporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang dalam kondisi tidak mengalami masalah likuiditas.

Penelitian sebelumnya telah menganalisis rasio *leverage* dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang menunjukkan *debt to equity ratio* dan *debt to total assets ratio* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Yaramah & Hidayat, 2022; Firdausya & Parasetya, 2021; Wijaya et al., 2021; Christian & Eddy, 2020; Ardiansyah et al., 2019; Milasari & Ratmono, 2019; Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018; dan Widyanti & Nuryatno, 2018). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai *leverage* tinggi cenderung melakukan tindakan kecurangan. Ketika perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan utangnya, hal tersebut menjadi tekanan bagi manajemen untuk

mencari pinjaman modal dari kreditor sehingga manajemen akan melakukan tindakan apapun termasuk memanipulasi laporan keuangan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat baik dan layak mendapatkan pinjaman dari kreditor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, rasio-rasio keuangan dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Faktor likuiditas dan *leverage* dapat memicu adanya kecurangan laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendeteksian terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah melalui rasio-rasio keuangan. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan dan efektivitas penggunaan analisis rasio keuangan dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini akan menggunakan temuan audit negatif dalam menunjukkan tingkat kecenderungan kecurangan. Semakin banyak temuan negatif menunjukkan semakin tinggi tingkat kecenderungan kecurangan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih terfokus pada sektor swasta seperti Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) dan mengindikasikan perusahaan yang terdeteksi kecurangan maupun tidak hanya berdasarkan daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan variabel *dummy*. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis secara mendalam terhadap penggunaan rasio-rasio keuangan yang berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki

sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *quick ratio* berpengaruh dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah *current ratio* berpengaruh dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah *working capital to total assets ratio* berpengaruh dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah *debt to equity ratio* berpengaruh dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah *debt to total assets ratio* berpengaruh dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh analisis rasio keuangan yang meliputi *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to*

total assets ratio, *debt to equity ratio*, dan *debt to total assets ratio* berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat referensi terkait dengan analisis rasio-rasio keuangan yang berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah serta mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bermanfaat dalam membantu pemerintah daerah untuk memitigasi risiko kecurangan, meningkatkan pengawasan internal dengan memperkuat kontrol internal, penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah, serta instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan anti-*fraud* sehingga instansi dapat membangun integritas dan meningkatkan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis rasio-rasio keuangan yang berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang penjelasan yang berkaitan dengan latar belakang yang berisi isu-isu atau permasalahan yang melatarbelakangi dan memberikan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya akan disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisikan tentang penjelasan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diangkat serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini peneliti juga menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini serta kerangka konseptual penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini, peneliti menjelaskan tentang desain penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis data sebagai dasar serta pedoman bagi peneliti untuk memperoleh dan mengolah data yang dibutuhkan.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan alat analisis yang telah ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan rasio-rasio keuangan yang berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pada bab ini, berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti menjelaskan bagaimana pengaruh *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio* berpotensi dalam mendeteksi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bab V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini peneliti juga menjelaskan tentang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan. Keterbatasan dan saran ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menganalisis perbedaan kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) yang berdampak pada terjadinya konflik kepentingan (Apriliana & Agustina, 2017). Penyebab konflik kepentingan adalah prinsipal yang menginginkan pengembalian yang tinggi sementara agen menginginkan kompensasi yang besar atas kinerjanya (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi yang terjadi akan memungkinkan agen untuk menyembunyikan informasi keuangan perusahaan dari prinsipal. Sebab, prinsipal akan meminta agen untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sehat hingga agen mengalami tekanan dan termotivasi untuk melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan. Munculnya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen dalam teori agensi ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Teori agensi dapat digunakan sebagai pengantar logika dan hipotesis pendukung dalam menentukan faktor-faktor yang dapat mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan telah dianggap sebagai salah satu metode efektif dalam mengevaluasi kecurangan (Firdausya & Parasetya, 2021). Melalui analisis rasio keuangan, pengguna laporan keuangan dapat

menilai posisi keuangan suatu organisasi sehingga para pengguna dapat memperkirakan kinerja organisasi dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, rasio keuangan berfungsi sebagai panduan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan ekonomi. Namun, rasio keuangan dapat menjadi pemicu bagi manajemen untuk melakukan kecurangan apabila rasio keuangan organisasi bernilai buruk. Akibatnya, kelangsungan hidup organisasi dapat terancam.

Dalam teori agensi, adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terjadi ketika prinsipal yang menginginkan kondisi likuiditas perusahaan baik, sedangkan agen yang dituntut untuk menjaga likuiditas perusahaan. Kinerja agen akan dinilai baik jika agen mampu menjaga likuiditas perusahaan. Sementara itu, jika likuiditas perusahaan semakin rendah, maka kondisi perusahaan akan memburuk. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Akibatnya, agen akan mengalami tekanan sehingga memicu melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan demi mempertahankan kondisi perusahaan agar terlihat baik dimata pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Jika suatu perusahaan memiliki nilai *leverage* yang tinggi, maka akan berisiko mengalami kebangkrutan apabila perusahaan tidak mampu melunasi utangnya. Dalam teori agensi, adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat terjadi ketika prinsipal yang menginginkan tambahan modal untuk melunasi utang, sedangkan agen

yang dituntut untuk mencari modal tambahan dan kreditor dalam memenuhi persyaratan utang yang diberikan. Jika agen tidak mampu mencari modal tambahan, maka perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Akibatnya, agen akan mengalami tekanan sehingga memungkinkan agen untuk melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan (ketika kondisi keuangan perusahaan dianggap baik, maka perusahaan akan mendapatkan tambahan modal dari kreditor).

Pada struktur pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan keagenan dapat terjadi antara pemerintah dengan rakyat, di mana pemerintah berperan sebagai agen, dan rakyat sebagai prinsipal, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Farizi et al., 2020).

2.1.2 Kecurangan (*Fraud*)

Fraud atau kecurangan pernah dijabarkan oleh Singleton pada tahun 2010 yang mengartikan kecurangan merupakan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi para korbannya dan/atau pelaku kecurangan akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya (Maria et al., 2019). Menurut Rustendi (2018), *fraud* atau kecurangan dapat diartikan sebagai suatu tindakan ilegal yang bercirikan penipuan, menyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh pihak tertentu

maupun organisasi dengan maksud untuk mendapatkan uang, aset, jasa, atau untuk menghindari pembayaran maupun kerugian atas jasa, ataupun untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis. Menurut Tunggal (2016), kecurangan merupakan sebuah istilah yang umum dan mencakup segala bentuk tindakan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang terjadi dalam lingkungan sosial dan memiliki konsekuensi serius bagi ekonomi, perusahaan, dan individu yang muncul ketika adanya keserakahan maupun peluang untuk melakukan hal tersebut (Pedneault et al., 2012). Dengan demikian, *fraud* atau kecurangan pada dasarnya meliputi tindakan penyimpangan (*irregularities*) dan/atau tindakan ilegal (*illegal acts*) yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung unsur kesengajaan, penipuan, serta dilakukan secara terorganisir untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan atau *fraud* dalam beberapa klasifikasi yang meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan pelaporan keuangan (Arifin, 2020).

Kecurangan terhadap laporan keuangan merupakan salah satu bentuk kecurangan yang memiliki dampak kerugian cukup besar. Kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) adalah kesalahan penyajian keuangan suatu organisasi melalui penghilangan

nilai atau pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan (Haqq & Budiwitjaksono, 2020). Kecurangan terhadap laporan keuangan merupakan bentuk kesengajaan ataupun kelalaian melalui penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Herianti et al., 2023). Skema kecurangan laporan keuangan dapat meliputi pendapatan yang disajikan lebih tinggi dari seharusnya dengan maksud agar kinerja instansi tampak lebih baik sehingga pelaku akan mendapatkan keuntungan berupa bonus atau insentif maupun jenjang karier yang lebih tinggi. Skema selanjutnya dapat berupa penyajian aset yang lebih tinggi dari seharusnya dengan maksud agar instansi akan tampak lebih kuat dan menarik bagi investor. Penyajian kewajiban maupun beban yang lebih rendah dari seharusnya dengan maksud agar instansi dinilai tidak memiliki utang yang banyak sehingga posisi keuangan instansi tampak lebih baik. Kecurangan laporan keuangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja pada level apapun dan siapapun yang memiliki kesempatan. Kasus kecurangan terhadap laporan keuangan ini merupakan jenis kecurangan (*fraud*) yang memiliki dampak kecurangan paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya (Yesiariani & Rahayu, 2017).

Kecenderungan kecurangan laporan keuangan merupakan keinginan untuk melakukan tindakan salah saji material yang dilakukan secara sengaja atau kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga menghasilkan

asimetri informasi (Wahyuningsih et al., 2022). Kecenderungan kecurangan laporan keuangan yang lazim terjadi di tingkat pemerintah berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah. Kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan etika. Perilaku tidak etis dan curang dapat menyebabkan adanya tindakan penghilangan atau penambahan jumlah tertentu sehingga terjadi salah saji dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Hidayat (2018), laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak yang membutuhkan mengenai kondisi dan posisi keuangan suatu entitas. Menurut Ismail & Enceng (2019), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Lumaku & Nindiasari, 2023).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, menilai posisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta membantu dalam menentukan ketaatan instansi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Savitri et al., 2015).

Tujuan utama pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas instansi dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah daerah wajib disampaikan secara berkala oleh setiap pemerintah daerah, baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari tujuh laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.1.4 Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan keuangan daerah merupakan tindakan terhadap objek dan subjek yang akan diperiksa dengan meminta bukti-bukti yang diperlukan dan melakukan wawancara dengan pejabat dari instansi yang diperiksa dimana pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melihat apakah perencanaan yang dibuat oleh instansi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, dan jika terdapat adanya unsur penyimpangan yang mengakibatkan adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah maka diberikannya sanksi terhadap pelaku baik secara administrasi maupun hukum yang berlaku (Elsye et al., 2018).

Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak independen melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Setiap hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, BPK akan menyusun dan menyajikan laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan tersebut memuat opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan yang memuat temuan audit atas permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan memuat temuan audit atas

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang selanjutnya disebut ketidakpatutan (BPK, 2021). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan simpulan. Selanjutnya, BPK diharuskan untuk menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya dan kepada presiden serta kepala daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh terkait dengan hasil pemeriksaan.

2.1.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan merupakan perhitungan angka-angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan lainnya yang memiliki hubungan relevan dan signifikan (Seto et al., 2023). Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah adalah analisis rasio keuangan daerah. Analisis rasio keuangan daerah merupakan kegiatan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah yang hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Mahmudi, 2019). Analisis rasio keuangan daerah memerlukan teknik tertentu agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Analisis rasio keuangan daerah dapat digunakan

untuk membandingkan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Adapun rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan penelitian ini dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu diantaranya:

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban lancarnya dengan memanfaatkan aset lancarnya (Restianti & Agustina, 2018). Ketika rasio likuiditas entitas baik, menunjukkan bahwa entitas tersebut memiliki kemampuan dalam melunasi utang jangka pendeknya (Sari & Dwilita, 2019). Untuk melakukan analisis rasio likuiditas pada penelitian ini, ada beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu diantaranya:

- a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset lancar dikurangi dengan persediaan (Kusmayadi et al., 2021). *Quick ratio* ini merupakan salah satu analisis likuiditas terbaik jika dibandingkan dengan *current ratio*. Standar umum rata-rata *quick ratio* adalah 100% (1 : 1) atau 1,5 kali dimana keadaan suatu entitas lebih baik dari entitas lain (Widiyanti, 2014). *Quick ratio* ini mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya secara cepat. Sementara itu, semakin

tinggi nilai *quick ratio* maka semakin tinggi pula likuiditas keuangan pemerintah daerah.

b. *Current Ratio*

Current ratio merupakan rasio keuangan yang mengukur likuiditas pemerintah daerah dengan membandingkan aktiva lancar yang dimiliki terhadap utang lancar (Ciptawan & Frandjaja, 2021). *Current ratio* ini menjadi ukuran standar yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan pemerintah daerah. Standar umum rata-rata *current ratio* yaitu minimal 200% (2:1) atau 2 kali, yang artinya dengan hasil rasio tersebut suatu entitas sudah berada di titik aman dalam jangka pendek (Kasmir, 2018). *Current ratio* akan menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup dalam melunasi utangnya.

c. *Working Capital to Total Assets Ratio*

Working capital to total assets ratio merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kinerja dari modal yang diperoleh dari modal sendiri dan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah (Rahayu, 2020). Rasio ini membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi dengan utang lancar dengan total aktiva. *Working capital to total assets ratio* digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.

2. Rasio Utang (*Leverage Ratio*)

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Utami, 2017). Untuk melakukan analisis rasio utang pada penelitian ini, ada beberapa rasio yang dapat digunakan yaitu diantaranya:

a. *Total Debt to Total Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio keuangan yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utang dengan menggunakan modal atau ekuitas (Abadi et al., 2019). Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan bahwa risiko pemberian utang semakin besar.

b. *Total Debt to Total Capital Assets Ratio*

Debt to capital assets ratio merupakan rasio keuangan yang membandingkan total utang dengan total aset modal pemerintah daerah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah menggunakan atau memanfaatkan utang dalam membiayai kekayaan atau aset yang dimilikinya (Reza et al., 2023). Aset modal diproksikan dengan aset tetap pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Khamainy et al., 2022	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio</i>	<i>Total debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
2	Sari et al., 2022	• Dependen: <i>Fraudulents financial statement</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio</i>	<i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
3	Yaramah & Hidayat, 2022	• Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
4	Firdausya & Parasetya, 2021	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, current ratio</i>	• <i>Current ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to equity ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
5	Koharudin & Januarti, 2021	• Dependen: <i>Fraudulents Financial Reporting</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

6	Wijaya et al., 2021	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio, current ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Current ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
7	Christian & Eddy, 2020	• Dependen: <i>Fraudulents Financial Reporting</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
8	Widhayanti & Utomo, 2020	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
9	Ardhiansyah et al., 2019	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i>	• <i>Current ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan

		• Independen: <i>Current ratio, total debt to assets ratio</i>	keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
10	Haqq & Budiwitjaksono, 2020	• Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
11	Milasari & Ratmono, 2019	• Dependen: <i>Fraudulents financial reporting</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
12	Ramadhan & Laksito, 2019	• Dependen: <i>Fraudulents financial reporting</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio, current ratio, quick ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Current ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Quick ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
13	Arifin & Prasetyo, 2018	• Dependen: <i>Fraudulents financial reporting</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

		<i>debt to assets ratio, working capital to total assets ratio, current ratio, quick ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Current ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Quick ratio</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
14	Novitasari & Chariri, 2018	• Dependen: <i>Financial Statement Fraud</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.
15	Widyanti & Nuryatno, 2018	• Dependen: <i>Financial statement fraud</i> • Independen: <i>Total debt to equity ratio, total debt to assets ratio, working capital to total assets ratio</i>	• <i>Total debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Total debt to assets ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Working capital to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
16	Prajanto & Pratiwi, 2016	• Dependen: <i>Financial reporting fraud</i> • Independen: <i>Total debt to assets ratio, current ratio</i>	• <i>Total debt to assets ratio</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. • <i>Current ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Quick Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada sektor publik, *quick ratio* merupakan salah satu analisis likuiditas terbaik jika dibandingkan dengan *current ratio*. *Quick ratio* mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya secara cepat.

Dalam teori agensi, prinsipal akan menginginkan kondisi likuiditas organisasi baik melalui kecepatan dalam membayarkan utangnya. *Quick ratio* dapat membantu prinsipal untuk memahami bagaimana agen mengelola likuiditas organisasi. Prinsipal menginginkan kondisi likuiditas organisasi baik, sedangkan agen dituntut untuk menjaga kecukupan likuiditas melalui kecepatan membayar utang. Jika nilai *quick ratio* rendah atau tidak memadai, akan menunjukkan bahwa agen tidak mampu menjaga kecukupan likuiditas organisasi. Hal tersebut dapat memicu adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Akibatnya, agen akan mengalami tekanan dan memungkinkan melakukan tindakan apapun dalam menjaga likuiditas, termasuk memanipulasi laporan keuangan. Semakin rendah nilai *quick ratio* menunjukkan semakin rendah likuiditas yang dapat mengindikasikan tingginya tindakan kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *quick ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *quick ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan (Arifin & Prasetyo, 2018). Jika nilai *quick ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor pengurang risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena mencerminkan kemampuan agen untuk memenuhi kewajiban dengan jujur dan transparan, sehingga mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H₁: *Quick ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh *Current Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada sektor publik, *current ratio* menjadi ukuran standar yang dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan organisasi pemerintah. *Current ratio* akan menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup dalam melunasi utangnya.

Dalam teori agensi, prinsipal akan meminta agen untuk menjaga kecukupan aset dalam melunasi utangnya. Apabila nilai *current ratio* rendah akan menyebabkan aset organisasi menurun. Sementara itu, prinsipal akan meminta agen untuk mendapatkan dana tambahan dari

kreditor untuk melunasi utang. Namun, jika nilai *current ratio* rendah dapat mengakibatkan organisasi kehilangan kepercayaan dari kreditor sehingga organisasi akan kesulitan untuk mendapatkan dana tambahan. Hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Demi menunjukkan kepada kreditor bahwa kondisi likuiditas organisasi baik, maka dapat menimbulkan tekanan bagi agen sehingga agen akan melakukan tindakan apapun termasuk tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan. Organisasi pemerintah dengan nilai *current ratio* rendah memiliki kemungkinan besar terlibat dalam kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wijaya et al., 2021; Ardhiansyah et al., 2019; Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *current ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Wijaya et al., 2021). Jika nilai *current ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor pengurang risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena mencerminkan kemampuan agen menjaga likuiditas organisasi sehingga mampu mendapatkan dana tambahan dari kreditor untuk melunasi utang. Hal ini berpotensi mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H₂: *Current ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh *Working Capital to Total Assets Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada sektor publik, *working capital to total assets ratio* merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan oleh prinsipal untuk memahami bagaimana agen mengelola modal kerja (*working capital*) dalam hubungannya dengan total aset organisasi. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana agen mengelola sumber daya organisasi. Semakin tinggi nilai rasio ini semakin tinggi *margin of safety* yang dimiliki organisasi untuk menutupi utang jangka pendeknya.

Dalam teori agensi, prinsipal akan mengidentifikasi apakah agen akan mengambil keputusan yang dapat merugikan organisasi demi kepentingan pribadi. Hal ini dikarenakan prinsipal menginginkan agen mampu mengelola sumber daya organisasi dengan baik. Namun, jika nilai *working capital to total assets ratio* menurun secara signifikan, akan mengindikasikan bahwa agen mengabaikan pengelolaan sumber daya organisasi dalam menjaga kecukupan likuiditas untuk memenuhi utang jangka pendek. Hal tersebut dapat memicu adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Demi menunjukkan likuiditas organisasi baik, memungkinkan agen melakukan tindakan apapun termasuk tindakan manipulasi terhadap

laporan keuangan sehingga prinsipal akan menilai bahwa organisasi dalam keadaan sehat. Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai *working capital to total assets ratio*, keterlibatan dalam kecurangan laporan keuangan juga semakin tinggi (Christian & Eddy, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan (Christian & Eddy, 2020; Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018). Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *working capital to total assets ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan. Jika nilai *working capital to total assets ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor pengurang risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena mencerminkan kemampuan agen untuk memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan modal kerja yang memadai, sehingga mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H₃: *Working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada sektor publik, rasio utang (*leverage*) dapat mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utangnya. Ketika utang terhadap ekuitas ini tinggi akan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah kelebihan utang dan harus segera mencari solusi untuk melunasinya.

Dalam kerangka teori agensi, *debt to equity ratio* dapat digunakan prinsipal untuk memahami bagaimana agen mengelola struktur modal organisasi dengan menggabungkan utang dan ekuitas. Prinsipal dapat memantau apakah agen menggunakan utang dan ekuitas dengan bijaksana atau sudah mencapai pada tingkat yang berpotensi merugikan.

Jika nilai *debt to equity ratio* semakin besar menunjukkan bahwa risiko pemberian kredit juga semakin tinggi. Risiko kredit yang tinggi akan memunculkan kekhawatiran dari pihak kreditor bahwa pemerintah daerah nantinya tidak memiliki kemampuan dalam mengembalikan pinjaman. Apabila pemerintah daerah tidak mendapatkan pinjaman modal, maka dinilai tidak mampu melunasi utangnya. Hal ini dapat memicu adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal akan menuntut agen untuk mendapat pinjaman modal sementara agen akan merasa tertekan. Akibatnya, agen termotivasi melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan bahwa kondisi keuangan organisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh kreditor.

Semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* akan meningkatkan tekanan bagi organisasi untuk melakukan tindakan kecurangan (Siswanto, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Yaramah & Hidayat, 2022; Firdausya & Parasetya, 2021; Arifin & Prasetyo, 2018). Hal ini menjelaskan bahwa jika nilai *debt to equity ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor yang meningkatkan risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena tingginya tingkat ketergantungan terhadap utang sebagai sumber dana. Di sisi lain, dapat memberikan tekanan pada agen untuk menunjukkan keuangan yang lebih baik daripada sebenarnya serta menciptakan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H4: *Debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh *Debt to Capital Assets Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Pada sektor publik, *debt to capital assets ratio* digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menjamin utang.

Dalam teori agensi, adanya potensi konflik kepentingan bahwa prinsipal dapat menggunakan rasio ini untuk memantau apakah agen menggunakan utang secara efisien atau utang organisasi telah mencapai pada tingkat yang berpotensi merugikan. Melalui *debt to capital assets ratio*, prinsipal akan mengidentifikasi apakah agen menggunakan utang untuk kepentingan diluar organisasi. Jika nilai *debt to capital assets ratio* terlalu tinggi dan tidak dapat dijelaskan secara rasional, mengindikasikan bahwa agen mungkin mengambil risiko berlebihan dalam menggunakan utang. Hal ini akan memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah daerah dalam melunasi semua utangnya.

Prinsipal akan meminta agen untuk menjamin utangnya dengan aset modal yang dimiliki organisasi. Jika agen tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka utang akan berisiko tinggi dan berpotensi merugikan. Kondisi tersebut mengakibatkan agen mengalami tekanan. Untuk menunjukkan kondisi keuangan pemerintah daerah baik, agen akan melakukan tindakan apapun termasuk melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan. Semakin tinggi nilai *debt to capital assets*

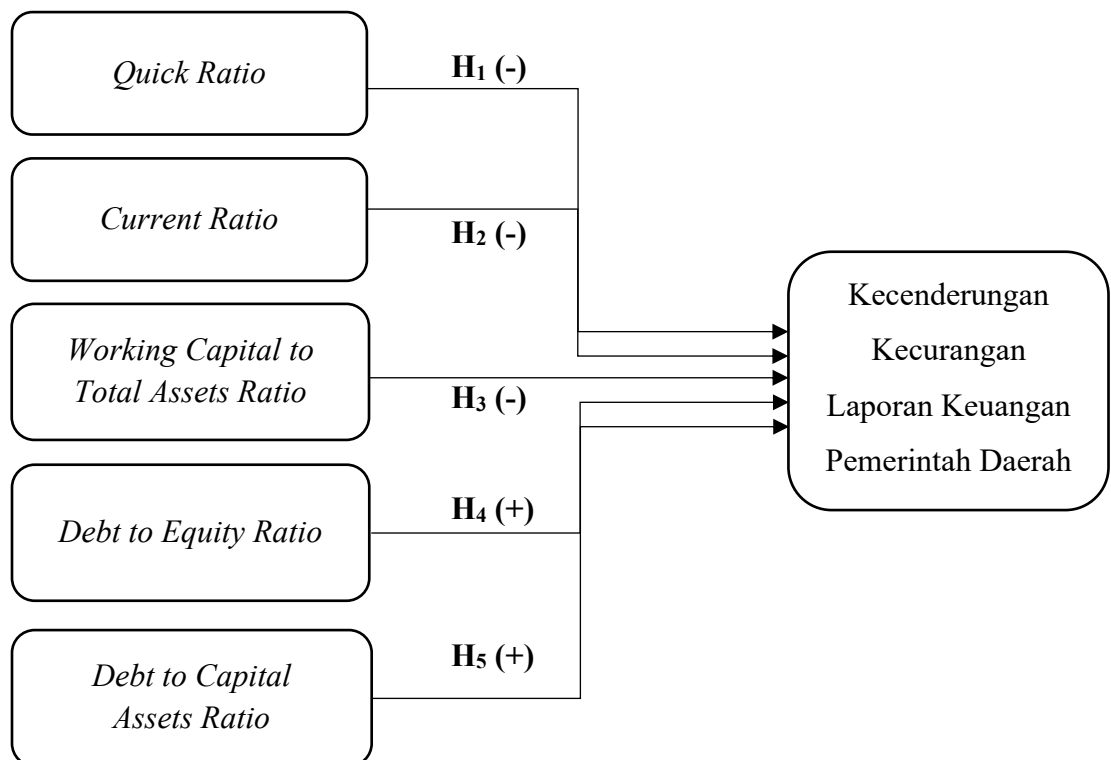
ratio, maka potensi terhadap kecurangan laporan keuangan juga semakin tinggi (Ardhiansyah et al., 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *debt to total assets ratio* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Yaramah & Hidayat, 2022; Firdausya & Parasetya, 2021; Wijaya et al., 2021; Christian & Eddy, 2020; Ardhiansyah et al., 2019; Milasari & Ratmono, 2019; Ramadhan & Laksito, 2019; Arifin & Prasetyo, 2018; Widyanti & Nuryatno, 2018). Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai *debt to total assets ratio*, semakin besar kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan. *Debt to capital assets ratio* yang tinggi dapat menciptakan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Agen mungkin merasa tertekan untuk mempertahankan kondisi keuangan yang baik sehingga terdorong untuk melakukan tindakan kecurangan. Sementara prinsipal menginginkan informasi keuangan yang akurat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik hipotesis:

H₅: *Debt to capital assets ratio* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan pengembangan hipotesis, adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 2.1, penelitian ini akan menguji pengaruh *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

3.1.1 Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh BPK.

3.1.2 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang didasari oleh kriteria yang telah ditentukan. Kriteria atas pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh BPK, memiliki empat komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, memuat temuan audit atas permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, memiliki nilai total aset lebih dari Rp 3 triliun, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut.

Pemilihan kriteria total aset pemerintah daerah kabupaten atau kota lebih dari 3 triliun didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu kabupaten atau kota dengan total aset lebih dari Rp 3 triliun umumnya memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi, baik itu berasal dari pajak daerah, retribusi, maupun transfer dana dari pemerintah pusat. Entitas dengan nilai total aset besar dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola aset dan utang. Entitas dengan nilai total aset yang besar menjadi lebih fokus dalam memperhatikan pengelolaan keuangan yang efektif atau kemungkinan masalah yang dihadapi.

Pemilihan kriteria laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu opini WTP selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi dan stabilitas kinerja keuangan selama periode tersebut.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek ataupun subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan menggambarkan keadaan sebenarnya dari populasi. Berdasarkan pemilihan sampel, maka sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh BPK, memiliki empat komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, memuat temuan audit atas permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, memiliki nilai total aset lebih dari Rp 3 triliun, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang meliputi *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio*. Berikut adalah penjelasan dari variabel penelitian yang digunakan:

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah ini menggunakan jumlah temuan audit negatif. Temuan audit ini memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (Alfiani et al., 2017). Semakin tinggi (banyak) temuan audit negatif maka penyimpangan yang terjadi dapat mengindikasikan adanya kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

3.3.2 Variabel Independen

1. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan menggunakan aset lancar dikurangi dengan persediaan. *Quick ratio* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

2. *Current Ratio*

Current ratio merupakan rasio keuangan yang mengukur likuiditas pemerintah daerah dengan membandingkan aktiva lancar yang dimiliki terhadap utang lancar. *Current ratio* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

3. *Working Capital to Total Assets Ratio*

Working capital to total assets ratio merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kinerja dari modal yang diperoleh dari modal sendiri dan digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintah daerah. *Working capital to total assets ratio* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Working Capital to Total Assets Ratio}}{= \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}}$$

4. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utang dengan menggunakan modal atau ekuitas. *Debt to equity ratio* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

5. *Debt to Capital Assets Ratio*

Debt to capital assets ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah menggunakan atau memanfaatkan utang dalam membiayai kekayaan atau asset yang dimiliki. *Debt to capital assets ratio* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Capital Assets Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk pengolahan data, analisis pada penelitian ini dibantu dengan program IBM SPSS Statistik versi 25. Dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi suatu data pada variabel dependen dan variabel independen (Ansori & Fajri, 2018). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ketepatan dalam estimasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan dari model regresi yang diajukan dalam penelitian. Komponen-komponen dalam uji asumsi klasik yaitu terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Jika data yang digunakan terdistribusi normal maka data tersebut dianggap baik. Uji normalitas ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Suatu data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Hermawati et al., 2021).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi dianggap baik apabila diantara variabel independen satu dengan yang lain tidak terjadi korelasi (Yaramah & Hidayat, 2022). Untuk mencari multikolinearitas dapat dilihat dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai *tolerance* menunjukkan angka lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka penelitian bebas dari multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Metode glejser merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas terhadap variabel independen. Model akan dianggap baik apabila tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk bebas dari heteroskedastisitas dapat dilihat dari semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Zahriyah et al., 2021).

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, pengaruh *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio* terhadap

kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah akan dijabarkan sebagai berikut:

$$FSF = b_0 + b_1(QR) + b_2(CR) + b_3(WCTA) + b_4(DTE) + b_5(DTA) + \varepsilon$$

Penjelasan:

FSF = variabel dependen (kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah). Variabel ini menggunakan skala interval dimana semakin tinggi (banyak) temuan audit negatif atas permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (ketidakpatuhan) maka penyimpangan yang terjadi dapat mengindikasikan kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan.

b_0 = konstanta

b_1 = koefisien regresi variabel *quick ratio*

QR = *quick ratio*

b_2 = koefisien regresi variabel *current ratio*

CR = *current ratio*

b_3 = koefisien regresi variabel *working capital to total assets ratio*

WCTA = *working capital to total assets ratio*

b_4 = koefisien regresi untuk variabel *debt to equity ratio*

DTE = *debt to equity ratio*

b_5 = koefisien regresi untuk variabel *debt to capital assets ratio*

DTA = *debt to capital assets ratio*

ε = error

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen (Widarjono, 2018). Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai $R^2 = 0$, menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai nilai R^2 mendekati nol, menunjukkan semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.5 Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan model antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dapat dilihat dari nilai *F-test*. Nilai F pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi F kurang dari atau sama dengan 0,05 maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi ketentuan *goodness of fit model* (Anggraeni, 2018).

3.4.6 Uji T

Uji T merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai *probability value* (*p-value*) menunjukkan kurang dari atau sama dengan 0,05 (Sipahutar & Sutaryo, 2017).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap variabel dependen yaitu kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel independen yang terdiri dari *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio*. Pengukuran kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah ini menggunakan jumlah temuan audit negatif yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 395 sampel.

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel tersebut didasari oleh kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel meliputi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh BPK, memiliki empat komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, memuat temuan audit negatif atas permasalahan kelemahan

sistem pengendalian internal (SPI) dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, memiliki nilai total aset lebih dari Rp 3 triliun, serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut.

Pemilihan kriteria total aset pemerintah daerah kabupaten atau kota lebih dari 3 triliun didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu kabupaten atau kota dengan total aset lebih dari Rp 3 triliun umumnya memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi, baik itu berasal dari pajak daerah, retribusi, maupun transfer dana dari pemerintah pusat. Entitas dengan nilai total aset besar dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola aset dan utang. Entitas dengan nilai total aset yang besar menjadi lebih fokus dalam memperhatikan pengelolaan keuangan yang efektif atau kemungkinan masalah yang dihadapi.

Pemilihan kriteria laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu opini WTP selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi dan stabilitas kinerja keuangan selama periode tersebut. Kriteria pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022 yang sudah diaudit oleh BPK	2.710
2	LKPD Kabupaten/Kota yang memiliki nilai total aset lebih dari Rp 3 triliun tahun anggaran 2018-2022	470
3	LKPD Kabupaten/Kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut	395
4	Data <i>Outlier</i>	(18)
Total Sampel Penelitian		377

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data pada variabel dependen dan variabel independen yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ansori & Fajri, 2018). Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait dengan distribusi data sampel tersebut. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
<i>Quick Ratio</i>	395	0,04626	201,15659	14,6760362	20,04056386
<i>Current Ratio</i>	395	0,17173	227,47375	16,4738274	22,17350203
<i>Working Capital to Total Assets Ratio</i>	395	-0,06880	0,26101	0,0630960	0,04174254
<i>Debt to Equity Ratio</i>	395	0,00051	0,21615	0,0118362	0,01619416
<i>Debt to Capital Assets Ratio</i>	395	0,00067	0,20499	0,0138100	0,01774768
Kecenderungan Kecurangan LKPD	395	3	25	11,99	4,573

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.2, ditunjukkan bahwa:

1. Nilai minimum *quick ratio* sebesar 0,04626 dimiliki oleh Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2018. Nilai maksimum *quick ratio* sebesar 201,15659 dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Nilai rata-rata *quick ratio* sebesar 14,6760362 dan standar deviasi sebesar 20,04056386.
2. Nilai minimum *current ratio* sebesar 0,17173 dimiliki oleh Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2018. Nilai maksimum *current ratio* sebesar 227,47375 dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Nilai rata-rata *current ratio* sebesar 16,4738274 dan standar deviasi sebesar 22,17350203.

3. Nilai minimum *working capital to total assets ratio* sebesar -0,06880 dimiliki oleh Kabupaten Mimika pada tahun 2020. Nilai maksimum *working capital to total assets ratio* sebesar 0,26101 dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022. Nilai rata-rata *working capital to total assets ratio* sebesar 0,0630960 dan standar deviasi sebesar 0,04174254.
4. Nilai minimum *debt to equity ratio* sebesar 0,00051 dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Nilai maksimum *debt to equity ratio* sebesar 0,21615 dimiliki oleh Kabupaten Mimika pada tahun 2020. Nilai rata-rata *debt to equity ratio* sebesar 0,0118362 dan standar deviasi sebesar 0,01619416.
5. Nilai minimum *debt to capital assets ratio* sebesar 0,00067 dimiliki oleh Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Nilai maksimum *debt to capital assets ratio* sebesar 0,20499 dimiliki oleh Kabupaten Mimika pada tahun 2020. Nilai rata-rata *debt to capital assets ratio* sebesar 0,0138100 dan standar deviasi sebesar 0,01774768.
6. Nilai minimum kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 3 dimiliki oleh Kabupaten Demak pada tahun 2021. Nilai maksimum sebesar 25 dimiliki oleh Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2018, Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021, Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022. Nilai rata-rata kecenderungan kecurangan laporan keuangan sebesar 11,99 dan standar deviasi sebesar 4,573.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ketepatan dalam estimasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan dari model regresi yang diajukan dalam penelitian.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Jika data yang digunakan terdistribusi normal maka data tersebut dianggap baik. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Hermawati et al., 2021). Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
n	395
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,002

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil pengujian normalitas dengan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan data tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga model regresi tersebut belum layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Agar data dapat terdistribusi normal, maka diperlukan eliminasi data *outlier*. *Outlier* merupakan nilai ekstrim yang harus di eliminasi agar data tersebut dapat terdistribusi normal. Data *outlier* memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh (ekstrim) dari pengamatan lainnya (Dewi et al., 2016).

Metode eliminasi *outlier* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *outlier mahalanobis* dan transformasi yang digunakan menggunakan logaritma natural. Data *outlier* akan dihapus dari sampel penelitian agar menghasilkan normalitas yang lebih baik sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Setelah menghapus data *outlier* maka jumlah sampel penelitian akan berkurang. Hal ini terjadi karena sampel penelitian yang berjumlah 395 belum terdistribusi normal sehingga setelah dilakukan pengujian *outlier mahalanobis* menghasilkan 18 data *outlier*. Sampel penelitian yang layak digunakan untuk analisis selanjutnya sebanyak 377. Berikut disajikan Tabel 4.4 yang merupakan hasil uji normalitas setelah *outlier mahalanobis*.

Tabel 4.4

Uji Normalitas

Setelah Eliminasi *Outlier* dan Transformasi Logaritma Natural

	Unstandardized Residual
n	377
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, setelah di *outlier mahalanobis* dihasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan data terdistribusi normal dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Modal regresi dianggap baik apabila diantara variabel independen satu dengan yang lain tidak terjadi korelasi (Yaramah & Hidayat, 2022). Untuk mencari multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai *tolerance* menunjukkan angka lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka penelitian bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat dilihat di Tabel 4.5.

Tabel 4.5

Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF
<i>Quick Ratio</i>	0,927	1,079
<i>Current Ratio</i>	0,953	1,050
<i>Working Capital to Total Assets Ratio</i>	0,574	1,743
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,560	1,787
<i>Debt to Capital Assets Ratio</i>	0,524	1,910

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil dari analisis uji multikolinearitas menunjukkan bahwa pada variabel *quick ratio* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,927 dan nilai VIF sebesar 1,079. Variabel *current ratio* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,953 dan nilai VIF sebesar 1,050. Variabel *working capital to total assets ratio* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,574 dan nilai VIF sebesar 1,743. Variabel *debt to equity ratio* memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,560 dan nilai VIF sebesar 1,787. Variabel rasio utang terhadap aset modal memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,524 dan nilai VIF sebesar 1,910.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari kelima variabel (*quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio*) telah memenuhi prasyarat yaitu lebih dari 0,10. Sedangkan nilai VIF (*Variance Inflation*

Factor) telah memenuhi prasyarat yaitu kurang dari 10. Jadi, dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi permasalahan pada multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, metode glejser merupakan salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas terhadap variabel independen. Model akan dianggap baik apabila tidak mengalami heteroskedastisitas. Untuk bebas dari heteroskedastisitas dapat dilihat dari semua variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Zahriyah et al., 2021). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat di Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
<i>Quick Ratio</i>	0,922
<i>Current Ratio</i>	0,901
<i>Working Capital to Total Assets Ratio</i>	0,489
<i>Debt to Equity Ratio</i>	0,762
<i>Debt to Capital Assets Ratio</i>	0,823

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil dari analisis uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel independen pada uji glejser tersebut menunjukkan lebih dari 0,05. Pada variabel *quick ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,922. Variabel *current ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,901. Variabel *working capital to total assets ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,489. Variabel *debt to equity ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,762. Variabel *debt to capital assets ratio* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,823. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian pada semua variabel independen menunjukkan tidak terjadi permasalahan pada heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Apabila nilai R^2 mendekati satu, menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari pengujian koefisien determinasi pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7

Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,326	0,106	0,094

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7, hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 atau 9,4 persen sedangkan sisanya sebesar 90,6 persen dijelaskan di luar faktor variabel independen lainnya yang memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemungkinan adanya nilai *varians error* yang besar mengakibatkan nilai *Adjusted R Square* dalam model regresi linear ini kecil. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 atau 9,4 persen tergolong kecil sehingga belum menunjukkan adanya indikasi atau kecenderungan kecurangan. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,094 atau 9,4 persen menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen masih tergolong lemah. Meskipun demikian, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan interpretasi bahwa masih adanya faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan.

4.5 Uji F

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan model antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dapat dilihat dari nilai F-test. Nilai F pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi F kurang dari atau sama dengan 0,05 maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi ketentuan *goodness of fit model* (Anggraeni, 2018). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Uji F

ANOVA		
Model	F	Sig.
Regression	8,809	0,000

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.8, hasil dari uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga memenuhi ketentuan *goodness of fit model*.

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, pengaruh *quick ratio*, *current ratio*, *working capital to total assets ratio*, *debt to equity ratio*, dan *debt to capital assets ratio* terhadap kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9

Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Jenis Variabel	Prediksi	Sesudah Menghilangkan <i>Outlier</i> (n=377)			Keterangan
			T-stat	B	<i>p-value</i>	
QR	Independen	-	-3,335	-0,500	0,001*	H ₁ didukung
CR	Independen	-	3,094	0,523	0,002* ^Δ	H ₂ tidak didukung
WCTA	Independen	-	-2,693	-0,566	0,007*	H ₃ didukung
DTE	Independen	+	0,648	0,098	0,517	H ₄ tidak didukung
DTA	Independen	+	0,109	0,016	0,913	H ₅ tidak didukung
			Adjusted R ² : 0,094			
			F : 8,809			
			Signifikansi : 0,000			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

*nilai signifikansi 0,05

^Δkoefisien regresi memiliki arah yang berlawanan dengan hipotesis penelitian

Legend: yang bertanda (*) memiliki nilai *p-value* kurang dari 0,05. Bertanda (^Δ) koefisien regresi memiliki arah yang berlawanan dengan hipotesis penelitian. QR=*quick ratio*, CR=*current ratio*, WCTA=*working capital to total assets ratio*, DTE=*debt to equity ratio*, DTA=*debt to capital assets ratio*.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh *Quick Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *quick ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi -0,500 (negatif). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai *quick ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil dari pengujian ini mendukung hipotesis pertama (H_1).

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *quick ratio* tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya (Wijaya et al., 2021). Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak perlu merekayasa laporan keuangan untuk menutupi kekurangan kasnya karena dinilai mampu menjaga likuiditas dengan baik melalui kecepatan membayar kewajibannya yang diukur dengan nilai *quick ratio* yang tinggi. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kecukupan likuiditas lebih mudah membayarkan utangnya secara tepat waktu. Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga menurunkan keterlibatan dalam tindakan kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

Nilai *quick ratio* yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset maupun utang jangka pendek secara efektif. Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan dalam pengelolaan aset maupun utang jangka pendek untuk mencegah potensi adanya kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah mampu menjaga kecukupan likuiditas.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan & Laksito (2019) dan Arifin & Prasetyo (2018) mendukung penelitian ini yang menunjukkan *quick ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *quick ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Arifin & Prasetyo, 2018). Jika nilai *quick ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor pengurang risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban dengan jujur dan transparan.

4.7.2 Pengaruh *Current Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi 0,523 (positif). Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai *current ratio*, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil dari pengujian ini tidak mendukung hipotesis kedua (H₂). Hal ini dikarenakan koefisien regresi berlawanan arah dengan hipotesis.

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *current ratio* tinggi dapat menyebabkan tindakan kecenderungan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki nilai *current ratio* yang cukup yaitu 200% atau 2 kali, maka pemerintah daerah kabupaten/kota mampu menjaga likuiditas organisasi sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Namun, ketika nilai *current ratio* pemerintah daerah kabupaten/kota terlalu tinggi yaitu lebih dari 200% maka dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota kemungkinan tidak mengoptimalkan penggunaan aset lancarnya dengan baik (Dewi, 2017).

Kemungkinan bahwa pemerintah daerah melakukan kecenderungan kecurangan melalui tindakan manipulasi terhadap *current ratio*. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya tindakan manipulasi dalam neraca, seperti peningkatan yang tidak wajar pada persediaan atau piutang yang dikarenakan adanya *overstatement* pada akun persediaan atau piutang (Pribadi et al., 2018).

Menurut Wijaya et al. (2021), adanya indikasi manipulasi pada nilai piutang usaha dapat memengaruhi *current ratio*. Kemungkinan tindakan manipulasi terhadap *current ratio* dapat dilakukan melalui tindakan manipulasi pada nilai persediaan, yaitu tidak mencatat nilai persediaan yang telah usang. Tidak adanya pencatatan atas nilai persediaan yang usang dapat menyebabkan nilai persediaan membengkak sehingga manipulasi terhadap piutang usaha dapat berdampak pada nilai aset lancar.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prajanto & Pratiwi (2016) mendukung penelitian ini yang menunjukkan *current ratio* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya et al (2021), Ardhiansyah et al (2019), Ramadhan & Laksito, (2019), Arifin & Prasetyo (2018) yang menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *current ratio*, semakin tinggi kemungkinan

terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan (Prajanto & Pratiwi, 2016). Hal ini menjelaskan jika nilai *current ratio* terlalu tinggi mengindikasikan adanya kemungkinan tindakan manipulasi dalam neraca, seperti peningkatan yang tidak wajar pada persediaan atau piutang yang dikarenakan adanya *overstatement* pada akun piutang maupun persediaan.

4.7.3 Pengaruh *Working Capital to Total Assets Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien regresi -0,566 (negatif). Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai *working capital to total assets ratio* keterlibatan dalam kecenderungan kecurangan laporan keuangan semakin rendah. Hasil dari pengujian ini mendukung hipotesis ketiga (H₃).

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *working capital to total assets ratio* tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut memiliki *margin of safety* yang tinggi untuk menutupi utang jangka pendeknya (Ramadhan & Laksito, 2019). *Margin of safety* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya organisasi dengan baik untuk melunasi

utang. Nilai *working capital to total assets ratio* yang tinggi menunjukkan pemerintah tidak mengabaikan modal kerja yang diperlukan untuk menghasilkan likuiditas yang cukup dalam memenuhi utang jangka pendek.

Dalam menjaga *margin of safety* tetap tinggi pemerintah perlu mempertahankan persediaan secara optimal untuk menghindari adanya pemborosan. Pemerintah daerah perlu memastikan utang jangka pendek dapat dikelola dengan baik dalam menghindari risiko gagal bayar. Pemerintah daerah dapat mencari sumber pembiayaan yang seimbang untuk mengurangi ketergantungan utang jangka pendek.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christian & Eddy (2020), Ramadhan & Laksito (2019), Arifin & Prasetyo (2018) mendukung penelitian ini yang menunjukkan *working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai *working capital to total assets ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan. Jika nilai *working capital to total assets ratio* tinggi dapat berperan sebagai faktor pengurang risiko kecenderungan kecurangan laporan keuangan karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancar dengan menggunakan modal kerja yang memadai.

4.7.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,517 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi 0,098 (positif). Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai *debt to equity ratio* tidak menyebabkan kemungkinan untuk melakukan tindakan kecurangan (Widyanti & Nuryatno, 2018).

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *debt to equity ratio* tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya *debt to equity ratio* tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah (Putri & Nuryatno, 2023).

Hasil penelitian tidak mendukung teori agensi dikarenakan kemungkinan *debt to equity ratio* tidak memengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah dapat melunasi utangnya dan memenuhi kebutuhan organisasinya dengan modal (ekuitas) sendiri tanpa menggunakan utang (Haqq & Budiwitjaksono, 2020).

Di sisi lain, semakin tinggi nilai *debt to equity ratio*, semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga

dapat mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah (Khamainy et al., 2022). Hal tersebut menunjukkan ketika kreditor memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah, kreditor tidak merasa khawatir terhadap pengembalian pinjaman.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khamainy et al (2022), Wijaya et al (2021), Widhayanti & Utomo (2020), Ramadhan & Laksito (2019), Widyanti & Nuryatno (2018) mendukung penelitian ini yang menunjukkan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yaramah & Hidayat (2022), Firdausya & Parasetya (2021), Arifin & Prasetyo (2018) yang menunjukkan *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya *debt to equity ratio* tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

4.7.5 Pengaruh *Debt to Capital Assets Ratio* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *debt to capital assets ratio* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,913 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien regresi 0,016 (positif). Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai *debt to capital assets ratio* tinggi tidak memengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan kecurangan laporan keuangan (Koharudin & Januarti, 2021).

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *debt to capital assets ratio* tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan (Alvionika & Meiranto, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya *debt to capital assets ratio* tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari et al., 2022).

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi dikarenakan kemungkinan pemerintah daerah memprioritaskan pembiayaan dari sumber internal (aset modal) untuk mendukung program pemerintah dan mempertahankan nilai utang rendah (Sholikatun & Makaryanawati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan organisasinya melalui efektivitas pengelolaan aset modal dibandingkan dengan penggunaan utang

sehingga membantu mengurangi risiko kecenderungan kecurangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam pengelolaan aset modal yang baik sehingga kondisi ekonomi lebih stabil dan mampu mengurangi tekanan untuk melakukan kecenderungan kecurangan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al (2022), Koharudin & Januarti (2021), Widhayanti & Utomo (2020), Haqq & Budiwitjaksono (2020), Novitasari & Chariri (2018), Prajanto & Pratiwi (2016) mendukung penelitian ini yang menunjukkan *debt to capital assets ratio* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yaramah & Hidayat (2022), Firdausya & Parasetya (2021) Wijaya et al (2021), Christian & Eddy (2020), Ardhiansyah et al (2019), Milasari & Ratmono (2019), Ramadhan & Laksito (2019), Arifin & Prasetyo (2018), Widyanti & Nuryatno (2018) yang menunjukkan bahwa *debt to total assets ratio* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rasio terhadap aset modal tinggi tidak memengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan kecenderungan kecurangan laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Quick ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *quick ratio* tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajibannya dan lebih mudah membayarkan utangnya secara tepat waktu. Pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga menurunkan keterlibatan dalam tindakan kecurangan laporan keuangan. Semakin tinggi nilai *quick ratio*, semakin rendah kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan.
2. *Current ratio* berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *current ratio* tinggi dapat menyebabkan tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika nilai *current ratio* pemerintah daerah kabupaten/kota terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut kemungkinan tidak mengoptimalkan penggunaan aset lancarnya dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan

manipulasi dalam neraca, seperti peningkatan yang tidak wajar pada persediaan atau piutang yang dikarenakan adanya *overstatement* pada akun persediaan atau piutang. Semakin tinggi nilai *current ratio*, semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan dalam laporan keuangan.

3. *Working capital to total assets ratio* berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *working capital to total assets ratio* tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki *margin of safety* yang tinggi untuk menutupi utang jangka pendeknya. *Margin of safety* yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya organisasi dengan baik dan tidak mengabaikan modal kerja yang diperlukan untuk menghasilkan likuiditas yang cukup dalam memenuhi utang jangka pendek. Semakin tinggi nilai *working capital to total assets ratio* keterlibatan dalam kecenderungan kecurangan laporan keuangan semakin rendah.
4. *Debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *debt to equity ratio* tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya *debt to equity ratio* tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, kemungkinan pemerintah daerah dapat

melunasi utangnya dan memenuhi kebutuhan organisasinya dengan modal (ekuitas) sendiri tanpa menggunakan utang.

5. *Debt to capital assets ratio* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai *debt to capital assets ratio* tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya *debt to capital assets ratio* tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, kemungkinan pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan organisasinya melalui efektivitas pengelolaan aset modal dibandingkan dengan penggunaan utang sehingga membantu mengurangi risiko kecenderungan kecurangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat memengaruhi hasil akhir penelitian. Berikut adalah beberapa keterbatasan penelitian:

1. Tidak semua pemerintah kabupaten/kota mempublikasikan secara lengkap laporan keuangan daerahnya, sehingga perlu melakukan konfirmasi kepada BPK RI terkait permohonan informasi laporan keuangan secara lengkap.
2. Pada laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2020 sampai dengan 2022, jumlah temuan audit atas permasalahan SPI

dan ketidakpatuhan tidak dijabarkan satu per satu melainkan digabungkan menjadi satu dan hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya (tahun 2018 dan 2019).

3. Pada beberapa kabupaten/kota, data neraca masih merupakan angka sementara.
4. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Adjusted R Square* kecil dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen masih tergolong lemah. Meskipun demikian, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan interpretasi kepada pemerintah daerah bahwa terdapat faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil, kesimpulan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Saran Penelitian
 - a. Untuk peneliti di masa datang dapat menambahkan sampel laporan keuangan pemerintah daerah atau jangka waktu yang lebih lama misal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, sehingga berdasarkan hasil penelitian dapat tergambar secara lebih mendalam terkait dengan kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Berkaitan dengan hasil penelitian yang menunjukkan *quick ratio* dan *working capital to total assets ratio* memiliki pengaruh negatif

terhadap kecenderungan kecurangan, maka peneliti di masa depan dapat menambahkan variabel rasio keuangan daerah, misalnya rasio efisiensi biaya, rasio penerimaan daerah, atau variabel moderasi maupun variabel kontrol yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Saran Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pemerintah daerah tetap fokus dan memastikan laporan keuangan yang disusun telah mematuhi standar akuntansi pemerintah. Pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga tidak terlalu bergantung dalam penggunaan utang. Apabila pemerintah daerah melakukan pinjaman terhadap kreditor, pemerintah diharuskan untuk melakukan pengawasan yang ketat guna mengurangi kemungkinan terjadinya kecenderungan kecurangan.
- b. Pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi perbaikan langkah selanjutnya sehingga pemerintah daerah dapat meminimalisir adanya temuan audit negatif yang dapat merugikan daerah.
- c. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah serta mengimplementasikan kebijakan anti-*fraud* untuk meminimalisir kemungkinan adanya tindakan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, K., Purba, D. M., & Fauzia, Q. (2019). The impact of liquidity ratio, leverage ratio, company size and audit quality on going concern audit opinion. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(1), 69–82.
- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*. Copyright 2022 by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Akmal, T. M. N., Junita, A., & Meutia, T. (2023). Determinan kecenderungan kecurangan akuntansi (studi pada skpk di kota langsa). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1), 63–73.
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah temuan audit atas sistem pengendalian intern dan jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap opini laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 12–18.
- Alvionika, P., & Meiranto, W. (2021). Analisis kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan fraud diamond theory (study empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun 2015-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–12.
- Anggraeni, R. (2018). Analisis determinan nilai perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 15(2), 91–99.
- Ansori, M., & Fajri, S. (2018). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan rasio keuangan dengan umur perusahaan dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(2), 141–159.
- Apriliana, S., & Agustina, L. (2017). The analysis of fraudulent financial reporting determinant through fraud pentagon approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165.
- Ardhiansyah, A. S., Kusuma, H., & Sa'dani, O. S. (2019). Analisa pengaruh kinerja keuangan dan corporate governance terhadap kemungkinan terjadinya financial statement fraud. *Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit*, 06(02), 149–165.
- Arifin, J. (2020). *Fraud, Mendeteksi dan Mengatasinya (Pendekatan Akuntansi Forensik & Audit Investigatif)* (Vol. 1). Yogyakarta: Ekonisia.
- Arifin, M. B., & Prasetyo, A. B. (2018). Factors influencing in the fraudulent financial reporting. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(2), 99–113.

- Atmaja, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis audit bpk ri terkait kelemahan spi, temuan ketidakpatuhan dan kerugian negara. *Integritas*, 1(1), 81–110.
- Christian, N., & Eddy. (2020). The effect of financial ratio's in detecting fraudulent company listed on the indonesia stock exchange. *International Journal of Economics and Management Studies*, 7(4), 105–115.
- Ciptawan, & Frandjaja, B. (2021). The impact of current ratio and gross profit margin towards financial distress in technology sector companies listed in indonesia stock exchange for period 2016-2020. *Journal of Industrial Engineering and Management Research*, 3(1), 197–214.
- Dewi, E. T., Agoestanto, A., & Sunarmi. (2016). Metode least trimmed square (lts) dan mm-estimation untuk mengestimasi parameter regresi ketika terdapat outlier. *Unnes Journal of Mathematics*, 5(1), 47–54.
- Dewi, M. (2017). Penggunaan analisis rasio likuiditas dan solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan di pt. aneka tambang tbk. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 102–112.
- Elsye, R., Rachmat, B., & Muhidin, U. (2018). *Pemeriksaan Keuangan Daerah* (Vol. 1). Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
- Farizi, Z. Al, Tarmizi, T., & Andriana, S. (2020). Fraud diamond terhadap financial statement fraud. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 71–82.
- Firdausya, S., & Parasetya, M. T. (2021). Analisis rasio keuangan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–11.
- Haqq, A. P. N. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2020). Fraud pentagon for detecting financial statement fraud. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 22(3), 319–332.
- Herianti, E., Suryani, A., & Marundha, A. (2023). *Audit Kecurangan Laporan Keuangan* (D. Winarni, Ed.; Vol. 1). Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Hermawati, R., Firdaus, A., Suryani, N. L., Rozi, A., & Erlangga, H. (2021). Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada bank bjb di cabang balaraja banten. *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*, 4(3), 319–331.
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (F. Fabri, Ed.; Vol. 1). Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Ismail, T., & Enceng. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4th ed.). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Khamainy, A. H., Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Detecting financial statement fraud through new fraud diamond model: the case of indonesia. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 925–941.
- Koharudin, A., & Januarti, I. (2021). Lack of financial reporting using crowe's fraud pentagon theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(2), 148–157.
- Kusmayadi, D., Abdullah, Y., & Firmansyah, I. (2021). *Kinerja Perusahaan dengan Pendekatan Rasio-Rasio Keuangan* (P. Lazuardi, F. Ilyas, & W. Aziz, Eds.). Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari.
- Lumaku, A. M., & Nindiasari, A. D. (2023). Analisis rasio keuangan pada laporan realisasi anggaran dinas kebudayaan kota yogyakarta tahun 2017-2021. *Proceeding National Conference on Accounting & Finance*, 5, 207–211.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Exploration opportunities to commit fraud in local governments, indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1–16.
- Milasari, W., & Ratmono, D. (2019). Pendeteksian fraudulent financial reporting (ffr) menggunakan rasio-rasio keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(1), 1–10.
- Novitasari, A. R., & Chariri, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi financial statement fraud dalam perspektif fraud pentagon. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–15.
- Pedneault, S., Rudewicz, F., Sheetz, M., & Silverstone, H. (2012). *Forensic Accounting and Fraud Investigation* (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Prajanto, A., & Pratiwi, R. D. (2016). The impact of corporate cultures and financial ratios on the fraudulent financial reporting. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(1), 39–52.

- Pribadi, A. R., Suranta, E., & Midiastuty, P. P. (2018). Rasio-rasio keuangan dalam memprediksi kecurangan. *Ultima Accounting*, 10(1), 66–76.
- Putri, N. A., & Nuryatno, M. (2023). Pengaruh rasio keuangan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan: perusahaan consumer non-cyclicals di bursa efek indonesia tahun 2018-2021. *Akurasi*, 5(3), 299–314.
- Rahayu. (2020). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo (Beragama).
- Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris*. Sleman: Deepublish.
- Ramadhan, I., & Laksito, H. (2019). Peran rasio keuangan sebagai alat analisis untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4), 1–14.
- Restianti, T., & Agustina, L. (2018). The effect of financial ratios on financial distress conditions in sub industrial sector company. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 25–33.
- Reza, R., Jufrizen, J., & Rambe, M. F. (2023). Pengaruh return on asset, current ratio, dan debt to asset ratio terhadap firm value dengan firm size sebagai variabel moderating. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 576–598.
- Rustendi, T. (2018). *Pencegahan dan Pengungkapannya Dalam Perspektif Audit Internal*. Sleman: Mujahid Press.
- Sampurna, A. F., Pramono, A. J., Susanto, H., Lustrilanang, P., Qosasi, A., Yatun, I., Akbar, B., Aziz, H. A., & Tobing, D. L. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021* (E. dan P. P. K. N. Direktorat Utama Perencanaan, Ed.). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., & Raharja, S. (2022). The audit committee as moderating the effect of hexagon's fraud on fraudulent financial statements in mining companies listed on the indonesia stock exchange. *Cogent Business and Management*, 9(1), 1–23.
- Sari, P. B., & Dwilita, H. (2019). *Financial Management* (F. Ario & M. D. Nasution, Eds.; 1st ed.). Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Savitri, M. D., Hadi, M., Firmansyah, A., Hardiana, D., & Triyanto. (2015). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan.
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Nurchayati, Kusumastuti, R., Astuti, N., Febrianto, G. H., Sukma, P., Fitriana, A. I., Parju, Satrio, A. B., Hanani, T., Hakim, M. Z.,

- Jumiati, E., & Fauzan, R. (2023). *Analisa Laporan Keuangan* (R. Ristiyana, Ed.; Vol. 1). Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sholikatur, R., & Makaryanawati, M. (2021). Determinan kecurangan laporan keuangan (perspektif fraud hexagon theory). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(3), 328–350.
- Sipahutar, I. S., & Sutaryo. (2017). Faktor-faktor penentu implementasi e-government pemerintah daerah di indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1393–1408.
- Siswanto, E. (2021). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Dasar* (Vol. 1). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Tunggal, A. W. (2016). *Aspek-Aspek Audit Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Utami, W. B. (2017). Analysis of current ratio changes effect, asset ratio debt, total asset turnover, return on asset, and price earning ratio in predicting growth income by considering corporate size in the company joined in lq45 index year 2013-2016. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 1(1), 25–37.
- Wahyuningsih, E., Ade, R., & Nursida, N. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (studi pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi riau indonesia). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(1), 52–61.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widhayanti, M. D., & Utomo, D. C. (2020). Analisis penggunaan rasio keuangan dalam mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan (studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di bej tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–10.
- Widiyanti, M. (2014). Analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas pada pt. holcim indonesia, tbk dan pt. indocement tunggal prakarsa, tbk. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, 9(1), 31–44.
- Widyanti, T., & Nuryatno, M. (2018). Analisis rasio keuangan sebagai deteksi kecurangan laporan keuangan perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 72–80.
- Wijaya, J., Mulyaraqwani, S., Rinaningsih, & Budhijono, F. (2021). Rasio keuangan sebagai pendeteksi indikasi tindak kecurangan laporan keuangan. *Equity*, 24(1), 59–84.

- Yaramah, W., & Hidayat, I. (2022). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis rasio keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 191–202.
- Yatun, I., Pramono, A., Lustrilanang, P., Qosasi, A., Suryadnyana, N., Tobing, D., Susanto, H., & Saleh, H. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmono, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika Teknik dan Aplikasi dengan SPSS* (S. Widagdo, Ed.). Jember: Mandala Press.

Lampiran 1
Daftar Sampel Kabupaten dan Kota

No.	Kabupaten dan Kota
1	Kota Surabaya
2	Kota Bandung
3	Kota Semarang
4	Kota Tangerang Selatan
5	Kota Samarinda
6	Kabupaten Kutai Kartanegara
7	Kabupaten Sidoarjo
8	Kota Palembang
9	Kabupaten Tangerang
10	Kabupaten Badung
11	Kabupaten Bekasi
12	Kota Balikpapan
13	Kabupaten Bandung
14	Kabupaten Toraja Utara
15	Kota Depok
16	Kabupaten Bengkalis
17	Kabupaten Bojonegoro
18	Kota Bogor
19	Kabupaten Berau
20	Kota Tangerang
21	Kota Surakarta
22	Kabupaten Deli Serdang
23	Kota Pontianak
24	Kota Pekanbaru
25	Kota Padang
26	Kabupaten Malang
27	Kabupaten Tuban
28	Kabupaten Banyumas
29	Kota Malang
30	Kabupaten Paser
31	Kabupaten Pati
32	Kabupaten Jepara
33	Kota Denpasar
34	Kabupaten Siak
35	Kabupaten Gresik
36	Kabupaten Kutai Barat
37	Kabupaten Mojokerto

38	Kabupaten Rokan Hilir
39	Kota Banda Aceh
40	Kabupaten Merauke
41	Kota Banjarmasin
42	Kabupaten Mimika
43	Kabupaten Demak
44	Kabupaten Muara Enim
45	Kabupaten Lamongan
46	Kabupaten Teluk Bintuni
47	Kabupaten Nunukan
48	Kabupaten Malinau
49	Kabupaten Karawang
50	Kota Kendari
51	Kabupaten Pelalawan
52	Kabupaten Sukoharjo
53	Kabupaten Majalengka
54	Kabupaten Aceh Utara
55	Kota Bontang
56	Kabupaten Garut
57	Kabupaten Subang
58	Kabupaten Cilacap
59	Kabupaten Ketapang
60	Kabupaten Kebumen
61	Kabupaten Sleman
62	Kota Cilegon
63	Kabupaten Kediri
64	Kabupaten Sorong
65	Kabupaten Semarang
66	Kabupaten Banjarnegara
67	Kota Batam
68	Kabupaten Sukabumi
69	Kabupaten Kudus
70	Kabupaten Banyuwangi
71	Kabupaten Lebak
72	Kota Yogyakarta
73	Kabupaten Kampar
74	Kabupaten Madiun
75	Kabupaten Sintang
76	Kabupaten Banyuasin
77	Kabupaten Cirebon
78	Kabupaten Blitar
79	Kabupaten Klaten

Lampiran 2
Rekapitulasi Data LKPD Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Surabaya	2018	188.260.480.212	1.824.279.769.775	37.767.069.726.225	42.764.672.922.353	568.167.840.959	568.167.840.959	42.196.505.081.394
	2019	199.478.513.895	1.516.289.678.236	40.360.097.339.753	44.693.653.396.746	647.566.645.467	647.566.645.467	44.046.086.751.279
	2020	312.160.955.645	1.229.692.954.103	41.849.970.098.415	45.910.335.939.674	651.829.984.400	651.829.984.400	45.258.505.955.274
	2021	290.041.251.057	2.194.765.717.448	42.154.728.663.954	47.023.936.026.338	749.352.323.944	749.352.323.944	46.274.583.702.394
	2022	303.697.467.979	1.443.009.375.744	42.873.677.153.679	51.844.401.656.234	720.588.489.814	720.588.489.814	51.123.813.166.419
Pemerintah Kota Bandung	2018	84.755.613.418	867.302.020.807	39.816.740.737.210	42.615.425.497.527	299.711.259.935	299.711.259.935	42.315.714.237.593
	2019	74.609.516.688	653.041.624.469	40.347.240.043.749	43.525.674.870.159	208.491.087.428	208.491.087.428	43.317.183.782.731
	2020	99.891.505.316	955.218.995.350	40.165.990.122.683	43.801.722.081.590	168.495.879.278	168.495.879.278	43.633.226.202.312
	2021	123.767.172.007	1.218.817.120.993	40.205.893.828.145	43.728.314.285.726	169.540.346.441	169.540.346.441	43.558.773.939.286
	2022	180.040.390.216	1.254.591.595.412	42.548.412.967.892	46.024.442.498.224	160.262.001.466	160.262.001.466	45.864.180.496.758
Pemerintah Kota Semarang	2018	55.003.802.927	633.610.855.728	29.552.476.130.765	30.970.860.367.210	67.711.365.633	78.271.347.952	30.892.589.019.258
	2019	53.609.687.919	679.225.053.899	16.632.599.147.988	18.159.413.566.476	72.869.801.288	75.442.237.753	18.083.971.328.723
	2020	55.636.405.683	1.006.101.710.547	19.041.092.600.235	21.533.658.423.315	93.726.986.564	111.173.513.013	20.892.738.568.258
	2021	86.460.151.640	972.922.118.059	19.457.310.537.539	21.003.912.081.271	100.177.802.894	115.236.492.308	21.418.421.931.007
	2022	78.587.951.322	970.350.377.663	20.294.230.122.526	22.467.914.755.459	50.894.434.486	69.572.784.902	22.398.341.970.557
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2018	52.999.010.328	1.007.162.449.146	19.055.267.249.749	20.358.502.058.444	17.136.025.838	17.136.025.838	20.341.366.032.606
	2019	59.519.101.273	864.965.243.080	19.916.569.963.181	21.036.338.664.456	16.115.352.616	16.115.352.616	21.020.223.311.840
	2020	77.541.162.337	870.606.368.666	21.937.975.811.287	23.131.755.059.124	116.068.939.029	116.068.939.029	23.015.686.120.096
	2021	85.188.522.669	1.212.973.143.378	22.664.772.962.470	24.194.977.606.821	57.453.905.602	57.453.905.602	24.137.523.701.219
	2022	71.023.403.187	1.298.854.277.783	23.399.122.549.915	25.048.368.746.464	33.125.981.179	33.125.981.179	25.015.242.765.285

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Samarinda	2018	24.893.493.497	548.125.164.533	16.982.942.803.771	18.424.211.620.275	116.945.415.768	221.203.139.520	18.203.008.480.755
	2019	24.974.881.105	813.105.671.117	17.064.744.871.926	19.087.291.017.178	91.341.959.404	195.599.683.156	18.891.691.334.022
	2020	44.295.682.925	787.305.005.069	17.402.487.922.382	19.387.006.498.281	109.053.709.215	213.311.432.967	19.173.695.065.314
	2021	57.615.181.353	613.970.056.345	18.190.588.483.523	20.011.161.628.943	160.279.044.154	264.536.767.906	19.746.624.861.038
	2022	57.201.178.811	1.383.945.753.202	18.299.678.196.366	21.312.914.075.773	101.774.060.792	204.800.329.151	21.108.113.746.622
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2018	130.208.446.269	1.975.076.020.925	14.563.192.350.546	17.572.384.232.381	497.460.531.663	497.460.531.663	17.074.923.700.718
	2019	132.713.152.820	2.169.348.999.430	14.466.630.766.515	17.858.534.958.420	493.946.343.782	493.946.343.782	17.364.588.614.638
	2020	148.536.138.379	1.706.751.203.408	14.548.663.379.760	17.522.696.016.693	637.591.018.667	637.591.018.667	16.885.104.998.026
	2021	218.281.086.129	1.251.626.335.345	14.244.683.014.331	16.717.859.590.431	251.525.594.373	251.525.594.373	16.466.333.996.058
	2022	90.385.646.097	3.121.141.709.031	14.342.267.371.718	19.140.842.870.853	214.056.444.157	214.056.444.157	18.926.786.426.696
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2018	65.990.868.490	1.353.850.275.100	15.043.881.929.663	17.377.441.188.340	73.148.175.291	73.148.175.291	17.304.293.013.049
	2019	57.328.593.661	1.552.183.861.973	18.253.241.778.384	20.794.692.034.467	93.372.824.437	93.372.824.437	20.701.319.210.031
	2020	74.613.856.503	1.518.344.311.364	18.740.252.557.670	21.808.175.246.105	104.662.963.145	104.662.963.145	21.159.537.506.283
	2021	96.861.793.270	1.257.805.013.617	19.542.966.240.612	21.264.200.469.428	100.362.872.768	100.362.872.768	21.707.812.373.338
	2022	72.996.769.249	879.976.583.531	20.624.900.170.513	22.586.024.634.392	105.310.401.402	105.310.401.402	22.480.714.232.990
Pemerintah Kota Palembang	2018	56.277.555.660	519.458.169.417	12.496.295.686.158	14.360.384.701.026	332.813.159.182	332.813.159.182	14.360.384.701.026
	2019	48.675.816.342	308.761.659.384	11.523.675.156.232	16.278.370.872.549	308.618.179.180	308.618.179.180	16.278.370.872.549
	2020	59.630.513.501	412.255.799.870	13.663.235.904.311	18.451.655.914.300	282.937.244.844	282.937.244.844	18.168.718.669.457
	2021	68.179.057.884	639.976.547.485	14.543.531.343.133	16.621.842.119.342	363.372.801.890	363.372.801.890	16.258.469.317.452
	2022	48.818.687.860	830.197.743.376	14.824.671.547.923	17.241.865.732.403	250.371.042.306	305.567.600.115	16.936.298.132.288

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Tangerang	2018	327.543.115.812	1.408.085.249.568	11.573.019.189.019	14.356.043.519.847	69.812.067.707	69.990.976.144	14.286.052.543.704
	2019	144.729.374.358	1.078.688.706.887	14.492.561.292.373	16.954.547.220.337	64.967.983.642	65.103.201.225	16.889.444.019.112
	2020	187.717.297.246	1.154.709.485.204	14.710.449.155.644	17.002.402.776.044	28.102.517.778	28.263.840.028	16.974.138.936.016
	2021	128.044.978.299	1.279.360.044.199	15.313.342.757.035	17.698.402.172.818	34.183.600.535	34.287.673.786	17.664.114.499.033
	2022	188.465.363.654	1.549.926.552.831	16.806.320.846.737	19.517.781.303.109	28.810.371.018	28.918.611.935	19.488.862.691.175
Pemerintah Kabupaten Badung	2018	351.166.079.384	1.166.731.976.001	10.084.170.547.402	13.547.271.190.616	734.758.735.930	734.758.735.930	12.812.512.454.686
	2019	264.268.154.443	963.524.115.734	10.165.769.383.520	13.418.079.328.134	119.049.148.579	119.049.148.579	13.299.030.179.555
	2020	253.886.831.730	1.110.302.716.433	14.151.604.125.305	17.539.053.614.110	64.320.338.291	64.320.338.291	17.474.733.275.819
	2021	269.329.358.843	1.020.129.808.001	13.805.845.833.989	17.045.252.996.047	132.529.539.038	132.529.539.038	16.912.723.457.008
	2022	70.715.952.700	1.749.780.757.630	13.945.555.848.834	17.786.869.429.728	168.857.653.877	168.857.653.877	17.618.011.775.851
Pemerintah Kabupaten Bekasi	2018	51.367.745.326	1.396.665.110.101	9.766.345.365.121	12.486.837.156.655	49.934.766.029	49.934.766.029	12.436.902.390.625
	2019	59.921.926.604	1.601.510.993.457	10.137.710.678.408	13.071.854.740.463	63.605.945.571	63.605.945.571	13.008.248.794.892
	2020	84.385.865.192	1.287.842.653.899	10.472.138.184.353	13.595.842.526.520	256.106.140.295	256.106.140.295	13.339.736.386.225
	2021	125.846.817.839	1.658.011.920.795	10.946.832.275.145	13.956.594.924.950	77.783.202.515	77.783.202.515	13.878.811.722.435
	2022	72.217.644.239	1.299.580.163.707	11.422.260.900.515	14.155.013.070.462	47.636.660.562	47.636.660.562	14.107.376.409.899
Pemerintah Kota Balikpapan	2018	21.208.079.020	486.623.509.408	9.744.998.239.550	11.074.760.685.564	47.292.783.335	47.292.783.335	11.027.467.902.228
	2019	23.673.183.333	509.925.695.258	10.296.946.525.667	11.649.591.539.644	44.064.166.848	44.064.166.848	11.605.527.372.796
	2020	83.245.738.229	938.341.948.123	10.313.106.847.791	12.101.350.613.568	42.076.815.265	42.076.815.265	12.059.273.798.304
	2021	151.093.398.389	921.392.287.210	10.596.187.367.814	12.416.371.980.064	80.436.155.941	80.436.155.941	12.335.935.824.124
	2022	93.292.599.621	998.247.611.772	10.757.222.254.746	13.169.795.358.965	46.103.461.977	46.103.461.977	13.123.691.896.988

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Bandung	2018	61.627.095.017	1.002.480.317.507	8.927.448.121.345	10.429.388.051.100	73.618.485.195	73.618.485.195	10.355.769.565.905
	2019	59.484.121.350	1.008.448.654.708	9.725.797.476.992	11.263.980.756.266	88.014.539.056	88.014.539.056	11.175.966.217.211
	2020	90.363.858.276	956.295.781.728	9.956.556.372.846	11.796.177.481.818	93.293.562.607	93.293.562.607	11.702.883.919.211
	2021	148.720.118.538	1.274.337.153.850	10.195.717.645.825	12.340.924.893.408	95.861.406.725	95.861.406.725	12.245.063.486.683
	2022	117.916.005.776	987.703.243.949	10.612.153.290.896	12.626.285.656.502	108.758.644.279	108.758.644.279	12.517.527.012.223
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2018	9.191.340.847	56.740.465.581	10.257.882.472.264	10.330.362.154.780	28.354.818.302	40.804.065.651	10.289.558.089.129
	2019	6.510.918.967	70.788.797.714	8.886.211.399.330	8.991.160.332.426	10.226.162.668	10.226.162.668	8.980.934.169.758
	2020	7.016.115.999	29.859.641.757	8.897.072.063.573	8.962.941.129.991	36.698.204.659	36.698.204.659	8.926.242.925.331
	2021	6.820.344.317	41.467.060.468	8.996.649.456.549	9.081.496.477.447	34.992.235.939	34.992.235.939	9.046.504.241.508
	2022	14.169.645.986	70.121.636.593	9.090.926.016.609	9.231.628.430.340	36.729.272.833	36.729.272.833	9.194.899.157.507
Pemerintah Kota Depok	2018	36.733.168.783	1.283.858.080.242	8.291.316.199.959	10.190.832.640.979	19.292.900.888	19.609.313.041	10.171.223.327.938
	2019	41.313.710.581	1.259.203.396.808	10.016.907.218.529	12.066.798.550.548	47.282.337.849	47.478.784.881	12.019.319.765.667
	2020	69.683.761.299	1.163.893.587.515	12.090.957.510.882	14.128.331.630.657	35.287.936.687	35.594.071.925	14.092.737.558.732
	2021	81.661.040.502	1.372.933.468.114	13.501.138.981.464	15.794.807.979.868	122.782.800.055	123.654.908.794	15.671.153.071.073
	2022	76.569.472.746	1.374.245.201.253	15.690.758.821.203	18.186.834.722.785	46.425.248.696	47.036.028.300	18.139.798.694.485
Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2018	296.635.516.277	564.857.800.017	7.788.966.559.250	9.037.791.429.167	41.879.286.008	41.879.286.008	8.995.912.143.159
	2019	260.803.124.728	1.039.211.502.485	8.236.122.208.570	9.910.580.751.653	24.559.872.739	24.559.872.739	9.886.020.878.914
	2020	61.779.121.203	684.450.486.246	7.879.234.544.017	9.298.185.596.627	82.537.732.629	82.537.732.629	9.215.647.863.998
	2021	83.548.085.289	1.327.884.329.698	7.309.978.441.934	9.358.668.744.217	159.418.991.183	159.418.991.183	9.199.249.753.034
	2022	75.022.236.839	449.421.333.249	7.522.101.779.552	9.054.735.127.515	191.836.756.276	191.836.756.276	8.862.898.371.239

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2018	46.095.980.106	2.131.805.865.778	5.387.521.020.530	8.316.744.707.904	106.002.499.299	106.002.499.299	8.210.742.208.605
	2019	32.994.086.654	2.964.096.559.365	6.671.922.597.883	12.750.710.236.133	40.465.229.182	40.465.229.182	12.710.245.006.951
	2020	57.061.451.452	2.579.061.619.768	7.708.710.556.058	13.282.895.260.689	370.320.923.357	370.320.923.357	12.912.574.337.332
	2021	61.322.999.628	3.046.718.501.658	9.180.384.267.943	14.861.004.949.369	103.808.911.485	103.808.911.485	14.757.196.037.883
	2022	234.475.861.925	3.913.542.741.900	9.854.071.578.025	14.672.284.077.071	83.927.105.778	83.927.105.778	14.588.356.971.293
Pemerintah Kota Bogor	2018	26.708.887.745	597.909.309.350	6.805.408.855.781	8.134.004.234.560	33.042.922.986	115.314.415.637	8.018.689.818.923
	2019	32.596.243.908	718.953.836.768	7.093.013.218.195	8.450.865.944.761	47.905.717.440	119.207.677.738	8.331.658.267.022
	2020	44.188.378.065	782.480.152.983	7.757.955.718.843	9.203.864.257.665	40.366.775.295	106.183.969.418	9.097.680.288.247
	2021	44.896.845.500	900.180.538.843	8.394.773.111.342	9.913.070.916.181	70.983.427.347	161.721.270.045	9.751.349.646.136
	2022	42.886.362.633	644.681.936.562	8.757.617.690.877	10.316.556.025.616	59.260.840.035	142.091.662.936	10.174.464.362.680
Pemerintah Kabupaten Berau	2018	14.992.358.379	924.308.936.331	6.647.615.646.846	8.072.472.270.103	81.276.946.497	81.276.946.497	7.991.195.323.606
	2019	30.917.608.142	898.027.827.088	7.425.907.752.891	8.802.282.189.081	46.172.811.093	46.172.811.093	8.756.109.377.988
	2020	51.619.695.051	682.603.701.326	7.666.244.702.705	9.032.331.719.711	18.152.195.702	18.152.195.702	9.014.179.524.009
	2021	60.783.434.350	728.208.693.248	7.478.130.582.687	8.898.911.555.278	6.216.467.979	6.216.467.979	8.892.695.087.299
	2022	104.785.408.018	999.420.482.915	7.347.894.490.374	10.437.836.344.401	17.537.875.011	17.537.875.011	10.420.298.469.391
Pemerintah Kota Tangerang	2018	88.351.331.784	862.290.500.847	6.734.476.475.746	7.844.681.532.354	9.451.742.859	9.451.742.859	7.835.229.789.495
	2019	78.455.721.699	756.396.477.531	7.177.551.297.272	8.195.102.854.925	8.758.313.817	8.758.313.817	8.186.344.541.108
	2020	72.627.464.751	1.134.750.558.082	7.754.270.829.367	9.234.539.855.370	9.241.471.486	9.241.471.486	9.225.298.383.885
	2021	92.409.955.181	1.123.499.822.820	14.117.495.597.074	15.587.561.926.060	14.397.400.513	14.397.400.513	15.573.164.525.547
	2022	95.849.327.845	1.109.004.653.489	19.624.672.855.038	21.162.507.807.660	60.908.094.660	60.908.094.660	21.104.394.930.657

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Surakarta	2018	19.649.295.435	285.518.817.107	6.734.274.097.647	7.733.569.021.424	40.335.007.806	40.805.320.844	7.692.763.700.580
	2019	3.040.149.787	236.214.102.655	10.744.050.094.820	11.719.105.713.695	59.098.147.412	59.098.147.412	11.660.007.566.283
	2020	50.835.246.367	460.525.909.131	10.764.707.396.364	12.135.931.598.222	80.991.672.080	80.991.672.080	12.054.939.926.143
	2021	78.789.369.043	505.258.165.635	11.283.357.699.262	12.714.848.249.292	47.698.305.373	47.698.305.373	12.667.149.943.919
	2022	77.305.579.538	427.515.946.488	11.985.005.507.989	13.346.911.193.230	48.049.788.415	48.049.788.415	13.298.861.404.815
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2018	43.682.865.017	504.768.931.521	6.768.997.528.356	7.561.388.637.096	84.719.410.321	84.719.410.321	7.476.669.226.776
	2019	37.969.718.920	419.234.901.851	6.840.336.720.771	7.388.243.974.872	119.488.668.073	119.488.668.073	7.268.755.306.799
	2020	58.210.769.702	572.793.386.739	6.952.865.953.149	7.676.369.303.813	125.232.384.268	125.232.384.268	7.551.136.919.545
	2021	91.491.137.517	661.273.998.748	7.142.926.528.536	7.962.489.170.767	306.125.242.125	306.125.242.125	7.656.363.928.642
	2022	71.001.128.469	695.234.471.461	7.566.411.008.910	8.423.936.210.797	80.375.840.311	80.375.840.311	8.343.560.370.486
Pemerintah Kota Pontianak	2018	31.595.540.005	213.530.894.140	6.738.391.213.965	7.402.797.838.380	24.686.580.024	24.706.580.024	7.378.091.258.356
	2019	47.608.140.106	344.062.146.026	7.574.115.785.663	8.411.362.105.492	31.560.528.191	31.580.528.191	8.379.781.577.302
	2020	83.950.761.019	199.981.229.283	7.951.306.330.122	8.668.376.601.692	40.419.638.580	40.696.749.995	8.627.679.851.696
	2021	121.431.465.810	305.506.549.252	8.403.569.103.986	9.280.618.085.253	151.907.252.749	203.510.513.896	9.077.107.571.357
	2022	139.267.557.512	288.698.375.952	8.753.467.766.877	9.667.381.635.521	161.754.789.084	161.754.789.084	9.505.626.846.436
Pemerintah Kota Pekanbaru	2018	31.936.826.791	169.583.986.096	6.571.047.089.436	7.398.075.505.045	250.393.338.637	250.393.338.637	7.147.682.166.409
	2019	47.826.085.364	285.287.241.705	6.903.051.777.620	7.548.887.211.909	312.973.642.896	312.973.642.896	7.235.913.569.013
	2020	73.186.659.585	296.186.072.604	7.003.688.736.042	7.788.230.299.031	301.875.011.266	301.875.011.266	7.486.355.287.765
	2021	99.897.035.601	245.550.766.261	7.083.415.699.590	7.811.161.885.771	239.142.623.745	239.142.623.745	7.572.019.262.026
	2022	135.583.403.786	375.640.322.346	7.078.094.631.795	8.147.874.843.516	185.967.862.724	185.967.862.724	7.961.906.980.792

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Padang	2018	25.383.719.342	239.131.280.748	6.452.644.169.268	7.125.104.872.208	32.797.231.210	59.626.468.267	7.065.478.403.941
	2019	23.662.404.334	183.773.700.077	7.189.166.547.058	7.813.369.096.918	34.446.360.748	34.446.360.748	7.778.922.736.170
	2020	48.106.352.086	217.078.392.891	6.867.637.604.981	7.503.141.747.432	28.156.649.966	28.156.649.966	7.474.985.097.466
	2021	41.459.610.275	196.328.501.037	7.103.761.417.248	7.815.874.060.872	36.325.566.842	36.325.566.842	7.779.548.494.030
	2022	32.724.649.316	186.736.199.803	7.741.612.866.638	8.493.624.460.503	31.613.186.179	74.699.104.306	8.418.925.356.196
Pemerintah Kabupaten Malang	2018	34.218.968.908	527.956.993.267	6.091.804.907.332	6.968.023.910.764	39.095.722.895	41.830.914.908	6.926.192.995.856
	2019	44.495.289.924	559.923.007.077	6.040.671.074.217	6.985.183.955.290	38.568.144.170	40.303.336.183	6.944.880.619.107
	2020	80.581.515.200	544.943.357.972	6.093.873.390.433	6.193.666.905.313	59.324.165.171	60.059.357.184	6.919.855.595.545
	2021	96.187.126.290	803.906.017.789	5.044.538.347.175	6.979.914.952.729	63.848.864.791	63.848.864.791	6.129.818.040.522
	2022	78.571.102.731	386.486.958.961	5.116.413.915.730	5.888.273.678.261	71.582.819.978	71.582.819.978	5.816.690.858.283
Pemerintah Kabupaten Tuban	2018	26.891.999.791	399.303.470.095	6.211.892.695.072	6.831.283.504.584	26.849.582.640	26.849.582.640	6.804.433.921.944
	2019	67.417.720.354	523.848.172.626	6.415.335.076.480	7.141.285.838.191	22.453.724.796	22.453.724.796	7.101.935.250.440
	2020	51.633.230.154	622.281.335.533	6.474.125.498.148	7.300.738.037.164	22.649.008.046	22.649.008.046	7.278.089.029.119
	2021	55.988.107.015	853.261.678.396	6.616.259.898.854	7.673.202.987.340	48.376.291.381	48.376.291.381	7.624.818.891.703
	2022	47.443.103.274	760.956.680.949	6.831.015.442.403	7.839.569.045.732	21.865.989.282	21.865.989.282	7.817.703.056.449
Pemerintah Kabupaten Banyumas	2018	46.152.945.489	421.131.968.061	5.574.971.557.301	6.418.865.052.454	47.584.450.428	47.584.450.428	6.372.280.602.026
	2019	45.194.874.104	393.503.349.044	5.323.888.752.221	6.226.652.415.513	48.022.508.588	48.022.508.588	6.178.629.906.924
	2020	57.282.251.551	451.579.646.525	5.595.686.489.377	6.540.515.839.033	53.745.484.966	53.745.484.966	6.486.770.354.067
	2021	52.039.125.588	540.897.867.969	6.196.704.702.965	7.258.283.031.630	157.445.030.773	226.020.632.393	7.032.262.399.237
	2022	56.036.996.873	370.845.818.652	6.431.300.779.066	7.380.298.086.900	51.868.107.152	237.238.139.802	7.143.059.947.098

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Malang	2018	23.720.046.264	597.996.156.214	5.320.020.256.867	6.396.564.384.412	13.915.474.060	13.915.474.060	6.382.648.910.353
	2019	19.853.055.436	860.429.262.272	5.004.550.872.144	6.391.773.253.297	12.096.894.513	12.096.894.513	6.379.676.358.784
	2020	42.321.780.284	706.986.171.111	5.263.615.641.066	6.498.491.837.329	12.963.093.500	12.963.093.500	6.485.528.743.829
	2021	50.863.291.634	642.501.474.087	6.937.702.422.524	8.187.699.936.926	23.488.886.515	23.488.886.515	8.164.211.050.411
	2022	51.566.788.466	627.141.926.268	7.022.176.174.663	8.310.492.992.685	41.320.347.679	41.320.347.679	8.269.172.645.006
Pemerintah Kabupaten Paser	2018	71.621.524.848	462.521.640.024	5.419.060.486.268	6.313.509.056.616	8.970.820.641	8.970.820.641	6.304.538.235.975
	2019	84.805.075.731	831.152.331.162	5.949.820.632.797	7.224.784.129.347	68.273.231.658	68.273.231.658	7.156.510.897.689
	2020	197.383.147.531	801.176.673.144	5.971.309.970.887	7.185.245.549.086	31.748.965.247	31.748.965.247	7.153.496.583.839
	2021	169.187.094.962	594.021.378.697	5.976.612.190.941	6.990.498.902.069	54.484.374.482	54.484.374.482	6.936.014.527.586
	2022	123.636.252.147	1.199.120.837.358	5.868.005.184.756	8.132.490.984.920	38.588.381.910	38.588.381.910	8.093.902.603.010
Pemerintah Kabupaten Pati	2018	23.237.430.328	318.893.254.655	5.679.301.950.465	6.190.923.149.284	15.271.698.380	15.271.698.380	6.175.651.450.904
	2019	22.759.340.344	272.298.028.327	5.950.179.657.939	6.439.754.615.980	15.930.310.780	15.930.310.780	6.423.824.305.200
	2020	26.963.245.497	185.202.915.895	5.811.621.764.519	6.254.897.635.666	17.505.067.742	17.505.067.742	6.237.392.567.924
	2021	30.332.604.817	267.941.360.427	5.819.036.914.306	6.356.447.372.037	40.904.701.137	40.904.701.137	6.315.542.670.900
	2022	25.514.141.166	215.560.402.451	5.823.907.350.966	6.328.367.775.226	23.258.401.718	23.258.401.718	6.305.109.373.508
Pemerintah Kabupaten Jepara	2018	52.847.699.804	200.267.395.912	5.603.479.028.216	6.132.256.105.265	48.907.644.897	48.907.644.897	6.083.348.460.368
	2019	22.791.805.879	242.069.033.286	5.925.853.915.429	6.496.679.937.377	53.330.075.629	53.330.075.629	6.443.349.861.747
	2020	29.209.475.854	317.649.670.466	5.948.961.767.867	6.626.878.048.525	48.248.863.905	48.248.863.905	6.578.629.184.620
	2021	30.857.438.358	328.770.146.495	5.990.226.955.206	6.674.428.413.015	45.133.876.472	45.133.876.472	6.629.294.536.543
	2022	52.948.246.180	211.986.770.979	5.988.581.080.443	6.490.924.797.535	36.263.556.714	36.263.556.714	6.454.661.240.821

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Denpasar	2018	42.993.184.263	632.032.728.521	4.913.521.082.671	6.041.824.168.229	22.377.495.371	22.377.495.371	6.019.446.672.859
	2019	47.032.733.725	531.230.290.199	5.198.519.405.381	6.229.493.186.999	33.169.706.290	33.169.706.290	6.196.323.480.709
	2020	43.443.561.931	615.421.207.191	5.154.840.516.343	6.297.773.657.359	25.045.446.208	25.045.446.208	6.272.728.211.151
	2021	70.455.438.385	748.456.572.474	5.311.385.831.079	6.530.564.814.534	50.718.272.110	50.718.272.110	6.479.846.542.424
	2022	59.935.112.568	807.749.796.885	5.329.674.512.780	6.641.125.477.759	22.610.529.122	22.610.529.122	6.618.514.948.637
Pemerintah Kabupaten Siak	2018	25.475.151.841	361.189.490.597	4.394.933.079.290	5.941.420.051.531	9.135.699.463	9.135.699.463	5.932.284.352.068
	2019	35.296.739.785	715.444.649.355	4.471.403.672.129	6.390.388.112.372	9.197.664.853	9.197.664.853	6.381.190.447.518
	2020	53.964.528.565	429.113.228.879	4.610.122.627.683	6.177.035.955.395	36.548.907.397	63.749.414.045	6.113.286.541.350
	2021	60.046.992.692	642.930.729.709	4.248.634.628.158	6.077.810.176.303	28.649.954.266	51.964.674.250	6.025.845.502.053
	2022	67.973.024.263	369.200.299.646	4.280.693.685.817	6.209.199.181.378	18.193.051.390	37.621.984.709	6.171.577.196.669
Pemerintah Kabupaten Gresik	2018	22.246.648.358	486.232.888.644	4.698.691.803.307	5.929.674.460.563	48.294.595.144	76.011.558.585	5.853.662.901.978
	2019	41.842.380.380	612.286.996.003	4.898.822.021.286	6.306.091.367.346	12.051.827.799	32.731.327.002	6.273.360.040.344
	2020	109.412.522.038	525.252.631.128	4.906.802.112.974	6.219.174.906.927	28.437.693.898	28.437.693.898	6.190.737.213.029
	2021	59.002.248.548	482.789.945.627	4.945.028.770.810	6.193.948.015.545	46.104.570.479	46.104.570.479	6.147.843.445.067
	2022	49.336.974.079	252.382.540.596	5.113.962.591.347	6.145.239.675.306	60.890.139.733	60.890.139.733	6.084.349.535.572
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	2018	29.718.048.915	326.151.488.208	5.441.058.590.161	5.876.208.275.038	156.969.861.617	156.969.861.617	5.719.238.413.420
	2019	32.894.615.371	643.358.485.175	5.570.638.751.620	6.327.956.746.847	70.039.127.294	70.039.127.294	6.257.917.619.553
	2020	28.707.624.795	786.452.471.477	5.164.055.911.497	6.197.442.686.456	68.222.900.713	68.222.900.713	6.129.219.785.743
	2021	44.933.017.759	598.059.241.944	5.292.987.249.216	6.101.229.022.796	80.096.261.178	80.096.261.178	6.021.132.761.618
	2022	58.068.793.675	1.035.145.929.792	5.400.029.627.230	7.492.098.138.191	155.209.630.670	155.209.630.670	7.336.888.507.520

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Mojokerto	2018	43.173.025.946	490.771.110.251	5.120.951.477.228	5.701.435.154.418	30.550.552.803	30.550.552.803	5.670.884.601.615
	2019	46.432.184.750	490.236.342.457	5.345.210.442.136	5.925.977.315.672	55.280.517.485	55.280.517.485	5.870.696.798.188
	2020	56.758.402.940	489.232.845.555	5.370.947.927.636	5.949.039.791.956	34.414.101.774	34.414.101.774	5.914.625.690.182
	2021	80.676.449.969	704.106.351.663	5.452.288.983.270	6.254.447.197.161	86.119.473.478	86.119.473.478	6.168.327.723.683
	2022	49.480.029.666	549.018.125.659	5.425.896.293.254	6.089.920.320.337	81.764.896.173	81.764.896.173	6.008.155.424.164
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	2018	7.503.843.368	229.718.463.164	5.303.932.973.379	5.630.169.394.895	68.813.348.069	68.813.348.069	5.561.356.046.826
	2019	41.008.923.710	471.829.282.194	5.392.666.366.837	5.966.430.255.085	29.373.160.409	29.373.160.409	5.937.057.094.677
	2020	20.080.613.175	285.623.078.682	5.361.939.581.730	5.793.498.950.013	51.803.518.767	51.803.518.767	5.741.695.431.246
	2021	57.667.153.297	336.026.228.635	5.157.954.416.143	5.729.626.331.496	27.050.658.104	27.050.658.104	5.702.575.673.392
	2022	23.985.954.850	110.113.284.167	5.224.159.634.216	5.649.206.300.540	63.766.245.972	63.766.245.972	5.585.440.054.567
Pemerintah Kota Banda Aceh	2018	9.761.573.984	88.456.918.074	5.274.005.654.254	5.615.309.114.795	28.218.370.059	61.818.370.059	5.553.490.744.736
	2019	9.689.045.976	96.352.898.236	4.864.263.657.300	5.364.536.864.575	40.281.273.423	71.081.273.423	5.293.455.591.152
	2020	15.631.924.019	77.028.658.171	4.705.340.675.795	5.158.461.448.031	102.466.216.142	154.611.224.113	5.003.850.223.918
	2021	19.449.136.540	113.428.890.301	4.718.270.084.316	5.101.402.524.095	124.914.119.048	166.133.357.643	4.935.269.166.453
	2022	17.248.596.198	94.288.325.329	4.753.820.762.786	5.170.689.532.193	117.693.956.235	151.231.689.386	5.019.457.842.807
Pemerintah Kabupaten Merauke	2018	62.227.156.680	324.215.819.993	4.261.034.236.887	5.394.559.690.705	27.112.426.141	27.112.426.141	5.367.447.264.564
	2019	28.327.072.955	255.825.670.536	4.216.174.028.163	5.298.145.842.971	26.938.644.508	26.938.644.508	5.271.207.198.463
	2020	36.027.698.136	100.135.203.093	4.218.713.165.247	5.156.330.398.981	66.170.580.731	66.170.580.731	5.090.159.818.250
	2021	22.789.149.179	208.157.400.294	4.068.527.056.543	5.116.874.346.986	43.110.294.250	43.110.294.250	5.073.764.052.736
	2022	27.062.209.018	348.805.543.205	4.192.595.687.442	5.401.631.499.868	128.344.054.953	228.344.054.953	5.173.287.444.915

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kota Banjarmasin	2018	13.898.279.512	568.354.587.585	3.622.505.823.043	5.185.127.545.798	15.501.418.202	70.379.131.146	5.114.748.414.652
	2019	21.052.669.894	444.805.103.862	3.966.154.909.100	5.432.994.580.309	37.399.460.798	37.399.460.798	5.395.595.119.511
	2020	31.754.292.549	429.886.754.172	4.211.758.425.887	5.620.233.809.462	67.862.579.595	67.862.579.595	5.552.371.229.867
	2021	22.839.049.220	361.559.944.340	4.387.251.442.950	5.739.206.824.757	38.900.889.963	38.900.889.963	5.700.305.934.795
	2022	24.487.044.829	296.792.586.228	4.729.811.128.201	6.114.784.095.768	44.672.033.066	44.672.033.066	6.070.112.062.702
Pemerintah Kabupaten Mimika	2018	33.878.352.300	772.024.558.628	4.150.048.693.468	5.120.424.707.634	45.143.617.000	45.143.617.000	5.075.281.090.634
	2019	34.825.908.254	799.239.656.758	4.626.320.984.500	5.554.611.560.526	415.113.065.166	415.113.065.166	5.139.498.495.360
	2020	44.295.947.484	677.597.079.232	5.393.033.166.926	6.220.343.953.842	1.105.544.616.637	1.105.544.616.637	5.114.799.337.205
	2021	33.297.884.605	437.319.487.282	5.958.183.004.933	6.545.235.547.626	84.186.527.785	84.186.527.785	6.461.049.019.841
	2022	97.135.969.056	1.468.866.653.640	7.062.066.976.411	9.748.466.786.036	157.714.452.393	157.714.452.393	9.590.752.333.643
Pemerintah Kabupaten Demak	2018	21.694.188.768	292.043.912.645	4.564.191.981.126	5.084.647.496.852	23.193.060.088	23.193.060.088	5.061.454.436.764
	2019	23.198.261.172	323.919.945.906	4.815.353.625.622	5.450.473.201.190	23.882.389.930	23.882.389.930	5.426.590.811.261
	2020	36.892.991.148	356.613.643.085	6.630.095.324.707	5.697.120.718.057	16.183.319.247	16.183.319.247	5.680.937.398.810
	2021	40.390.824.760	355.662.480.944	7.113.711.227.236	5.914.642.693.556	35.012.322.029	35.012.322.029	5.879.630.371.527
	2022	51.992.843.938	239.994.656.377	5.251.772.835.965	5.873.599.121.167	23.214.743.116	23.214.743.116	5.850.384.378.051
Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2018	83.101.362.695	502.480.253.068	4.172.014.394.192	5.078.067.884.927	24.347.685.211	118.357.079.967	4.959.710.804.960
	2019	152.470.648.453	725.770.780.742	4.814.531.842.246	5.942.488.488.666	31.018.715.665	118.749.594.291	5.823.738.894.375
	2020	158.784.207.313	686.516.711.877	5.001.152.442.427	6.075.203.768.452	30.364.601.453	105.538.447.822	5.969.665.320.630
	2021	166.990.387.899	788.561.678.750	5.765.101.662.143	6.945.195.288.451	29.660.632.755	98.555.962.994	6.846.639.325.457
	2022	196.616.746.493	1.180.195.324.172	6.152.742.061.175	7.951.637.509.380	17.278.440.889	79.895.254.999	7.871.742.254.381

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Lamongan	2018	19.144.898.497	202.925.785.576	3.995.938.049.982	5.058.850.989.441	30.286.487.323	30.286.487.323	5.028.564.502.118
	2019	21.841.850.989	236.226.021.155	4.263.875.379.795	5.359.757.062.703	48.027.536.476	48.027.536.476	5.311.729.526.228
	2020	21.743.292.605	119.387.482.217	4.441.896.295.297	5.414.658.472.858	61.931.987.104	61.931.987.104	5.352.726.485.754
	2021	41.869.960.925	290.506.574.851	4.541.671.776.774	5.689.396.549.755	90.029.660.069	90.029.660.069	5.599.366.889.686
	2022	20.296.439.782	143.914.659.820	4.770.947.700.701	5.785.543.747.143	206.953.193.085	206.953.193.085	5.578.590.554.058
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	2018	34.476.567.054	47.186.103.818	4.661.756.840.230	4.942.472.702.752	274.763.456.322	274.763.456.322	4.667.709.246.430
	2019	30.248.562.130	402.692.734.533	4.752.636.506.173	5.471.031.489.852	41.235.514.044	41.235.514.044	5.429.795.975.807
	2020	53.771.090.527	65.645.265.099	5.559.690.021.164	5.977.037.535.408	4.989.908.630	4.989.908.630	5.972.047.626.777
	2021	20.127.226.697	83.182.809.954	5.593.339.051.096	6.030.922.656.195	199.939.912.057	199.939.912.057	5.830.982.744.138
	2022	21.996.463.200	166.349.609.649	5.822.036.906.325	6.416.941.806.210	5.060.702.431	5.060.702.431	6.411.881.103.779
Pemerintah Kabupaten Nunukan	2018	11.525.426.605	138.507.133.613	4.372.154.558.552	4.904.251.228.195	194.234.485.855	194.234.485.855	4.710.016.742.340
	2019	17.347.442.846	119.396.647.829	4.346.166.781.892	4.823.118.595.742	187.241.774.160	187.241.774.160	4.635.876.821.582
	2020	44.634.974.529	154.928.491.195	4.278.642.141.400	4.773.648.745.029	177.711.703.655	177.711.703.655	4.595.937.041.373
	2021	31.781.308.657	208.050.515.542	4.098.844.214.425	4.628.975.111.427	162.970.031.481	162.970.031.481	4.466.005.079.946
	2022	37.585.858.689	198.842.408.429	3.888.894.522.201	4.524.954.312.609	137.330.513.427	137.330.513.427	4.387.623.799.183
Pemerintah Kabupaten Malinau	2018	71.137.304.796	198.736.943.066	4.381.657.545.991	4.840.095.778.151	5.690.251.577	5.690.251.577	4.834.405.526.575
	2019	46.732.869.894	278.521.173.819	4.346.545.064.624	4.912.975.562.357	18.883.725.900	18.883.725.900	4.912.975.562.357
	2020	53.021.122.738	214.801.975.591	4.294.664.813.766	4.798.605.921.170	27.488.235.887	27.488.235.887	4.771.117.685.283
	2021	36.751.876.737	220.768.607.561	4.206.146.899.449	4.646.632.706.352	39.556.860.399	39.556.860.399	4.607.075.845.953
	2022	80.909.751.638	380.059.848.682	4.123.805.213.978	4.918.893.059.570	41.738.294.327	41.738.294.327	4.877.154.765.243

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Karawang	2018	55.010.736.202	435.890.679.614	4.130.631.760.608	4.832.949.592.660	76.564.794.368	76.564.794.368	4.756.384.798.292
	2019	41.544.940.487	445.808.147.771	4.472.618.826.426	5.354.357.417.461	63.284.966.430	63.284.966.430	5.290.877.524.930
	2020	47.238.962.045	625.708.639.575	446.144.830.234	5.524.923.223.444	57.592.861.059	57.592.861.059	5.467.330.362.385
	2021	187.443.626.626	1.047.892.357.092	4.782.049.515.376	6.301.830.965.643	60.696.276.753	60.696.276.753	6.241.134.688.890
	2022	206.310.418.411	1.160.188.496.531	7.941.215.292.814	9.672.454.748.452	84.346.215.296	84.346.215.296	9.588.108.533.157
Pemerintah Kota Kendari	2018	11.077.120.852	141.268.676.055	4.523.387.961.406	4.781.862.688.024	131.629.444.075	131.629.444.075	4.650.233.243.949
	2019	13.140.494.111	160.972.644.280	4.898.796.849.218	5.200.999.143.532	246.779.368.853	246.779.368.853	4.954.219.774.680
	2020	20.928.363.063	257.656.580.129	4.944.420.397.268	5.336.409.674.921	152.909.231.632	159.823.120.521	5.176.586.554.401
	2021	18.770.040.249	270.376.794.447	5.270.040.512.131	5.686.543.723.547	141.803.193.741	235.359.908.741	5.451.183.814.807
	2022	22.085.845.368	330.666.963.450	5.688.829.562.369	6.175.626.202.666	151.307.046.938	508.007.105.846	5.667.619.096.821
Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2018	29.489.609.681	338.836.407.772	4.279.494.601.857	4.741.935.353.530	16.578.349.168	16.578.349.168	4.725.357.004.361
	2019	21.859.561.215	577.915.739.005	3.443.416.409.652	4.163.112.007.662	21.639.643.032	21.639.643.032	4.141.472.364.631
	2020	30.663.428.738	377.966.675.188	3.501.071.720.118	4.050.526.940.741	16.343.008.885	16.343.008.885	4.034.183.931.855
	2021	34.249.899.180	290.798.431.825	3.642.307.381.781	4.113.746.880.334	21.364.431.575	21.364.431.575	4.092.382.448.759
	2022	67.769.852.377	256.981.513.960	3.651.925.228.962	4.131.279.426.924	41.976.439.995	41.976.439.995	4.089.302.986.929
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	2018	18.195.288.591	375.089.038.615	3.924.973.138.089	4.738.164.776.817	12.842.782.453	12.842.782.453	4.725.321.994.364
	2019	20.898.943.280	495.450.871.384	4.342.696.740.539	5.194.655.435.895	23.208.394.594	23.208.394.594	5.171.447.041.301
	2020	24.770.830.626	420.181.017.197	4.863.395.534.481	5.674.969.987.939	27.708.484.523	27.708.484.523	5.647.261.503.416
	2021	48.835.809.967	461.226.134.849	5.421.230.275.922	6.298.329.078.067	41.424.816.502	41.424.816.502	6.256.904.261.565
	2022	32.971.654.197	374.993.047.152	5.628.924.230.835	6.484.478.238.480	16.781.858.559	16.781.858.559	6.467.696.379.921

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Majalengka	2018	24.416.109.020	292.532.301.874	4.153.813.030.501	4.735.025.847.197	123.176.289.629	123.176.289.629	4.611.849.557.567
	2019	22.835.281.139	231.439.228.785	4.358.405.418.324	4.882.131.240.029	65.308.558.299	65.308.558.299	4.816.822.681.730
	2020	32.897.805.806	229.688.870.312	4.760.627.032.965	5.288.063.357.912	59.816.390.720	59.816.390.720	5.228.246.967.192
	2021	43.371.102.965	229.398.338.095	5.000.231.412.085	5.539.880.556.948	97.650.969.020	97.650.969.020	5.442.229.587.928
	2022	42.793.960.677	186.409.850.072	5.079.229.703.355	5.608.068.806.276	53.220.134.673	53.220.134.673	5.554.848.671.603
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2018	35.470.679.941	148.376.164.368	4.105.069.601.027	4.706.929.566.142	42.847.459.294	70.485.881.616	4.636.443.684.525
	2019	27.927.327.143	117.895.918.141	4.265.219.368.177	4.674.629.568.666	62.095.350.392	67.382.768.242	4.607.246.800.424
	2020	28.639.428.064	149.744.820.764	4.228.952.045.912	4.694.189.912.075	45.282.572.358	52.148.267.640	4.642.041.644.435
	2021	25.688.886.557	269.429.995.270	4.237.634.079.611	4.921.524.580.940	34.516.755.942	34.516.755.942	4.887.007.824.998
	2022	30.199.435.107	202.750.674.048	3.930.857.402.446	4.548.802.665.629	42.909.936.558	42.909.936.558	4.505.892.729.071
Pemerintah Kota Bontang	2018	46.410.397.614	368.333.694.580	3.975.124.021.744	4.697.436.263.646	23.785.804.395	23.785.804.395	4.673.650.459.251
	2019	48.203.229.303	272.185.129.491	4.098.442.742.678	4.837.712.351.603	30.214.393.261	30.214.393.261	4.807.497.958.343
	2020	80.032.087.537	412.278.753.354	4.017.673.912.068	4.904.574.927.619	45.884.890.393	45.884.890.393	4.858.690.037.225
	2021	63.396.305.146	233.690.463.642	3.995.891.016.532	4.699.630.738.534	34.138.009.575	34.138.009.575	4.665.492.728.959
	2022	59.795.536.443	527.630.606.588	3.939.085.743.583	5.485.414.876.619	23.484.029.915	23.484.029.915	5.461.930.846.704
Pemerintah Kabupaten Garut	2018	157.537.064.910	453.833.404.523	3.325.612.619.805	4.682.207.780.155	74.266.948.449	74.266.948.449	4.607.940.831.706
	2019	26.190.554.380	430.294.832.127	3.348.021.464.502	4.827.037.991.825	25.528.448.965	25.528.448.965	4.801.509.542.860
	2020	32.874.133.868	310.571.936.618	3.618.726.463.607	4.382.392.744.729	23.692.132.766	23.692.132.766	4.358.700.611.963
	2021	44.491.642.946	348.141.196.118	4.017.464.656.054	4.821.255.066.077	62.278.155.079	62.278.155.079	4.758.976.910.998
	2022	322.841.804.929	590.635.061.413	3.592.032.566.955	4.414.342.434.302	13.460.929.634	13.460.929.634	4.400.881.504.668

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Subang	2018	52.280.516.879	196.682.616.458	3.879.209.346.291	4.664.425.858.192	40.359.811.922	40.359.811.922	4.624.066.046.270
	2019	74.745.862.269	269.190.437.071	4.059.376.024.950	4.934.942.019.473	132.704.454.610	132.704.454.610	4.802.237.564.863
	2020	48.089.837.804	333.818.890.571	3.537.140.119.709	4.513.686.337.790	74.882.359.586	74.882.359.586	4.438.803.978.204
	2021	51.246.863.460	351.099.100.837	3.712.376.196.742	4.744.571.126.139	63.395.644.336	63.395.644.336	4.681.175.481.802
	2022	35.464.404.069	291.845.193.944	3.843.202.337.468	4.877.928.101.680	78.419.225.128	78.419.225.128	4.799.508.876.553
Pemerintah Kabupaten Cilacap	2018	45.728.887.004	413.925.927.201	3.388.919.398.965	4.590.474.285.434	39.611.320.460	39.611.320.460	4.550.862.964.974
	2019	39.410.317.417	376.490.081.120	3.918.857.106.762	5.735.055.789.651	46.031.066.709	46.031.066.709	5.689.024.722.942
	2020	32.941.359.785	444.398.092.176	4.194.060.979.387	6.047.267.120.680	31.710.226.077	31.710.226.077	6.015.556.894.603
	2021	47.398.925.408	415.912.943.987	4.477.105.727.236	6.345.078.297.174	63.918.905.132	63.918.905.132	6.281.159.392.042
	2022	54.824.439.010	280.050.511.819	4.806.934.020.569	6.631.042.215.505	31.735.676.219	31.735.676.219	6.599.306.539.286
Pemerintah Kabupaten Ketapang	2018	14.505.073.549	208.459.512.044	3.820.447.106.942	4.557.522.832.460	132.965.136.881	132.965.136.881	4.424.557.695.579
	2019	14.560.398.192	235.880.191.639	4.120.692.976.643	4.844.561.389.559	85.994.433.253	85.994.433.253	4.758.566.956.306
	2020	21.657.761.190	380.361.254.692	4.247.975.634.032	5.151.055.752.030	109.579.482.469	109.579.482.469	5.041.476.269.561
	2021	31.494.388.278	552.966.223.488	4.540.834.457.922	5.695.740.236.146	74.992.106.615	74.992.106.615	5.620.748.129.531
	2022	24.496.269.756	603.293.003.226	4.661.889.436.080	6.013.525.743.714	72.201.823.760	72.201.823.760	5.941.323.919.954
Pemerintah Kabupaten Kebumen	2018	35.024.950.534	296.960.356.916	3.844.748.357.518	4.548.688.282.913	19.470.388.884	19.470.388.884	4.529.217.894.029
	2019	35.653.398.103	298.354.393.077	3.928.360.648.412	4.482.323.838.554	28.013.032.840	28.013.032.840	4.454.310.805.714
	2020	39.833.217.852	319.990.472.249	3.931.529.890.870	4.525.738.172.682	41.790.047.964	41.790.047.964	4.483.948.124.718
	2021	46.743.460.481	413.565.396.044	3.985.548.772.976	4.678.346.895.121	63.997.463.893	63.997.463.893	4.614.349.431.228
	2022	59.569.450.839	345.177.363.521	3.959.242.372.636	4.628.824.366.869	36.584.708.423	36.584.708.423	4.592.239.658.446

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Sleman	2018	50.453.617.469	579.076.086.426	3.329.478.380.473	4.537.884.982.107	12.376.336.409	16.252.967.409	4.521.632.014.698
	2019	43.763.597.442	573.862.905.841	3.610.801.283.390	4.889.673.225.382	7.817.933.048	7.817.933.048	4.881.855.292.334
	2020	72.799.646.601	582.256.064.794	3.751.177.634.902	5.059.678.892.688	5.071.641.479	5.071.641.479	5.054.607.251.209
	2021	77.712.757.189	671.714.226.349	4.430.677.690.907	5.820.090.126.338	2.952.930.732	2.952.930.732	5.817.137.195.606
	2022	65.238.762.782	468.698.954.853	4.673.773.481.806	5.989.731.876.537	3.207.577.067	3.207.577.067	5.986.524.299.469
Pemerintah Kota Cilegon	2018	17.814.974.979	310.146.805.583	2.779.496.804.419	4.520.506.103.109	21.417.730.223	21.417.730.223	4.499.088.372.886
	2019	17.406.170.699	262.455.093.614	2.992.502.932.939	4.715.039.121.990	31.833.519.680	31.833.519.680	4.683.205.602.310
	2020	19.925.596.926	555.124.414.218	3.002.947.563.785	5.033.721.428.190	26.375.809.033	26.375.809.033	5.007.345.619.157
	2021	25.329.368.911	709.097.620.984	3.000.791.519.071	5.140.050.440.972	48.448.989.697	48.448.989.697	5.091.601.451.275
	2022	31.212.984.407	546.649.164.356	3.039.011.280.780	5.062.110.097.203	14.434.429.299	14.434.429.299	5.047.675.667.904
Pemerintah Kabupaten Kediri	2018	36.615.218.408	636.417.669.017	3.701.124.254.650	4.454.578.539.082	8.852.194.986	8.852.194.986	4.445.726.344.095
	2019	46.052.661.906	627.699.770.490	3.965.877.635.009	4.753.770.809.598	15.579.404.597	15.579.404.597	4.738.191.405.000
	2020	51.666.360.817	669.741.334.664	4.107.709.080.631	4.920.090.045.491	10.623.245.508	10.623.245.508	4.909.466.799.983
	2021	46.523.471.272	730.045.591.544	4.452.724.651.096	5.313.548.762.974	33.373.835.100	33.373.835.100	5.280.174.927.874
	2022	66.906.859.633	526.885.874.925	4.615.692.792.240	5.323.852.242.842	21.364.962.850	21.364.962.850	5.302.487.279.993
Pemerintah Kabupaten Sorong	2018	14.504.241.965	273.499.258.115	4.099.440.551.487	4.454.335.982.866	5.148.702.750	5.148.702.750	4.449.187.280.115
	2019	10.727.557.483	336.420.279.148	4.568.139.632.480	4.988.079.832.140	34.498.381.546	225.662.108.509	4.762.417.723.632
	2020	16.019.255.311	363.318.733.455	4.156.875.593.130	4.598.171.139.793	91.585.888.789	235.894.200.999	4.362.276.938.795
	2021	16.204.147.573	299.544.054.701	4.170.221.215.337	4.554.680.663.872	96.462.795.685	158.309.220.863	4.396.371.443.009
	2022	14.302.650.063	262.608.769.171	4.091.041.865.481	4.661.916.703.420	66.122.823.382	66.122.823.382	4.595.793.880.038

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Semarang	2018	19.744.517.885	276.378.919.312	3.939.203.848.178	4.381.254.462.291	24.307.170.656	27.090.182.656	4.354.164.279.634
	2019	19.038.059.373	284.659.728.910	4.245.665.000.480	4.689.787.427.166	36.708.575.198	36.708.575.198	4.653.078.851.968
	2020	27.887.046.522	321.576.724.343	4.405.923.507.043	4.888.861.215.817	39.346.280.872	39.346.280.872	4.849.514.934.945
	2021	28.516.766.906	488.308.109.976	4.649.102.350.953	5.297.004.928.246	72.861.576.582	72.861.576.582	5.224.143.351.664
	2022	31.785.252.790	276.522.112.963	4.652.203.789.334	5.333.665.669.487	31.772.297.300	31.772.297.300	5.301.893.372.187
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	2018	28.423.494.480	189.270.299.425	4.057.924.311.849	4.355.751.220.426	14.847.764.458	14.847.764.458	4.340.903.455.968
	2019	31.904.330.646	170.186.465.926	4.184.672.125.814	4.469.370.847.873	27.892.413.417	27.892.413.417	4.441.478.434.456
	2020	27.782.799.236	113.125.935.585	4.292.426.640.231	4.528.919.724.976	21.558.235.705	21.558.235.705	4.507.361.489.271
	2021	30.433.258.237	135.271.414.743	4.340.046.212.137	4.611.184.734.617	24.306.773.816	24.306.773.816	4.586.877.960.801
	2022	46.589.696.638	141.945.516.177	4.323.553.322.177	4.620.882.359.127	32.956.897.033	32.956.897.033	4.587.925.462.094
Pemerintah Kota Batam	2018	42.492.333.486	331.039.531.028	3.793.240.091.246	4.304.642.843.784	84.493.947.901	84.493.947.901	4.220.148.895.882
	2019	46.996.484.773	534.682.880.187	5.397.973.318.379	6.110.123.116.410	99.225.924.090	99.225.924.090	6.010.897.192.320
	2020	77.343.083.159	749.804.581.514	5.526.698.957.512	6.451.077.444.351	21.086.422.040	21.086.422.040	6.429.991.022.311
	2021	95.592.445.449	589.156.257.689	7.236.049.985.464	8.017.408.643.352	36.420.363.774	36.420.363.774	7.980.988.279.578
	2022	65.484.400.091	429.388.686.972	10.361.790.537.850	11.014.140.631.162	39.499.236.070	39.499.236.070	10.974.655.926.669
Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2018	44.912.512.356	383.616.354.104	3.584.013.469.986	4.237.919.081.040	70.755.031.869	70.755.031.869	4.167.164.049.171
	2019	37.262.674.362	329.806.124.339	3.685.747.965.901	4.536.783.715.735	66.043.288.356	66.043.288.356	4.470.740.427.379
	2020	28.580.550.093	270.721.091.162	4.020.861.074.649	4.801.220.838.406	114.774.082.990	114.774.082.990	4.686.446.755.416
	2021	71.472.848.511	339.528.368.189	4.420.046.621.663	5.271.461.249.615	22.485.654.692	22.485.654.692	5.248.975.594.923
	2022	61.909.050.820	329.733.226.063	4.734.815.230.601	5.629.761.187.946	31.432.330.425	31.432.330.425	5.598.328.857.521

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Kudus	2018	21.819.112.384	221.682.784.536	3.711.271.119.944	4.159.213.413.942	26.884.809.345	26.884.809.345	4.132.328.604.598
	2019	29.692.215.797	273.891.003.746	3.954.624.264.929	4.468.531.280.045	45.694.093.284	45.694.093.284	4.422.837.186.761
	2020	40.484.081.702	411.849.031.568	4.050.417.017.817	4.670.496.301.415	39.526.372.677	39.526.372.677	4.630.969.928.738
	2021	58.073.666.395	640.520.390.478	4.013.073.581.869	4.850.177.079.998	33.554.417.697	33.554.417.697	4.816.622.662.300
	2022	44.358.278.744	496.889.846.377	4.283.322.993.772	5.006.456.634.422	18.567.117.611	18.567.117.611	4.987.889.516.811
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2018	54.673.885.826	198.952.948.786	3.552.490.933.620	4.154.480.420.615	45.044.146.711	45.044.146.711	4.109.436.273.903
	2019	62.054.013.835	414.636.061.581	3.594.411.931.232	4.413.371.980.841	57.474.029.978	57.474.029.978	4.355.897.950.863
	2020	72.588.095.137	510.859.202.007	3.660.765.416.069	4.610.811.341.120	54.862.011.025	54.862.011.025	4.555.949.330.095
	2021	67.285.919.383	568.953.667.178	3.815.178.420.445	4.880.705.919.575	72.893.086.508	72.893.086.508	4.807.812.833.066
	2022	61.117.867.486	446.113.984.519	3.948.251.252.682	4.975.933.686.336	86.982.075.099	86.982.075.099	4.888.953.608.517
Pemerintah Kabupaten Lebak	2018	166.040.254.594	482.238.388.104	3.525.083.468.375	4.140.801.892.179	29.313.033.263	29.313.033.263	4.111.488.858.916
	2019	254.342.038.903	589.698.693.190	3.519.936.569.971	4.265.888.913.428	42.696.860.811	42.696.860.811	4.223.192.052.618
	2020	78.695.242.819	483.215.881.840	3.898.888.002.753	4.542.697.397.682	23.323.757.088	23.323.757.088	4.519.373.640.595
	2021	83.686.394.757	444.300.274.729	3.998.669.774.911	4.611.617.075.217	21.963.855.389	21.963.855.389	4.589.653.219.829
	2022	65.925.915.310	380.502.099.213	4.075.449.643.245	4.704.008.701.183	30.710.704.115	30.710.704.115	4.673.297.997.069
Pemerintah Kota Yogyakarta	2018	40.720.493.927	349.636.966.978	3.237.752.519.697	4.101.991.184.624	17.581.629.867	17.581.629.867	4.084.409.554.757
	2019	36.723.783.805	351.153.371.463	3.318.709.338.013	4.246.893.437.244	12.009.874.122	12.009.874.122	4.234.883.563.122
	2020	49.343.251.888	532.923.737.696	3.376.707.490.306	4.506.498.945.235	9.261.204.753	9.261.204.753	4.497.237.740.483
	2021	63.346.558.875	548.024.351.110	3.503.363.197.481	4.723.776.065.558	12.626.645.443	12.626.645.443	4.711.149.420.115
	2022	47.581.968.051	492.456.399.311	4.516.745.232.319	5.743.650.889.104	12.118.214.914	12.118.214.914	5.731.532.674.190

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Kampar	2018	13.869.404.628	278.495.844.448	3.583.591.552.527	4.085.230.964.652	20.300.587.977	20.300.587.977	4.064.930.376.675
	2019	17.658.968.313	468.413.201.542	3.890.868.493.363	4.585.418.749.413	25.553.126.769	25.553.126.769	4.559.865.622.644
	2020	23.984.571.607	317.861.867.266	4.013.352.436.918	4.554.156.297.699	35.273.626.817	35.273.626.817	4.518.882.670.882
	2021	32.039.550.844	193.835.830.965	4.018.260.426.705	4.457.284.018.395	25.590.792.686	25.590.792.686	4.431.693.225.708
	2022	31.813.823.631	139.600.651.002	4.000.596.189.356	4.440.387.101.320	39.544.895.030	39.544.895.030	4.400.842.206.289
Pemerintah Kabupaten Madiun	2018	23.323.513.913	243.451.735.930	3.584.852.601.749	4.054.430.335.312	15.026.793.486	15.026.793.486	4.039.403.541.826
	2019	21.173.252.305	273.200.432.609	3.733.523.367.151	4.162.865.455.741	14.561.884.110	14.561.884.110	4.148.303.571.632
	2020	31.885.250.363	299.551.747.420	3.762.110.127.398	4.223.308.432.257	15.427.143.015	15.427.143.015	4.207.881.289.241
	2021	31.133.885.245	452.788.501.983	4.002.687.009.625	4.637.395.032.456	30.231.056.951	30.231.056.951	4.607.163.975.505
	2022	28.418.276.661	288.991.033.355	4.076.860.258.981	4.604.593.310.262	25.018.274.354	25.018.274.354	4.579.575.035.908
Pemerintah Kabupaten Sintang	2018	13.974.705.233	300.602.675.489	3.617.278.187.016	4.051.065.559.340	26.567.470.716	26.567.470.716	4.024.498.088.624
	2019	14.750.536.055	198.880.195.073	3.848.721.031.684	4.186.495.738.524	32.480.793.058	32.480.793.058	4.154.014.945.466
	2020	37.411.510.720	112.652.151.446	3.949.691.140.771	4.201.274.649.289	30.421.877.368	30.421.877.368	4.170.852.771.921
	2021	46.373.142.254	294.014.410.564	3.982.293.926.004	4.419.652.547.141	42.479.424.976	42.479.424.976	4.377.173.122.165
	2022	37.568.784.131	220.427.195.651	4.567.944.092.623	4.954.797.307.108	24.243.280.727	24.243.280.727	4.930.554.026.381
Pemerintah Kabupaten Banyuasin	2018	16.988.875.136	318.582.277.494	3.315.329.060.451	4.049.248.750.620	30.813.463.619	30.813.463.619	4.018.435.287.001
	2019	59.266.848.638	299.598.454.454	3.376.278.200.718	4.215.741.205.023	25.031.235.501	25.031.235.501	4.190.709.969.522
	2020	110.214.556.051	205.799.685.097	3.820.778.089.164	4.527.851.856.858	146.996.328.081	237.717.794.681	4.290.134.062.177
	2021	104.840.996.657	263.991.139.608	4.061.093.389.009	4.815.347.652.669	280.549.661.035	414.497.444.935	4.400.850.207.734
	2022	61.155.557.570	233.940.310.547	4.089.462.114.622	4.889.692.864.781	72.363.679.826	259.440.425.668	4.630.252.439.113

Kabupaten/Kota	Tahun	Persediaan	Aktiva Lancar	Jumlah Aset Tetap	Total Aktiva	Utang Lancar	Total Utang	Jumlah Ekuitas
Pemerintah Kabupaten Cirebon	2018	64.483.285.628	501.904.625.474	3.383.925.041.980	4.049.013.747.017	75.157.759.326	75.157.759.326	3.973.855.987.691
	2019	51.612.326.167	495.698.120.442	3.928.433.010.728	4.574.490.416.349	57.124.263.939	57.124.263.939	4.517.366.152.411
	2020	66.512.942.245	536.575.983.178	3.832.329.871.988	4.671.700.425.487	71.854.043.688	71.854.043.688	4.599.846.381.799
	2021	58.798.705.243	639.221.492.235	3.924.804.466.124	4.873.837.700.178	148.247.714.042	148.247.714.042	4.725.589.986.136
	2022	49.431.947.894	472.387.680.168	4.061.356.317.043	4.829.525.836.462	80.473.182.279	80.473.182.279	4.753.817.542.730
Pemerintah Kabupaten Blitar	2018	25.997.192.054	326.619.148.802	3.627.424.581.718	4.039.394.668.252	17.761.295.978	17.761.295.978	4.021.633.372.274
	2019	39.392.846.413	316.620.320.350	4.045.576.555.595	4.448.281.215.370	35.650.690.466	35.650.690.466	4.412.630.524.904
	2020	43.041.891.301	265.034.457.986	4.118.743.053.198	4.469.504.443.761	46.567.712.368	46.567.712.368	4.422.936.731.393
	2021	44.914.143.709	468.578.371.264	4.202.538.665.443	4.793.167.337.758	55.703.048.572	55.703.048.572	4.737.464.289.186
	2022	41.754.081.609	374.281.055.567	4.274.593.416.152	4.792.946.045.155	39.605.469.690	39.605.469.690	4.753.330.575.464
Pemerintah Kabupaten Klaten	2018	91.628.922.802	535.978.337.508	3.247.115.789.661	4.001.324.130.418	14.184.935.216	14.184.935.216	3.987.139.195.203
	2019	96.224.572.058	530.020.197.775	3.288.202.270.228	4.157.398.988.909	14.356.397.757	14.356.397.757	4.143.042.591.152
	2020	166.048.476.463	667.032.607.796	2.556.910.271.392	3.566.777.871.038	20.876.092.289	20.876.092.289	3.545.901.778.749
	2021	84.183.162.728	684.293.787.924	2.476.188.153.216	3.515.210.592.464	8.335.992.845	8.335.992.845	3.506.874.599.619
	2022	61.836.175.763	621.577.027.557	2.553.602.488.616	3.535.972.154.908	11.570.216.778	11.570.216.778	3.524.401.938.130

Lampiran 3

Uji Data Sebelum Eliminasi *Outlier*

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
1	Pemerintah Kota Surabaya	2018	2,87946	3,21081	0,02937	0,01346	0,01504	11
		2019	2,03348	2,34152	0,01944	0,01470	0,01604	10
		2020	1,40762	1,88652	0,01259	0,01440	0,01558	11
		2021	2,54183	2,92888	0,03074	0,01619	0,01778	6
		2022	1,58109	2,00254	0,01393	0,01409	0,01681	11
2	Pemerintah Kota Bandung	2018	2,61100	2,89379	0,01332	0,00708	0,00753	20
		2019	2,77437	3,13223	0,01021	0,00481	0,00517	11
		2020	5,07625	5,66909	0,01796	0,00386	0,00419	17
		2021	6,45893	7,18895	0,02400	0,00389	0,00422	13
		2022	6,70497	7,82838	0,02378	0,00349	0,00377	12
3	Pemerintah Kota Semarang	2018	8,54520	9,35753	0,01827	0,00253	0,00265	14
		2019	8,58539	9,32108	0,03339	0,00417	0,00454	12
		2020	10,14079	10,73439	0,04237	0,00532	0,00584	16
		2021	8,84889	9,71195	0,04155	0,00538	0,00592	6
		2022	17,52181	19,06594	0,04092	0,00311	0,00343	24
4	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2018	55,68172	58,77456	0,04863	0,00084	0,00090	10
		2019	49,98005	53,67337	0,04035	0,00077	0,00081	6
		2020	6,83271	7,50077	0,03262	0,00504	0,00529	7
		2021	19,62938	21,11211	0,04776	0,00238	0,00253	9
		2022	37,06549	39,20953	0,05053	0,00132	0,00142	10

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
5	Pemerintah Kota Samarinda	2018	4,47415	4,68702	0,02340	0,01215	0,01303	19
		2019	8,62835	8,90178	0,03781	0,01035	0,01146	11
		2020	6,81324	7,21942	0,03498	0,01113	0,01226	18
		2021	3,47116	3,83063	0,02267	0,01340	0,01454	15
		2022	13,03618	13,59822	0,06016	0,00970	0,01119	20
6	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2018	3,70857	3,97032	0,08409	0,02913	0,03416	15
		2019	4,12319	4,39187	0,09382	0,02845	0,03414	13
		2020	2,44391	2,67687	0,06102	0,03776	0,04382	14
		2021	4,10831	4,97614	0,05982	0,01528	0,01766	23
		2022	14,15868	14,58093	0,15188	0,01131	0,01492	20
7	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2018	17,60617	18,50833	0,07370	0,00423	0,00486	11
		2019	16,00953	16,62351	0,07015	0,00451	0,00512	20
		2020	13,79409	14,50699	0,06482	0,00495	0,00558	8
		2021	11,56746	12,53257	0,05443	0,00462	0,00514	9
		2022	7,66287	8,35603	0,03430	0,00468	0,00511	25
8	Pemerintah Kota Palembang	2018	1,39171	1,56081	0,01300	0,02318	0,02663	22
		2019	0,84274	1,00046	0,00001	0,01896	0,02678	10
		2020	1,24630	1,45706	0,00701	0,01557	0,02071	23
		2021	1,57358	1,76121	0,01664	0,02235	0,02499	10
		2022	3,12088	3,31587	0,03363	0,01804	0,02061	21

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
9	Pemerintah Kabupaten Tangerang	2018	15,47787	20,16965	0,09322	0,00490	0,00605	9
		2019	14,37569	16,60339	0,05979	0,00385	0,00449	9
		2020	34,40945	41,08918	0,06626	0,00167	0,00192	8
		2021	33,68033	37,42613	0,07036	0,00194	0,00224	7
		2022	47,25594	53,79752	0,07793	0,00148	0,00172	16
10	Pemerintah Kabupaten Badung	2018	1,10998	1,58791	0,03189	0,05735	0,07286	14
		2019	5,87367	8,09350	0,06294	0,00895	0,01171	10
		2020	13,31485	17,26208	0,05964	0,00368	0,00455	8
		2021	5,66516	7,69738	0,05207	0,00784	0,00960	14
		2022	9,94367	10,36246	0,08888	0,00958	0,01211	12
11	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2018	26,94110	27,96979	0,10785	0,00402	0,00511	18
		2019	24,23656	25,17864	0,11765	0,00489	0,00627	10
		2020	4,69905	5,02855	0,07589	0,01920	0,02446	12
		2021	19,69789	21,31581	0,11322	0,00560	0,00711	12
		2022	25,76508	27,28109	0,08845	0,00338	0,00417	17
12	Pemerintah Kota Balikpapan	2018	9,84115	10,28959	0,03967	0,00429	0,00485	11
		2019	11,03510	11,57234	0,03999	0,00380	0,00428	10
		2020	20,32227	22,30069	0,07406	0,00349	0,00408	14
		2021	9,57653	11,45495	0,06773	0,00652	0,00759	19
		2022	19,62879	21,65234	0,07230	0,00351	0,00429	14

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
13	Pemerintah Kabupaten Bandung	2018	12,78012	13,61724	0,08906	0,00711	0,00825	14
		2019	10,78191	11,45775	0,08171	0,00788	0,00905	13
		2020	9,28180	10,25039	0,07316	0,00797	0,00937	13
		2021	11,74213	13,29354	0,09549	0,00783	0,00940	17
		2022	7,99741	9,08161	0,06961	0,00869	0,01025	12
14	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2018	1,67693	2,00109	0,00275	0,00397	0,00398	11
		2019	6,28563	6,92232	0,00674	0,00114	0,00115	7
		2020	0,62247	0,81365	-0,00076	0,00411	0,00412	16
		2021	0,99013	1,18504	0,00071	0,00387	0,00389	10
		2022	1,52336	1,90915	0,00362	0,00399	0,00404	16
15	Pemerintah Kota Depok	2018	64,64165	66,54562	0,12409	0,00193	0,00237	15
		2019	25,75781	26,63158	0,10043	0,00395	0,00474	10
		2020	31,00804	32,98276	0,07988	0,00253	0,00294	11
		2021	10,51672	11,18181	0,07915	0,00789	0,00916	9
		2022	27,95194	29,60125	0,07301	0,00259	0,00300	7
16	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2018	6,40465	13,48776	0,05787	0,00466	0,00538	11
		2019	31,69432	42,31339	0,10238	0,00248	0,00298	8
		2020	7,54408	8,29258	0,06473	0,00896	0,01048	15
		2021	7,80545	8,32952	0,12485	0,01733	0,02181	25
		2022	1,95165	2,34273	0,02845	0,02164	0,02550	22

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
17	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2018	19,67604	20,11090	0,24358	0,01291	0,01968	14
		2019	72,43509	73,25046	0,22929	0,00318	0,00607	13
		2020	6,81031	6,96440	0,16628	0,02868	0,04804	13
		2021	28,75857	29,34930	0,19803	0,00703	0,01131	9
		2022	43,83646	46,63026	0,26101	0,00575	0,00852	11
18	Pemerintah Kota Bogor	2018	17,28662	18,09493	0,06945	0,01438	0,01694	24
		2019	14,32726	15,00768	0,07941	0,01431	0,01681	14
		2020	18,28959	19,38426	0,08063	0,01167	0,01369	16
		2021	12,04906	12,68156	0,08365	0,01658	0,01926	12
		2022	10,15503	10,87872	0,05675	0,01397	0,01622	9
19	Pemerintah Kabupaten Berau	2018	11,18788	11,37234	0,10443	0,01017	0,01223	11
		2019	18,77967	19,44928	0,09678	0,00527	0,00622	7
		2020	34,76075	37,60447	0,07356	0,00201	0,00237	19
		2021	107,36406	117,14187	0,08113	0,00070	0,00083	10
		2022	51,01160	56,98641	0,09407	0,00168	0,00239	14
20	Pemerintah Kota Tangerang	2018	81,88322	91,23085	0,10872	0,00121	0,00140	12
		2019	77,40540	86,36325	0,09123	0,00107	0,00122	6
		2020	114,93008	122,78895	0,12188	0,00100	0,00119	9
		2021	71,61639	78,03491	0,07115	0,00092	0,00102	10
		2022	16,63417	18,20784	0,04953	0,00289	0,00310	11

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
21	Pemerintah Kota Surakarta	2018	6,59153	7,07869	0,03170	0,00530	0,00606	12
		2019	3,94554	3,99698	0,01511	0,00507	0,00550	7
		2020	5,05843	5,68609	0,03127	0,00672	0,00752	6
		2021	8,94096	10,59279	0,03599	0,00377	0,00423	7
		2022	7,28849	8,89735	0,02843	0,00361	0,00401	4
22	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2018	5,44251	5,95813	0,05555	0,01133	0,01252	12
		2019	3,19081	3,50857	0,04057	0,01644	0,01747	9
		2020	4,10902	4,57384	0,05830	0,01658	0,01801	11
		2021	1,86127	2,16014	0,04460	0,03998	0,04286	12
		2022	7,76643	8,64979	0,07299	0,00963	0,01062	14
23	Pemerintah Kota Pontianak	2018	7,36981	8,64968	0,02551	0,00335	0,00367	11
		2019	9,39319	10,90166	0,03715	0,00377	0,00417	11
		2020	2,87065	4,94763	0,01841	0,00472	0,00512	8
		2021	1,21176	2,01114	0,01655	0,02242	0,02422	10
		2022	0,92381	1,78479	0,01313	0,01702	0,01848	18
24	Pemerintah Kota Pekanbaru	2018	0,54972	0,67727	-0,01092	0,03503	0,03811	9
		2019	0,75873	0,91154	-0,00367	0,04325	0,04534	11
		2020	0,73871	0,98115	-0,00073	0,04032	0,04310	23
		2021	0,60907	1,02680	0,00082	0,03158	0,03376	14
		2022	1,29085	2,01992	0,02328	0,02336	0,02627	18

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
25	Pemerintah Kota Padang	2018	6,51724	7,29120	0,02896	0,00844	0,00924	16
		2019	4,64813	5,33507	0,01911	0,00443	0,00479	13
		2020	6,00114	7,70967	0,02518	0,00377	0,00410	12
		2021	4,26336	5,40469	0,02047	0,00467	0,00511	17
		2022	4,87175	5,90691	0,01826	0,00887	0,00965	21
26	Pemerintah Kabupaten Malang	2018	12,62895	13,50421	0,07016	0,00604	0,00687	10
		2019	13,36408	14,51776	0,07464	0,00580	0,00667	11
		2020	7,82753	9,18586	0,07841	0,00868	0,00986	17
		2021	11,08428	12,59076	0,10603	0,01042	0,01266	17
		2022	4,30153	5,39916	0,05348	0,01231	0,01399	7
27	Pemerintah Kabupaten Tuban	2018	13,87029	14,87187	0,05452	0,00395	0,00432	9
		2019	20,32761	23,33012	0,07021	0,00316	0,00350	6
		2020	25,19528	27,47499	0,08213	0,00311	0,00350	10
		2021	16,48067	17,63801	0,10490	0,00634	0,00731	12
		2022	32,63120	34,80093	0,09428	0,00280	0,00320	11
28	Pemerintah Kabupaten Banyumas	2018	7,88028	8,85020	0,05820	0,00747	0,00854	14
		2019	7,25303	8,19414	0,05548	0,00777	0,00902	9
		2020	7,33638	8,40219	0,06083	0,00829	0,00960	12
		2021	3,10495	3,43547	0,05283	0,03214	0,03647	10
		2022	6,06941	7,14979	0,04322	0,03321	0,03689	7

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
29	Pemerintah Kota Malang	2018	41,26889	42,97347	0,09131	0,00218	0,00262	11
		2019	69,48694	71,12811	0,13272	0,00190	0,00242	20
		2020	51,27359	54,53838	0,10680	0,00200	0,00246	14
		2021	25,18800	27,35342	0,07560	0,00288	0,00339	16
		2022	13,92958	15,17756	0,07049	0,00500	0,00588	16
30	Pemerintah Kabupaten Paser	2018	43,57462	51,55845	0,07184	0,00142	0,00166	11
		2019	10,93177	12,17391	0,10559	0,00954	0,01147	13
		2020	19,01774	25,23473	0,10708	0,00444	0,00532	10
		2021	7,79736	10,90260	0,07718	0,00786	0,00912	17
		2022	27,87068	31,07466	0,14270	0,00477	0,00658	14
31	Pemerintah Kabupaten Pati	2018	19,35972	20,88132	0,04904	0,00247	0,00269	12
		2019	15,66440	17,09308	0,03981	0,00248	0,00268	5
		2020	9,03965	10,57996	0,02681	0,00281	0,00301	17
		2021	5,80884	6,55038	0,03572	0,00648	0,00703	5
		2022	8,17108	9,26807	0,03039	0,00369	0,00399	8
32	Pemerintah Kabupaten Jepara	2018	3,01425	4,09481	0,02468	0,00804	0,00873	9
		2019	4,11170	4,53907	0,02905	0,00828	0,00900	13
		2020	5,97818	6,58357	0,04065	0,00733	0,00811	9
		2021	6,60065	7,28433	0,04250	0,00681	0,00753	4
		2022	4,38563	5,84572	0,02707	0,00562	0,00606	6

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
33	Pemerintah Kota Denpasar	2018	26,32285	28,24412	0,10091	0,00372	0,00455	6
		2019	14,59758	16,01553	0,07995	0,00535	0,00638	4
		2020	22,83759	24,57218	0,09374	0,00399	0,00486	4
		2021	13,36799	14,75714	0,10684	0,00783	0,00955	13
		2022	33,07374	35,72450	0,11822	0,00342	0,00424	16
34	Pemerintah Kabupaten Siak	2018	36,74752	39,53605	0,05925	0,00154	0,00208	9
		2019	73,94789	77,78547	0,11052	0,00144	0,00206	14
		2020	10,26429	11,74079	0,06355	0,01043	0,01383	16
		2021	20,34501	22,44090	0,10107	0,00862	0,01223	9
		2022	16,55727	20,29348	0,05653	0,00610	0,00879	20
35	Pemerintah Kabupaten Gresik	2018	9,60742	10,06806	0,07386	0,01299	0,01618	11
		2019	47,33262	50,80449	0,09518	0,00522	0,00668	10
		2020	14,62285	18,47030	0,07988	0,00459	0,00580	13
		2021	9,19188	10,47163	0,07050	0,00750	0,00932	6
		2022	3,33462	4,14488	0,03116	0,01001	0,01191	16
36	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	2018	1,88847	2,07780	0,02879	0,02745	0,02885	25
		2019	8,71604	9,18570	0,09060	0,01119	0,01257	9
		2020	11,10690	11,52769	0,11589	0,01113	0,01321	24
		2021	6,90577	7,46676	0,08489	0,01330	0,01513	15
		2022	6,29521	6,66934	0,11745	0,02115	0,02874	18

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
37	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	2018	14,65106	16,06423	0,08072	0,00539	0,00597	12
		2019	8,02822	8,86816	0,07340	0,00942	0,01034	14
		2020	12,56678	14,21606	0,07645	0,00582	0,00641	9
		2021	7,23913	8,17592	0,09881	0,01396	0,01580	8
		2022	6,10944	6,71459	0,07673	0,01361	0,01507	11
38	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	2018	3,22924	3,33828	0,02858	0,01237	0,01297	13
		2019	14,66714	16,06328	0,07416	0,00495	0,00545	16
		2020	5,12595	5,51358	0,04036	0,00902	0,00966	15
		2021	10,29029	12,42211	0,05393	0,00474	0,00524	7
		2022	1,35067	1,72683	0,00820	0,01142	0,01221	22
39	Pemerintah Kota Banda Aceh	2018	2,78880	3,13473	0,01073	0,01113	0,01172	11
		2019	2,15147	2,39200	0,01045	0,01343	0,01461	13
		2020	0,59919	0,75175	-0,00493	0,03090	0,03286	12
		2021	0,75235	0,90805	-0,00225	0,03366	0,03521	19
		2022	0,65458	0,80113	-0,00453	0,03013	0,03181	20
40	Pemerintah Kabupaten Merauke	2018	9,66305	11,95820	0,05507	0,00505	0,00636	15
		2019	8,44506	9,49661	0,04320	0,00511	0,00639	8
		2020	0,96882	1,51329	0,00659	0,01300	0,01569	5
		2021	4,29986	4,82848	0,03226	0,00850	0,01060	3
		2022	2,50688	2,71774	0,04081	0,04414	0,05446	7

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
41	Pemerintah Kota Banjarmasin	2018	35,76810	36,66468	0,10662	0,01376	0,01943	10
		2019	11,33044	11,89336	0,07499	0,00693	0,00943	10
		2020	5,86675	6,33467	0,06441	0,01222	0,01611	17
		2021	8,70728	9,29439	0,05622	0,00682	0,00887	16
		2022	6,09566	6,64381	0,04123	0,00736	0,00944	12
42	Pemerintah Kabupaten Mimika	2018	16,35106	17,10152	0,14196	0,00889	0,01088	14
		2019	1,84146	1,92535	0,06915	0,08077	0,08973	9
		2020	0,57284	0,61291	-0,06880	0,21615	0,20499	7
		2021	4,79912	5,19465	0,05395	0,01303	0,01413	4
		2022	8,69756	9,31346	0,13450	0,01644	0,02233	11
43	Pemerintah Kabupaten Demak	2018	11,65649	12,59187	0,05288	0,00458	0,00508	9
		2019	12,59178	13,56313	0,05505	0,00440	0,00496	6
		2020	19,75619	22,03588	0,05975	0,00285	0,00244	4
		2021	9,00459	10,15821	0,05421	0,00595	0,00492	3
		2022	8,09838	10,33803	0,03691	0,00397	0,00442	5
44	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2018	17,22459	20,63770	0,09416	0,02386	0,02837	22
		2019	18,48239	23,39783	0,11691	0,02039	0,02466	6
		2020	17,37986	22,60911	0,10800	0,01768	0,02110	10
		2021	20,95610	26,58614	0,10927	0,01439	0,01710	12
		2022	56,92519	68,30450	0,14625	0,01015	0,01299	12

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
45	Pemerintah Kabupaten Lamongan	2018	6,06808	6,70021	0,03413	0,00602	0,00758	15
		2019	4,46378	4,91855	0,03511	0,00904	0,01126	10
		2020	1,57664	1,92772	0,01061	0,01157	0,01394	14
		2021	2,76172	3,22679	0,03524	0,01608	0,01982	13
		2022	0,59732	0,69540	-0,01090	0,03710	0,04338	12
46	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	2018	0,04626	0,17173	-0,04605	0,05886	0,05894	14
		2019	9,03212	9,76568	0,06607	0,00759	0,00868	10
		2020	2,37964	13,15560	0,01015	0,00084	0,00090	11
		2021	0,31537	0,41604	-0,01936	0,03429	0,03575	16
		2022	28,52433	32,87085	0,02513	0,00079	0,00087	18
47	Pemerintah Kabupaten Nunukan	2018	0,65375	0,71309	-0,01136	0,04124	0,04443	8
		2019	0,54501	0,63766	-0,01407	0,04039	0,04308	13
		2020	0,62063	0,87180	-0,00477	0,03867	0,04153	13
		2021	1,08161	1,27662	0,00974	0,03649	0,03976	8
		2022	1,17422	1,44791	0,01359	0,03130	0,03531	17

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
48	Pemerintah Kabupaten Malinau	2018	22,42425	34,92586	0,03988	0,00118	0,00130	6
		2019	12,27450	14,74927	0,05285	0,00384	0,00434	12
		2020	5,88546	7,81432	0,03904	0,00576	0,00640	13
		2021	4,65195	5,58104	0,03900	0,00859	0,00940	14
		2022	7,16728	9,10578	0,06878	0,00856	0,01012	11
49	Pemerintah Kabupaten Karawang	2018	4,97461	5,69310	0,07435	0,01610	0,01854	23
		2019	6,38798	7,04446	0,07144	0,01196	0,01415	18
		2020	10,04412	10,86434	0,10283	0,01053	0,12909	16
		2021	14,17630	17,26452	0,15665	0,00973	0,01269	13
		2022	11,30908	13,75507	0,11123	0,00880	0,01062	11
50	Pemerintah Kota Kendari	2018	0,98908	1,07323	0,00202	0,02831	0,02910	8
		2019	0,59905	0,65229	-0,01650	0,04981	0,05038	8
		2020	1,54816	1,68503	0,01963	0,03087	0,03232	17
		2021	1,77434	1,90670	0,02261	0,04318	0,04466	23
		2022	2,03944	2,18540	0,02904	0,08963	0,08930	16
51	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2018	18,65969	20,43849	0,06796	0,00351	0,00387	11
		2019	25,69618	26,70634	0,13362	0,00523	0,00628	17
		2020	21,25088	23,12712	0,08928	0,00405	0,00467	16
		2021	12,00821	13,61133	0,06550	0,00522	0,00587	18
		2022	4,50757	6,12204	0,05204	0,01026	0,01149	21

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
52	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	2018	27,78944	29,20621	0,07645	0,00272	0,00327	8
		2019	20,44743	21,34792	0,09091	0,00449	0,00534	7
		2020	14,27036	15,16434	0,06916	0,00491	0,00570	12
		2021	9,95515	11,13405	0,06665	0,00662	0,00764	11
		2022	20,38042	22,34514	0,05524	0,00259	0,00298	5
53	Pemerintah Kabupaten Majalengka	2018	2,17669	2,37491	0,03577	0,02671	0,02965	11
		2019	3,19413	3,54378	0,03403	0,01356	0,01498	11
		2020	3,28992	3,83990	0,03212	0,01144	0,01256	16
		2021	1,90502	2,34917	0,02378	0,01794	0,01953	10
		2022	2,69853	3,50262	0,02375	0,00958	0,01048	12
54	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2018	2,63506	3,46289	0,02242	0,01520	0,01717	12
		2019	1,44888	1,89863	0,01194	0,01463	0,01580	11
		2020	2,67444	3,30690	0,02225	0,01123	0,01233	15
		2021	7,06153	7,80577	0,04773	0,00706	0,00815	15
		2022	4,02124	4,72503	0,03514	0,00952	0,01092	15
55	Pemerintah Kota Bontang	2018	13,53426	15,48544	0,07335	0,00509	0,00598	8
		2019	7,41309	9,00846	0,05002	0,00628	0,00737	9
		2020	7,24087	8,98507	0,07470	0,00944	0,01142	17
		2021	4,98840	6,84546	0,04246	0,00732	0,00854	13
		2022	19,92141	22,46763	0,09191	0,00430	0,00596	14

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
56	Pemerintah Kabupaten Garut	2018	3,98961	6,11084	0,08107	0,01612	0,02233	15
		2019	15,82957	16,85550	0,08385	0,00532	0,00762	10
		2020	11,72110	13,10865	0,06546	0,00544	0,00655	18
		2021	4,87570	5,59010	0,05929	0,01309	0,01550	20
		2022	19,89411	43,87773	0,13075	0,00306	0,00375	12
57	Pemerintah Kabupaten Subang	2018	3,57787	4,87323	0,03351	0,00873	0,01040	13
		2019	1,46525	2,02850	0,02766	0,02763	0,03269	14
		2020	3,81571	4,45791	0,05737	0,01687	0,02117	18
		2021	4,72986	5,53822	0,06064	0,01354	0,01708	11
		2022	3,26936	3,72160	0,04375	0,01634	0,02040	12
58	Pemerintah Kabupaten Cilacap	2018	9,29525	10,44969	0,08154	0,00870	0,01169	13
		2019	7,32288	8,17904	0,05762	0,00809	0,01175	8
		2020	12,97552	14,01435	0,06824	0,00527	0,00756	14
		2021	5,76534	6,50688	0,05548	0,01018	0,01428	8
		2022	7,09694	8,82447	0,03745	0,00481	0,00660	9
59	Pemerintah Kabupaten Ketapang	2018	1,45869	1,56778	0,01656	0,03005	0,03480	9
		2019	2,57365	2,74297	0,03094	0,01807	0,02087	12
		2020	3,27345	3,47110	0,05257	0,02174	0,02580	10
		2021	6,95369	7,37366	0,08392	0,01334	0,01652	13
		2022	8,01637	8,35565	0,08832	0,01215	0,01549	12

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
60	Pemerintah Kabupaten Kebumen	2018	13,45301	15,25190	0,06100	0,00430	0,00506	13
		2019	9,37781	10,65056	0,06031	0,00629	0,00713	7
		2020	6,70392	7,65710	0,06147	0,00932	0,01063	12
		2021	5,73182	6,46222	0,07472	0,01387	0,01606	9
		2022	7,80676	9,43502	0,06667	0,00797	0,00924	3
61	Pemerintah Kabupaten Sleman	2018	42,71235	46,78897	0,12488	0,00359	0,00488	11
		2019	67,80556	73,40341	0,11576	0,00160	0,00217	9
		2020	100,45198	114,80624	0,11408	0,00100	0,00135	5
		2021	201,15659	227,47375	0,11491	0,00051	0,00067	5
		2022	125,78348	146,12243	0,07771	0,00054	0,00069	7
62	Pemerintah Kota Cilegon	2018	13,64906	14,48084	0,06387	0,00476	0,00771	7
		2019	7,69783	8,24461	0,04891	0,00680	0,01064	11
		2020	20,29128	21,04673	0,10504	0,00527	0,00878	4
		2021	14,11316	14,63596	0,12853	0,00952	0,01615	7
		2022	35,70880	37,87120	0,10514	0,00286	0,00475	13
63	Pemerintah Kabupaten Kediri	2018	67,75748	71,89377	0,14088	0,00199	0,00239	14
		2019	37,33436	40,29036	0,12877	0,00329	0,00393	9
		2020	58,18137	63,04489	0,13396	0,00216	0,00259	11
		2021	20,48078	21,87479	0,13111	0,00632	0,00750	19
		2022	21,52960	24,66121	0,09495	0,00403	0,00463	10

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
64	Pemerintah Kabupaten Sorong	2018	50,30297	53,12003	0,06024	0,00116	0,00126	16
		2019	9,44081	9,75177	0,06053	0,04738	0,04940	6
		2020	3,79206	3,96697	0,05910	0,05408	0,05675	8
		2021	2,93730	3,10528	0,04459	0,03601	0,03796	15
		2022	3,75523	3,97153	0,04215	0,01439	0,01616	12
65	Pemerintah Kabupaten Semarang	2018	10,55797	11,37026	0,05753	0,00622	0,00688	4
		2019	7,23596	7,75458	0,05287	0,00789	0,00865	9
		2020	7,46423	8,17299	0,05773	0,00811	0,00893	8
		2021	6,31048	6,70186	0,07843	0,01395	0,01567	6
		2022	7,70284	8,70325	0,04589	0,00599	0,00683	9
66	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	2018	10,83307	12,74739	0,04004	0,00342	0,00366	14
		2019	4,95770	6,10153	0,03184	0,00628	0,00667	6
		2020	3,95873	5,24746	0,02022	0,00478	0,00502	4
		2021	4,31313	5,56517	0,02406	0,00530	0,00560	9
		2022	2,89335	4,30700	0,02359	0,00718	0,00762	7
67	Pemerintah Kota Batam	2018	3,41500	3,91791	0,05727	0,02002	0,02227	11
		2019	4,91491	5,38854	0,07127	0,01651	0,01838	12
		2020	31,89074	35,55864	0,11296	0,00328	0,00382	15
		2021	13,55186	16,17656	0,06894	0,00456	0,00503	11
		2022	9,21294	10,87081	0,03540	0,00360	0,00381	12

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
68	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2018	4,78699	5,42175	0,07382	0,01698	0,01974	18
		2019	4,42957	4,99379	0,05814	0,01477	0,01792	15
		2020	2,10971	2,35873	0,03248	0,02449	0,02854	20
		2021	11,92118	15,09978	0,06014	0,00428	0,00509	14
		2022	8,52066	10,49026	0,05299	0,00561	0,00664	14
69	Pemerintah Kabupaten Kudus	2018	7,43407	8,24565	0,04684	0,00651	0,00724	11
		2019	5,34421	5,99401	0,05107	0,01033	0,01155	8
		2020	9,39537	10,41960	0,07972	0,00854	0,00976	13
		2021	17,35827	19,08900	0,12514	0,00697	0,00836	6
		2022	24,37274	26,76182	0,09554	0,00372	0,00433	6
70	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2018	3,20306	4,41684	0,03705	0,01096	0,01268	7
		2019	6,13463	7,21432	0,08093	0,01319	0,01599	11
		2020	7,98861	9,31171	0,09890	0,01204	0,01499	13
		2021	6,88224	7,80532	0,10164	0,01516	0,01911	12
		2022	4,42615	5,12880	0,07217	0,01779	0,02203	11
71	Pemerintah Kabupaten Lebak	2018	10,78695	16,45133	0,10938	0,00713	0,00832	4
		2019	7,85436	13,81129	0,12823	0,01011	0,01213	6
		2020	17,34372	20,71775	0,10124	0,00516	0,00598	7
		2021	16,41851	20,22870	0,09158	0,00479	0,00549	13
		2022	10,24321	12,38989	0,07436	0,00657	0,00754	13

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
72	Pemerintah Kota Yogyakarta	2018	17,57041	19,88649	0,08095	0,00430	0,00543	14
		2019	26,18092	29,23872	0,07986	0,00284	0,00362	8
		2020	52,21572	57,54367	0,11620	0,00206	0,00274	4
		2021	38,38532	43,40221	0,11334	0,00268	0,00360	7
		2022	36,71122	40,63770	0,08363	0,00211	0,00268	8
73	Pemerintah Kabupaten Kampar	2018	13,03541	13,71861	0,06320	0,00499	0,00566	10
		2019	17,63989	18,33095	0,09658	0,00560	0,00657	8
		2020	8,33136	9,01132	0,06205	0,00781	0,00879	20
		2021	6,32244	7,57444	0,03775	0,00577	0,00637	15
		2022	2,72568	3,53018	0,02253	0,00899	0,00988	24
74	Pemerintah Kabupaten Madiun	2018	14,64905	16,20118	0,05634	0,00372	0,00419	8
		2019	17,30732	18,76134	0,06213	0,00351	0,00390	7
		2020	17,35036	19,41719	0,06728	0,00367	0,00410	8
		2021	13,94773	14,97759	0,09112	0,00656	0,00755	10
		2022	10,41530	11,55120	0,05733	0,00546	0,00614	11
75	Pemerintah Kabupaten Sintang	2018	10,78868	11,31469	0,06765	0,00660	0,00734	13
		2019	5,66888	6,12301	0,03975	0,00782	0,00844	11
		2020	2,47324	3,70300	0,01957	0,00729	0,00770	9
		2021	5,82968	6,92134	0,05691	0,00970	0,01067	11
		2022	7,54264	9,09230	0,03959	0,00492	0,00531	14

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	QR	CR	WCTA	DTE	DTA	Temuan Audit Negatif
76	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	2018	9,78772	10,33906	0,07107	0,00767	0,00929	11
		2019	9,60127	11,96898	0,06513	0,00597	0,00741	18
		2020	0,65026	1,40003	0,01299	0,05541	0,06222	15
		2021	0,56728	0,94098	-0,00344	0,09419	0,10207	16
		2022	2,38773	3,23284	0,03304	0,05603	0,06344	22
77	Pemerintah Kabupaten Cirebon	2018	5,82004	6,67801	0,10540	0,01891	0,02221	13
		2019	7,77403	8,67754	0,09587	0,01265	0,01454	10
		2020	6,54191	7,46758	0,09948	0,01562	0,01875	14
		2021	3,91522	4,31185	0,10074	0,03137	0,03777	13
		2022	5,25586	5,87013	0,08115	0,01693	0,01981	14
78	Pemerintah Kabupaten Blitar	2018	16,92568	18,38938	0,07646	0,00442	0,00490	9
		2019	7,77622	8,88118	0,06316	0,00808	0,00881	8
		2020	4,76709	5,69138	0,04888	0,01053	0,01131	12
		2021	7,60576	8,41208	0,08614	0,01176	0,01325	14
		2022	8,39599	9,45024	0,06983	0,00833	0,00927	9
79	Pemerintah Kabupaten Klaten	2018	31,32545	37,78504	0,13041	0,00356	0,00437	17
		2019	30,21619	36,91875	0,12404	0,00347	0,00437	6
		2020	23,99798	31,95199	0,18116	0,00589	0,00816	11
		2021	71,99030	82,08906	0,19230	0,00238	0,00337	4
		2022	48,37773	53,72216	0,17251	0,00328	0,00453	4

Lampiran 4

Uji Setelah Eliminasi *Outlier* dan Transformasi

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
1	Pemerintah Kota Surabaya	2018	1,05760	1,16652	-1,46258	-4,30768	-4,19678	1,09861
		2019	0,70975	0,85080	-1,42058	-4,21977	-4,13238	1,09861
		2020						
		2021	0,93288	1,07462	-1,46849	-4,12314	-4,02989	1,38629
		2022	0,45811	0,69442	-1,39806	-4,26194	-4,08595	1,38629
2	Pemerintah Kota Bandung	2018	0,95973	1,06257	-1,39557	-4,95009	-4,88922	1,38629
		2019	1,02042	1,14174	-1,38311	-5,33641	-5,26538	1,38629
		2020	1,62457	1,73503	-1,41449	-5,55666	-5,47386	1,38629
		2021	1,86546	1,97255	-1,43963	-5,54878	-5,46868	1,38629
		2022	1,90285	2,05776	-1,43871	-5,65663	-5,58159	1,38629
3	Pemerintah Kota Semarang	2018	2,14537	2,23618	-1,41577	-5,97809	-5,93374	1,38629
		2019	2,15006	2,23228	-1,48008	-5,47941	-5,39575	1,38629
		2020	2,31657	2,37345	-1,52033	-5,23606	-5,14326	1,38629
		2021	2,18029	2,27336	-1,51659	-5,22502	-5,12899	1,38629
		2022	2,86345	2,94790	-1,51373	-5,77437	-5,67572	1,38629
4	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2018	4,01965	4,07371	-1,54938	-7,07923	-7,01392	1,38629
		2019	3,91162	3,98292	-1,51114	-7,17347	-7,11953	1,60944
		2020	1,92172	2,01501	-1,47670	-5,28975	-5,24179	1,60944
		2021	2,97703	3,04985	-1,54528	-6,04054	-5,97758	1,60944
		2022	3,61269	3,66892	-1,55837	-6,62692	-6,56014	1,60944

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
5	Pemerintah Kota Samarinda	2018	1,49832	1,54480	-1,43714	-4,41026	-4,34088	1,60944
		2019	2,15505	2,18625	-1,49970	-4,57041	-4,46870	1,60944
		2020	1,91887	1,97678	-1,48711	-4,49854	-4,40162	1,60944
		2021	1,24449	1,34303	-1,43407	-4,31276	-4,23068	1,79176
		2022	2,56773	2,60994	-1,60519	-4,63538	-4,49260	1,79176
6	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	2018	1,31065	1,37885	-1,73204	-3,53585	-3,37674	1,79176
		2019	1,41663	1,47976	-1,78860	-3,55976	-3,37717	1,79176
		2020	0,89360	0,98465	-1,60947	-3,27649	-3,12756	1,79176
		2021	1,41301	1,60465	-1,60352	-4,18153	-4,03659	1,79176
		2022						
7	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	2018	2,86825	2,91822	-1,67499	-5,46622	-5,32624	1,79176
		2019	2,77318	2,81082	-1,65623	-5,40135	-5,27550	1,79176
		2020	2,62424	2,67463	-1,62869	-5,30910	-5,18768	1,79176
		2021	2,44820	2,52833	-1,57707	-5,37664	-5,27158	1,79176
		2022	2,03639	2,12298	-1,48408	-5,36350	-5,27734	1,79176
8	Pemerintah Kota Palembang	2018	0,33054	0,44521	-1,39427	-3,76465	-3,62561	1,79176
		2019	-0,17109	0,00046	-1,34323	-3,96549	-3,62005	1,79176
		2020	0,22018	0,37642	-1,37042	-4,16223	-3,87724	1,79176
		2021	0,45336	0,56600	-1,40908	-3,80094	-3,68947	1,79176
		2022	1,13812	1,19872	-1,48113	-4,01504	-3,88188	1,79176
9	Pemerintah Kabupaten Tangerang	2018	2,73941	3,00418	-1,78504	-5,31867	-5,10807	1,79176
		2019	2,66554	2,80961	-1,60336	-5,55847	-5,40542	1,79176
		2020	3,53833	3,71574	-1,63605	-6,39786	-6,25473	1,94591
		2021	3,51691	3,62237	-1,65729	-6,24450	-6,10169	1,94591
		2022	3,85558	3,98523	-1,69786	-6,51311	-6,36502	1,94591

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
10	Pemerintah Kabupaten Badung	2018	0,10434	0,46242	-1,47349	-2,85864	-2,61918	1,94591
		2019	1,77048	2,09106	-1,61911	-4,71591	-4,44724	1,94591
		2020	2,58888	2,84851	-1,60260	-5,60464	-5,39371	1,94591
		2021	1,73433	2,04088	-1,56572	-4,84902	-4,64604	1,94591
		2022	2,29694	2,33819	-1,75951	-4,64762	-4,41386	1,94591
11	Pemerintah Kabupaten Bekasi	2018	3,29365	3,33113	-1,87629	-5,51771	-5,27598	1,94591
		2019	3,18786	3,22600	-1,94240	-5,32063	-5,07131	1,94591
		2020	1,54736	1,61513	-1,68673	-3,95291	-3,71088	1,94591
		2021	2,98051	3,05945	-1,91199	-5,18419	-4,94688	1,94591
		2022	3,24902	3,30619	-1,75698	-5,69085	-5,47972	1,94591
12	Pemerintah Kota Balikpapan	2018	2,28657	2,33113	-1,50805	-5,45179	-5,32815	1,94591
		2019	2,40108	2,44862	-1,50950	-5,57359	-5,45396	1,94591
		2020	3,01172	3,10462	-1,67693	-5,65809	-5,50167	1,94591
		2021	2,25931	2,43842	-1,64361	-5,03281	-4,88079	1,94591
		2022	2,97700	3,07511	-1,66753	-5,65129	-5,45244	1,94591
13	Pemerintah Kabupaten Bandung	2018	2,54789	2,61134	-1,76056	-4,94640	-4,79799	1,94591
		2019	2,37787	2,43867	-1,71872	-4,84402	-4,70504	1,94591
		2020	2,22806	2,32732	-1,67211	-4,83184	-4,67024	1,94591
		2021	2,46318	2,58728	-1,79868	-4,84997	-4,66682	1,94591
		2022	2,07912	2,20625	-1,65340	-4,74575	-4,58062	2,07944
14	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2018	0,51697	0,69369	-1,35378	-5,53010	-5,52702	2,07944
		2019	1,83827	1,93475	-1,36934	-6,77791	-6,76731	2,07944
		2020	-0,47406	-0,20622	-1,34028	-5,49402	-5,49075	2,07944
		2021	-0,00992	0,16977	-1,34593	-5,55501	-5,54948	2,07944
		2022	0,42092	0,64666	-1,35715	-5,52283	-5,51146	2,07944

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
15	Pemerintah Kota Depok	2018	4,16886	4,19789	-1,98835	-6,25131	-6,04696	2,07944
		2019	3,24874	3,28210	-1,82899	-5,53399	-5,35175	2,07944
		2020	3,43425	3,49599	-1,70855	-5,98124	-5,82803	2,07944
		2021	2,35297	2,41429	-1,70452	-4,84208	-4,69303	2,07944
		2022	3,33049	3,38782	-1,67131	-5,95495	-5,80991	2,07944
16	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	2018	1,85702	2,60178	-1,59384	-5,36973	-5,22567	2,07944
		2019	3,45614	3,74510	-1,84118	-5,99776	-5,81517	2,07944
		2020	2,02076	2,11536	-1,62824	-4,71540	-4,55873	2,07944
		2021	2,05482	2,11981	-1,99395	-4,05534	-3,82546	2,07944
		2022	0,66868	0,85132	-1,45860	-3,83298	-3,66896	2,07944
17	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2018						
		2019						
		2020						
		2021						
		2022						
18	Pemerintah Kota Bogor	2018	2,84993	2,89563	-1,65253	-4,24187	-4,07781	2,07944
		2019	2,66216	2,70856	-1,70593	-4,24695	-4,08600	2,07944
		2020	2,90633	2,96446	-1,71269	-4,45060	-4,29130	2,07944
		2021	2,48899	2,54015	-1,72956	-4,09929	-3,94949	2,07944
		2022	2,31797	2,38681	-1,58834	-4,27116	-4,12121	2,19722
19	Pemerintah Kabupaten Berau	2018	2,41483	2,43118	-1,85421	-4,58823	-4,40415	2,19722
		2019	2,93277	2,96781	-1,80647	-5,24512	-5,08034	2,19722
		2020	3,54849	3,62712	-1,67426	-6,20776	-6,04579	2,19722
		2021	4,67623	4,76339	-1,71548	-7,26578	-7,09254	2,19722
		2022	3,93205	4,04281	-1,79012	-6,38715	-6,03781	2,19722

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
20	Pemerintah Kota Tangerang	2018	4,40529	4,51339	-1,88194	-6,72019	-6,56880	2,19722
		2019	4,34906	4,45856	-1,77325	-6,84022	-6,70871	2,19722
		2020	4,74432	4,81047	-1,97235	-6,90600	-6,73230	2,19722
		2021	4,27132	4,35716	-1,66148	-6,98626	-6,88812	2,19722
		2022	2,81146	2,90185	-1,55361	-5,84787	-5,77518	2,19722
21	Pemerintah Kota Surakarta	2018	1,88579	1,95709	-1,47270	-5,23922	-5,10615	2,19722
		2019	1,37259	1,38554	-1,40284	-5,28472	-5,20291	2,19722
		2020	1,62106	1,73802	-1,47082	-5,00288	-4,88968	2,19722
		2021	2,19064	2,36017	-1,49155	-5,58187	-5,46619	2,19722
		2022	1,98630	2,18575	-1,45853	-5,62320	-5,51917	2,19722
22	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	2018	1,69424	1,78476	-1,58251	-4,48020	-4,38076	2,19722
		2019	1,16027	1,25521	-1,51213	-4,10812	-4,04737	2,19722
		2020	1,41319	1,52035	-1,59600	-4,09928	-4,01674	2,19722
		2021	0,62126	0,77017	-1,53059	-3,21930	-3,14988	2,19722
		2022	2,04981	2,15754	-1,67120	-4,64253	-4,54476	2,19722
23	Pemerintah Kota Pontianak	2018	1,99739	2,15752	-1,44604	-5,69920	-5,60851	2,19722
		2019	2,23998	2,38892	-1,49674	-5,58104	-5,47995	2,19722
		2020	1,05454	1,59891	-1,41633	-5,35658	-5,27494	2,19722
		2021	0,19207	0,69870	-1,40871	-3,79779	-3,72069	2,19722
		2022	-0,07925	0,57930	-1,39482	-4,07356	-3,99112	2,19722
24	Pemerintah Kota Pekanbaru	2018	-0,59834	-0,38968	-1,30220	-3,35151	-3,26740	2,19722
		2019	-0,27611	-0,09262	-1,32924	-3,14069	-3,09360	2,19722
		2020	-0,30284	-0,01903	-1,34040	-3,21082	-3,14418	2,19722
		2021	-0,49583	0,02644	-1,34634	-3,45515	-3,38845	2,19722
		2022	0,25530	0,70306	-1,43661	-3,75685	-3,63919	2,19722

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
25	Pemerintah Kota Padang	2018	1,87445	1,98667	-1,46080	-4,77488	-4,68415	2,19722
		2019	1,53647	1,67430	-1,41924	-5,41977	-5,34093	2,30259
		2020	1,79195	2,04247	-1,44464	-5,58153	-5,49679	2,30259
		2021	1,45006	1,68727	-1,42488	-5,36673	-5,27586	2,30259
		2022	1,58345	1,77612	-1,41574	-4,72477	-4,64090	2,30259
26	Pemerintah Kabupaten Malang	2018	2,53599	2,60300	-1,65626	-5,10943	-4,98106	2,30259
		2019	2,59257	2,67537	-1,68001	-5,14933	-5,00984	2,30259
		2020	2,05765	2,21767	-1,70043	-4,74682	-4,61971	2,30259
		2021	2,40553	2,53296	-1,86444	-4,56440	-4,36954	2,30259
		2022	1,45897	1,68624	-1,57248	-4,39763	-4,26935	2,30259
27	Pemerintah Kabupaten Tuban	2018	2,62975	2,69947	-1,57751	-5,53508	-5,44397	2,30259
		2019	3,01198	3,14975	-1,65653	-5,75667	-5,65499	2,30259
		2020	3,22666	3,31328	-1,72106	-5,77251	-5,65545	2,30259
		2021	2,80219	2,87006	-1,85717	-5,06015	-4,91828	2,30259
		2022	3,48527	3,54964	-1,79136	-5,87921	-5,74430	2,30259
28	Pemerintah Kabupaten Banyumas	2018	2,06436	2,18044	-1,59546	-4,89721	-4,76354	2,30259
		2019	1,98142	2,10342	-1,58218	-4,85718	-4,70829	2,30259
		2020	1,99285	2,12849	-1,60852	-4,79326	-4,64549	2,30259
		2021	1,13300	1,23415	-1,56935	-3,43764	-3,31115	2,30259
		2022	1,80326	1,96708	-1,52422	-3,40483	-3,29987	2,30259
29	Pemerintah Kota Malang	2018	3,72011	3,76058	-1,77373	-6,12834	-5,94623	2,30259
		2019	4,24114	4,26448	-2,05348	-6,26792	-6,02515	2,30259
		2020	3,93718	3,99890	-1,86942	-6,21522	-6,00647	2,30259
		2021	3,22637	3,30884	-1,68520	-5,85099	-5,68820	2,30259
		2022	2,63401	2,71982	-1,65801	-5,29893	-5,13547	2,30259

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
30	Pemerintah Kabupaten Paser	2018	3,77447	3,94272	-1,66510	-6,55505	-6,40370	2,30259
		2019	2,39167	2,49930	-1,86164	-4,65226	-4,46760	2,30259
		2020	2,94537	3,22822	-1,87129	-5,41750	-5,23686	2,30259
		2021	2,05379	2,38900	-1,69375	-4,84657	-4,69770	2,30259
		2022	3,32758	3,43639	-2,13447	-5,34591	-5,02432	2,30259
31	Pemerintah Kabupaten Pati	2018	2,96319	3,03886	-1,55132	-6,00237	-5,91858	2,30259
		2019	2,75139	2,83867	-1,50869	-5,99955	-5,92295	2,39790
		2020	2,20162	2,35896	-1,45158	-5,87583	-5,80512	2,39790
		2021	1,75938	1,87952	-1,49036	-5,03952	-4,95765	2,39790
		2022	2,10060	2,22657	-1,46697	-5,60245	-5,52306	2,39790
32	Pemerintah Kabupaten Jepara	2018	1,10335	1,40972	-1,44254	-4,82338	-4,74121	2,39790
		2019	1,41384	1,51272	-1,46120	-4,79430	-4,71058	2,39790
		2020	1,78812	1,88458	-1,51251	-4,91521	-4,81460	2,39790
		2021	1,88717	1,98573	-1,52091	-4,98962	-4,88825	2,39790
		2022	1,47833	1,76571	-1,45270	-5,18174	-5,10680	2,39790
33	Pemerintah Kota Denpasar	2018	3,27044	3,34089	-1,83193	-5,59469	-5,39169	2,39790
		2019	2,68086	2,77356	-1,70894	-5,23007	-5,05449	2,39790
		2020	3,12841	3,20161	-1,78817	-5,52327	-5,32700	2,39790
		2021	2,59286	2,69173	-1,86971	-4,85017	-4,65132	2,39790
		2022	3,49874	3,57584	-1,94641	-5,67921	-5,46263	2,39790
34	Pemerintah Kabupaten Siak	2018	3,60407	3,67721	-1,60070	-6,47597	-6,17602	2,39790
		2019	4,30336	4,35395	-1,89384	-6,54216	-6,18651	2,39790
		2020	2,32867	2,46307	-1,62223	-4,56326	-4,28105	2,39790
		2021	3,01284	3,11089	-1,83295	-4,75325	-4,40379	2,39790
		2022	2,80683	3,01030	-1,58729	-5,10012	-4,73428	2,39790

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
35	Pemerintah Kabupaten Gresik	2018	2,26254	2,30937	-1,67582	-4,34394	-4,12415	2,39790
		2019	3,85720	3,92798	-1,79681	-5,25573	-5,00842	2,39790
		2020	2,68259	2,91616	-1,70856	-5,38309	-5,15066	2,39790
		2021	2,21832	2,34867	-1,65806	-4,89294	-4,67523	2,39790
		2022	1,20436	1,42187	-1,47033	-4,60440	-4,43066	2,39790
36	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	2018	0,63577	0,73131	-1,46007	-3,59554	-3,54568	2,39790
		2019	2,16517	2,21765	-1,76955	-4,49255	-4,37621	2,39790
		2020	2,40757	2,44475	-1,93020	-4,49804	-4,32670	2,39790
		2021	1,93236	2,01046	-1,73662	-4,31980	-4,19091	2,39790
		2022	1,83979	1,89752	-1,94099	-3,85589	-3,54938	2,39790
37	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	2018	2,68451	2,77660	-1,71319	-5,22372	-5,12171	2,39790
		2019	2,08296	2,18247	-1,67338	-4,66531	-4,57154	2,39790
		2020	2,53106	2,65437	-1,68979	-5,14672	-5,05029	2,39790
		2021	1,97950	2,10119	-1,81891	-4,27145	-4,14806	2,39790
		2022	1,80984	1,90428	-1,69128	-4,29703	-4,19509	2,39790
38	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	2018	1,17225	1,20546	-1,45916	-4,39220	-4,34481	2,39790
		2019	2,68561	2,77654	-1,67744	-5,30889	-5,21271	2,39790
		2020	1,63432	1,70721	-1,51117	-4,70805	-4,63962	2,39790
		2021	2,33120	2,51948	-1,57463	-5,35096	-5,25058	2,39790
		2022	0,30060	0,54629	-1,37513	-4,47269	-4,40583	2,39790
39	Pemerintah Kota Banda Aceh	2018	1,02561	1,14254	-1,38517	-4,49798	-4,44634	2,39790
		2019	0,76615	0,87213	-1,38407	-4,31040	-4,22585	2,39790
		2020	-0,51218	-0,28536	-1,32448	-3,47705	-3,41554	2,39790
		2021	-0,28455	-0,09645	-1,33461	-3,39137	-3,34641	2,39790
		2022	-0,42377	-0,22173	-1,32600	-3,50226	-3,44789	2,39790

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
40	Pemerintah Kabupaten Merauke	2018	2,26831	2,48142	-1,58019	-5,28812	-5,05727	2,39790
		2019	2,13358	2,25093	-1,52414	-5,27645	-5,05312	2,39790
		2020	-0,03167	0,41429	-1,36876	-4,34283	-4,15505	2,39790
		2021	1,45858	1,57453	-1,47511	-4,76808	-4,54727	2,48491
		2022	0,91904	0,99980	-1,51324	-3,12041	-2,91022	2,48491
41	Pemerintah Kota Banjarmasin	2018	3,57706	3,60181	-1,86829	-4,28599	-3,94102	2,48491
		2019	2,42749	2,47598	-1,68189	-4,97168	-4,66390	2,48491
		2020	1,76930	1,84604	-1,62661	-4,40450	-4,12815	2,48491
		2021	2,16416	2,22941	-1,58577	-4,98726	-4,72544	2,48491
		2022	1,80758	1,89369	-1,51513	-4,91178	-4,66229	2,48491
42	Pemerintah Kabupaten Mimika	2018	2,79429	2,83917	-2,12819	-4,72229	-4,52103	2,48491
		2019	0,61056	0,65511	-1,65101	-2,51616	-2,41097	2,48491
		2020	-0,55715	-0,48954	-1,10924	-1,53180	-1,58477	2,48491
		2021	1,56843	1,64763	-1,57476	-4,34051	-4,25949	2,48491
		2022	2,16304	2,23146	-2,06742	-4,10777	-3,80171	2,48491
43	Pemerintah Kabupaten Demak	2018	2,45586	2,53305	-1,56957	-5,38556	-5,28214	2,48491
		2019	2,53304	2,60736	-1,58006	-5,42593	-5,30642	2,48491
		2020	2,98347	3,09267	-1,60318	-5,86089	-6,01539	2,48491
		2021	2,19773	2,31828	-1,57602	-5,12355	-5,31408	2,48491
		2022	2,09166	2,33583	-1,49565	-5,52948	-5,42153	2,48491
44	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	2018	2,84634	3,02712	-1,79064	-3,73540	-3,56245	2,48491
		2019	2,91682	3,15264	-1,93727	-3,89268	-3,70238	2,48491
		2020	2,85531	3,11835	-1,87728	-4,03537	-3,85835	2,48491
		2021	3,04243	3,28039	-1,88559	-4,24089	-4,06895	2,48491
		2022	4,04174	4,22398	-2,16490	-4,59032	-4,34394	2,48491

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
45	Pemerintah Kabupaten Lamongan	2018	1,80304	1,90214	-1,48332	-5,11219	-4,88233	2,48491
		2019	1,49600	1,59301	-1,48768	-4,70590	-4,48616	2,48491
		2020	0,45529	0,65634	-1,38470	-4,45932	-4,27280	2,48491
		2021	1,01585	1,17149	-1,48822	-4,13027	-3,92091	2,48491
		2022						
46	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	2018						
		2019	2,20079	2,27887	-1,63505	-4,88036	-4,74715	2,48491
		2020	0,86695	2,57685	-1,38285	-7,08743	-7,01588	2,48491
		2021	-1,15400	-0,87698	-1,27165	-3,37292	-3,33131	2,48491
		2022	3,35076	3,49259	-1,44445	-7,14440	-7,04790	2,48491
47	Pemerintah Kabupaten Nunukan	2018	-0,42502	-0,33814	-1,30058	-3,18838	-3,11395	2,48491
		2019	-0,60695	-0,44995	-1,29071	-3,20918	-3,14465	2,48491
		2020	-0,47702	-0,13720	-1,32508	-3,25277	-3,18123	2,48491
		2021	0,07845	0,24421	-1,38122	-3,31068	-3,22489	2,56495
		2022	0,16061	0,37012	-1,39668	-3,46415	-3,34349	2,56495
48	Pemerintah Kabupaten Malinau	2018	3,11014	3,55323	-1,50903	-6,74476	-6,64643	2,56495
		2019	2,50752	2,69119	-1,56944	-5,56133	-5,43884	2,56495
		2020	1,77248	2,05596	-1,50519	-5,15658	-5,05137	2,56495
		2021	1,53729	1,71938	-1,50503	-4,75761	-4,66656	2,56495
		2022	1,96953	2,20891	-1,64906	-4,76090	-4,59311	2,56495
49	Pemerintah Kabupaten Karawang	2018	1,60435	1,73925	-1,67846	-4,12911	-3,98805	2,56495
		2019	1,85442	1,95224	-1,66300	-4,42609	-4,25808	2,56495
		2020	2,30699	2,38549	-1,84401	-4,55315	-2,04725	2,56495
		2021	2,65157	2,84865	-2,25993	-4,63303	-4,36674	2,56495
		2022	2,42561	2,62141	-1,89857	-4,73335	-4,54489	2,56495

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
50	Pemerintah Kota Kendari	2018	-0,01098	0,07067	-1,35095	-3,56468	-3,53703	2,56495
		2019	-0,51242	-0,42726	-1,28191	-2,99950	-2,98825	2,56495
		2020	0,43707	0,52178	-1,42138	-3,47783	-3,43195	2,56495
		2021	0,57343	0,64538	-1,43381	-3,14247	-3,10868	2,56495
		2022	0,71267	0,78180	-1,46116	-2,41203	-2,41576	2,56495
51	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	2018	2,92637	3,01742	-1,64480	-5,65260	-5,55349	2,56495
		2019	3,24634	3,28490	-2,06050	-5,25428	-5,06969	2,56495
		2020	3,05640	3,14101	-1,76182	-5,50876	-5,36702	2,56495
		2021	2,48559	2,61090	-1,63212	-5,25516	-5,13865	2,56495
		2022	1,50576	1,81190	-1,56558	-4,57902	-4,46590	2,56495
52	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	2018	3,32466	3,37438	-1,68980	-5,90791	-5,72233	2,56495
		2019	3,01786	3,06095	-1,77136	-5,40639	-5,23174	2,56495
		2020	2,65819	2,71895	-1,65103	-5,31719	-5,16775	2,56495
		2021	2,29809	2,41001	-1,63806	-5,01756	-4,87420	2,56495
		2022	3,01457	3,10661	-1,58100	-5,95428	-5,81538	2,56495
53	Pemerintah Kabupaten Majalengka	2018	0,77780	0,86496	-1,49057	-3,62277	-3,51817	2,56495
		2019	1,16131	1,26519	-1,48289	-4,30075	-4,20074	2,56495
		2020	1,19086	1,34545	-1,47453	-4,47055	-4,37685	2,56495
		2021	0,64449	0,85406	-1,43873	-4,02054	-3,93584	2,56495
		2022	0,99271	1,25351	-1,43860	-4,64799	-4,55848	2,63906
54	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2018	0,96890	1,24210	-1,43301	-4,18629	-4,06457	2,63906
		2019	0,37079	0,64113	-1,39001	-4,22500	-4,14786	2,63906
		2020	0,98374	1,19601	-1,43231	-4,48882	-4,39562	2,63906
		2021	1,95466	2,05486	-1,54516	-4,95289	-4,81032	2,63906
		2022	1,39159	1,55287	-1,48779	-4,65404	-4,51751	2,63906

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
55	Pemerintah Kota Bontang	2018	2,60522	2,73990	-1,67311	-5,28061	-5,11872	2,63906
		2019	2,00325	2,19816	-1,55593	-5,06961	-4,91004	2,63906
		2020	1,97974	2,19556	-1,68037	-4,66239	-4,47232	2,63906
		2021	1,60712	1,92359	-1,52075	-4,91754	-4,76261	2,63906
		2022	2,99180	3,11208	-1,77725	-5,44924	-5,12238	2,63906
56	Pemerintah Kabupaten Garut	2018	1,38369	1,81006	-1,71511	-4,12787	-3,80174	2,63906
		2019	2,76188	2,82468	-1,73072	-5,23689	-4,87633	2,63906
		2020	2,46139	2,57327	-1,63195	-5,21479	-5,02873	2,63906
		2021	1,58426	1,72100	-1,60089	-4,33618	-4,16680	2,63906
		2022	2,99042	3,78141	-2,03822	-5,78977	-5,58668	2,63906
57	Pemerintah Kabupaten Subang	2018	1,27477	1,58376	-1,48062	-4,74120	-4,56555	2,63906
		2019	0,38202	0,70729	-1,45520	-3,58871	-3,42066	2,63906
		2020	1,33913	1,49468	-1,59139	-4,08222	-3,85516	2,63906
		2021	1,55389	1,71167	-1,60758	-4,30191	-4,07003	2,63906
		2022	1,18459	1,31415	-1,52668	-4,11420	-3,89199	2,63906
58	Pemerintah Kabupaten Cilacap	2018	2,22950	2,34657	-1,71776	-4,74396	-4,44915	2,63906
		2019	1,99100	2,10158	-1,59263	-4,81698	-4,44424	2,63906
		2020	2,56306	2,64008	-1,64628	-5,24546	-4,88479	2,63906
		2021	1,75186	1,87286	-1,58214	-4,58769	-4,24912	2,63906
		2022	1,95966	2,17753	-1,49806	-5,33728	-5,02037	2,63906
59	Pemerintah Kabupaten Ketapang	2018	0,37754	0,44966	-1,40876	-3,50484	-3,35804	2,63906
		2019	0,94533	1,00904	-1,46937	-4,01342	-3,86949	2,63906
		2020	1,18585	1,24447	-1,56810	-3,82880	-3,65755	2,63906
		2021	1,93927	1,99791	-1,73108	-4,31684	-4,10348	2,63906
		2022	2,08149	2,12294	-1,75623	-4,41022	-4,16771	2,63906

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
60	Pemerintah Kabupaten Kebumen	2018	2,59920	2,72470	-1,60941	-5,44941	-5,28557	2,63906
		2019	2,23835	2,36561	-1,60596	-5,06896	-4,94331	2,63906
		2020	1,90269	2,03563	-1,61174	-4,67560	-4,54413	2,70805
		2021	1,74603	1,86597	-1,68045	-4,27808	-4,13159	2,70805
		2022	2,05499	2,24443	-1,63813	-4,83249	-4,68418	2,70805
61	Pemerintah Kabupaten Sleman	2018	3,75449	3,84565	-1,99416	-5,62835	-5,32230	2,70805
		2019	4,21664	4,29597	-1,92932	-6,43686	-6,13526	2,70805
		2020	4,60968	4,74325	-1,91777	-6,90439	-6,60616	2,70805
		2021						
		2022						
62	Pemerintah Kota Cilegon	2018	2,61367	2,67283	-1,62385	-5,34741	-4,86581	2,70805
		2019	2,04094	2,10956	-1,55071	-4,99122	-4,54335	2,70805
		2020	3,01019	3,04674	-1,85810	-5,24621	-4,73490	2,70805
		2021	2,64711	2,68348	-2,02132	-4,65484	-4,12612	2,70805
		2022	3,57540	3,63419	-1,85871	-5,85707	-5,34967	2,70805
63	Pemerintah Kabupaten Kediri	2018	4,21593	4,27519	-2,11919	-6,21903	-6,03573	2,70805
		2019	3,61991	3,69611	-2,02310	-5,71746	-5,53953	2,70805
		2020	4,06357	4,14385	-2,06321	-6,13588	-5,95758	2,70805
		2021	3,01949	3,08533	-2,04101	-5,06394	-4,89350	2,70805
		2022	3,06943	3,20523	-1,79543	-5,51418	-5,37546	2,77259
64	Pemerintah Kabupaten Sorong	2018	3,91806	3,97255	-1,60562	-6,76173	-6,67986	2,77259
		2019	2,24504	2,27745	-1,60703	-3,04947	-3,00782	2,77259
		2020	1,33291	1,37800	-1,59991	-2,91737	-2,86914	2,77259
		2021	1,07749	1,13310	-1,53052	-3,32398	-3,27117	2,77259
		2022	1,32315	1,37915	-1,51931	-4,24138	-4,12504	2,77259

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
65	Pemerintah Kabupaten Semarang	2018	2,35688	2,43100	-1,59221	-5,07972	-4,97956	2,77259
		2019	1,97906	2,04828	-1,56955	-4,84227	-4,75064	2,77259
		2020	2,01012	2,10083	-1,59317	-4,81423	-4,71830	2,77259
		2021	1,84221	1,90239	-1,70057	-4,27248	-4,15587	2,77259
		2022	2,04159	2,16370	-1,53655	-5,11722	-4,98650	2,77259
66	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	2018	2,38260	2,54533	-1,50975	-5,67799	-5,61058	2,77259
		2019	1,60094	1,80854	-1,47328	-5,07039	-5,01083	2,77259
		2020	1,37592	1,65774	-1,42382	-5,34271	-5,29385	2,77259
		2021	1,46166	1,71653	-1,43992	-5,24020	-5,18489	2,77259
		2022	1,06241	1,46024	-1,43791	-4,93598	-4,87663	2,77259
67	Pemerintah Kota Batam	2018	1,22818	1,36556	-1,59093	-3,91095	-3,80430	2,77259
		2019	1,59227	1,68427	-1,66209	-4,10393	-3,99638	2,77259
		2020	3,46232	3,57118	-1,91021	-5,72010	-5,56872	2,77259
		2021	2,60652	2,78356	-1,64991	-5,38969	-5,29170	2,77259
		2022	2,22061	2,38608	-1,48894	-5,62706	-5,56960	2,83321
68	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	2018	1,56590	1,69042	-1,67565	-4,07577	-3,92501	2,83321
		2019	1,48830	1,60819	-1,59518	-4,21500	-4,02192	2,83321
		2020	0,74655	0,85812	-1,47609	-3,70946	-3,55629	2,83321
		2021	2,47832	2,71468	-1,60511	-5,45291	-5,28103	2,83321
		2022	2,14249	2,35045	-1,57010	-5,18239	-5,01486	2,83321
69	Pemerintah Kabupaten Kudus	2018	2,00607	2,10969	-1,54096	-5,03503	-4,92757	2,83321
		2019	1,67601	1,79076	-1,56092	-4,57257	-4,46067	2,83321
		2020	2,24022	2,34369	-1,70765	-4,76355	-4,62961	2,83321
		2021	2,85407	2,94911	-1,99608	-4,96666	-4,78414	2,83321
		2022	3,19347	3,28698	-1,79897	-5,59338	-5,44109	2,83321

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
70	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	2018	1,16411	1,48543	-1,49627	-4,51340	-4,36776	2,83321
		2019	1,81395	1,97607	-1,71434	-4,32795	-4,13580	2,83321
		2020	2,07802	2,23127	-1,81946	-4,41937	-4,20061	2,83321
		2021	1,92894	2,05481	-1,83651	-4,18900	-3,95775	2,89037
		2022	1,48753	1,63487	-1,66688	-4,02903	-3,81533	2,89037
71	Pemerintah Kabupaten Lebak	2018	2,37834	2,80041	-1,88632	-4,94351	-4,78963	2,89037
		2019	2,06107	2,62549	-2,01904	-4,59422	-4,41207	2,89037
		2020	2,85323	3,03099	-1,83401	-5,26666	-5,11897	2,89037
		2021	2,79841	3,00710	-1,77532	-5,34216	-5,20432	2,89037
		2022	2,32662	2,51688	-1,67852	-5,02501	-4,88813	2,89037
72	Pemerintah Kota Yogyakarta	2018	2,86622	2,99004	-1,71446	-5,44808	-5,21578	2,89037
		2019						
		2020						
		2021						
		2022						
73	Pemerintah Kabupaten Kampar	2018	2,56767	2,61875	-1,62046	-5,29950	-5,17347	2,94444
		2019	2,87016	2,90859	-1,80527	-5,18429	-5,02563	2,94444
		2020	2,12003	2,19848	-1,61465	-4,85288	-4,73425	2,94444
		2021	1,84411	2,02478	-1,49940	-5,15430	-5,05637	2,94444
		2022	1,00272	1,26135	-1,43348	-4,71211	-4,61676	2,94444
74	Pemerintah Kabupaten Madiun	2018	2,68438	2,78508	-1,58635	-5,59402	-5,47464	2,99573
		2019	2,85113	2,93180	-1,61505	-5,65205	-5,54670	2,99573
		2020	2,85361	2,96616	-1,64127	-5,60859	-5,49661	2,99573
		2021	2,63532	2,70656	-1,77260	-5,02650	-4,88585	2,99573
		2022	2,34328	2,44679	-1,59120	-5,20975	-5,09348	2,99573

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Ln_QR	Ln_CR	Ln_WCTA	Ln_DTE	Ln_DTA	Ln_Kecurangan LKPD
75	Pemerintah Kabupaten Sintang	2018	2,37850	2,42610	-1,64318	-5,02047	-4,91379	2,99573
		2019	1,73499	1,81205	-1,50840	-4,85118	-4,77485	2,99573
		2020	0,90553	1,30914	-1,42115	-4,92071	-4,86623	2,99573
		2021	1,76296	1,93461	-1,58916	-4,63514	-4,54059	2,99573
		2022	2,02057	2,20743	-1,50772	-5,31507	-5,23868	2,99573
76	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	2018	2,28113	2,33593	-1,66103	-4,87070	-4,67836	3,04452
		2019	2,26190	2,48232	-1,63025	-5,12050	-4,90440	3,04452
		2020	-0,43039	0,33650	-1,39423	-2,89299	-2,77713	3,04452
		2021	-0,56690	-0,06084	-1,33011	-2,36249	-2,28214	3,09104
		2022	0,87034	1,17336	-1,47856	-2,88184	-2,75764	3,09104
77	Pemerintah Kabupaten Cirebon	2018	1,76131	1,89882	-1,86037	-3,96790	-3,80720	3,09104
		2019	2,05079	2,16074	-1,80098	-4,37046	-4,23077	3,09104
		2020	1,87823	2,01057	-1,82304	-4,15914	-3,97659	3,09104
		2021	1,36487	1,46137	-1,83087	-3,46186	-3,27619	3,13549
		2022	1,65934	1,76988	-1,71557	-4,07878	-3,92135	3,13549
78	Pemerintah Kabupaten Blitar	2018	2,82883	2,91177	-1,68984	-5,42242	-5,31926	3,13549
		2019	2,05107	2,18393	-1,62026	-4,81846	-4,73161	3,13549
		2020	1,56174	1,73895	-1,55055	-4,55365	-4,48240	3,13549
		2021	2,02891	2,12967	-1,74370	-4,44322	-4,32341	3,17805
		2022	2,12775	2,24604	-1,65452	-4,78763	-4,68148	3,17805
79	Pemerintah Kabupaten Klaten	2018	3,44443	3,63191	-2,03558	-5,63865	-5,43334	3,17805
		2019	3,40838	3,60872	-1,98796	-5,66499	-5,43390	3,17805
		2020						
		2021						
		2022						

Lampiran 5

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
QR	395	.04626	201.15659	14.6760362	20.04056386
CR	395	.17173	227.47375	16.4738274	22.17350203
WCTA	395	-.06880	.26101	.0630960	.04174254
DTE	395	.00051	.21615	.0118362	.01619416
DTA	395	.00067	.20499	.0138100	.01774768
Kecurangan LKPD	395	3	25	11.99	4.573
Valid N (listwise)	395				

Lampiran 6

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

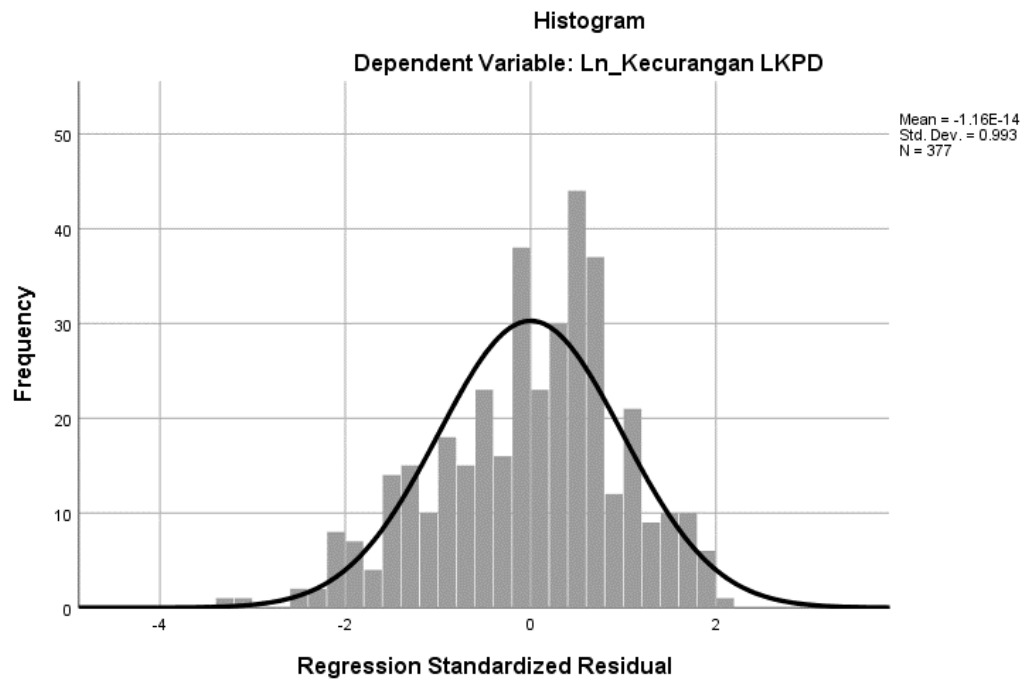
1. Sebelum Eliminasi *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		395
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.45668324
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.028
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c

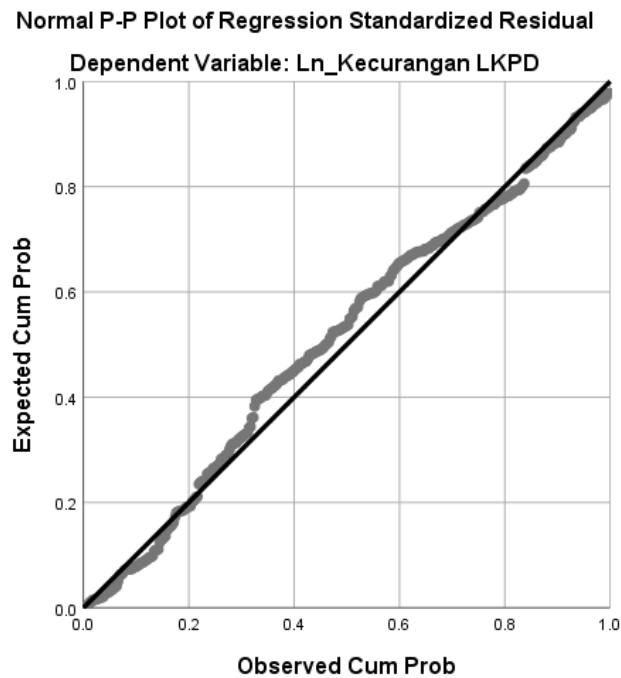
2. Setelah Eliminasi *Outlier* dan Transformasi Logaritma Natural

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		377
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0310786
	Std. Deviation	.34984332
Most Extreme Differences	Absolute	.030
	Positive	.027
	Negative	-.030
Test Statistic		.030
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

3. Histogram Uji Normalitas



4. P-P Plot Uji Normalitas



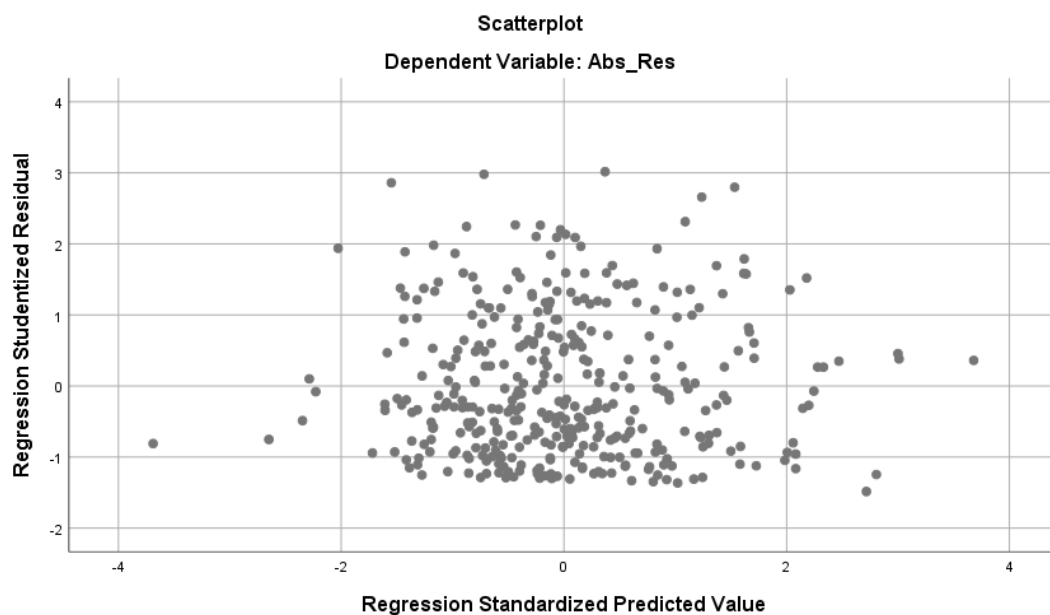
b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_QR	.927	1.079
	Ln_CR	.953	1.050
	Ln_WCTA	.574	1.743
	Ln_DTE	.560	1.787
	Ln_DTA	.524	1.910
a. Dependent Variable: Ln_Kecurangan LKPD			

c. Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.201	.219		.917
	Ln_QR	.008	.082	.042	.922
	Ln_CR	-.011	.092	-.058	.901
	Ln_WCTA	-.080	.115	-.070	.489
	Ln_DTE	.025	.083	.109	.762
	Ln_DTA	-.017	.078	-.076	.823
a. Dependent Variable: Abs_Res					

Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Lampiran 7

Analisis Regresi

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.912	.402		4.761	.000
	Ln_QR	-.500	.150	-1.348	-3.335	.001
	Ln_CR	.523	.169	1.362	3.094	.002
	Ln_WCTA	-.566	.210	-.259	-2.693	.007
	Ln_DTE	.098	.151	.220	.648	.517
	Ln_DTA	.016	.143	.035	.109	.913
a. Dependent Variable: Ln_Kecurangan LKPD						

b. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.326 ^a	.106	.094	.38487676
a. Predictors: (Constant), Ln_DTA, Ln_WCTA, Ln_QR, Ln_DTE, Ln_CR				
b. Dependent Variable: Ln_Kecurangan LKPD				

c. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.525	5	1.305	8.809	.000 ^b
	Residual	54.956	371	.148		
	Total	61.481	376			
a. Dependent Variable: Ln_Kecurangan LKPD						
b. Predictors: (Constant), Ln_DTA, Ln_WCTA, Ln_QR, Ln_DTE, Ln_CR						

d. Uji T

Coefficients^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.761	.000
	Ln_QR	-3.335	.001
	Ln_CR	3.094	.002
	Ln_WCTA	-2.693	.007
	Ln_DTE	.648	.517
	Ln_DTA	.109	.913
a. Dependent Variable: Ln_Kecurangan LKPD			

Lampiran 8

Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fb@uii.ac.id
W. fb.uii.ac.id

Nomor : 0059/PS.II.B.3/II/2024

20 Februari 2024

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala/Pimpinan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

di tempat

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah berupa tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang mahasiswa kami:

Nama : Rizqy Arasiani Annisa
No. Mhs. : 22919025
Program Studi : Magister Akuntansi
No. HP. : 0857-4714-3042
Judul Tesis : Analisis Rasio Keuangan Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)

bermaksud mohon ijin untuk melakukan penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tugas akhir/tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.



Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.